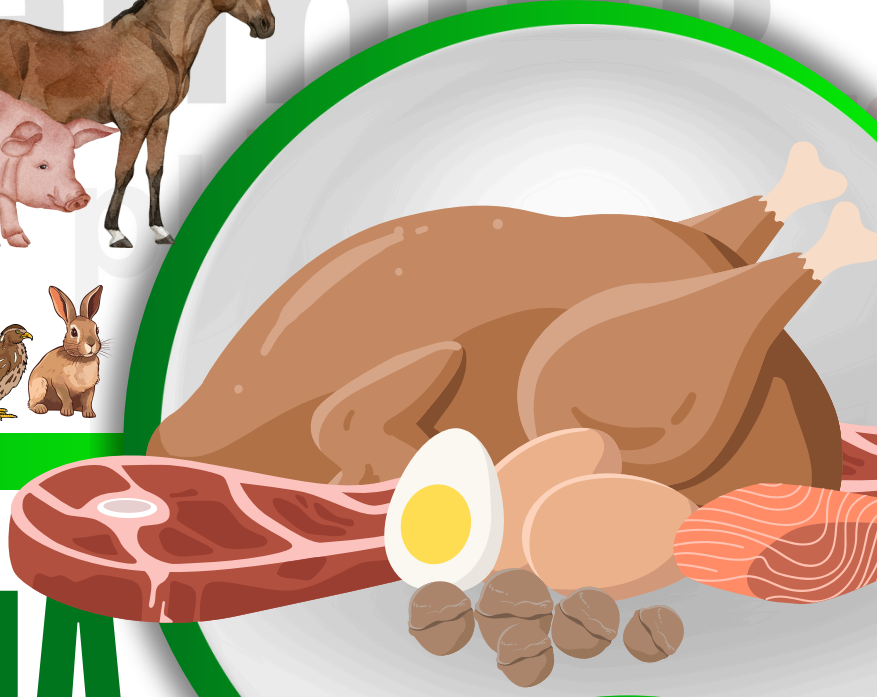




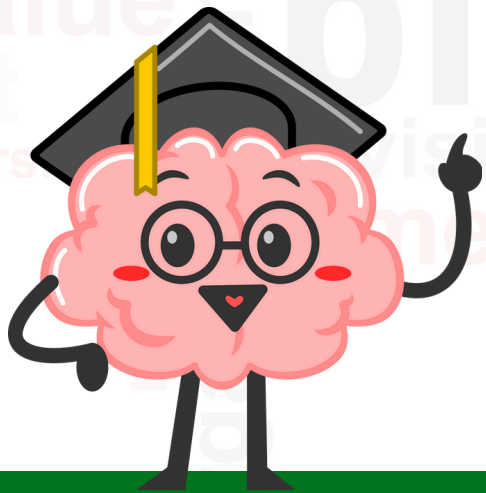
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

Dinas Peternakan
dan Kesehatan hewan

2025-2029



MEMBANGUN GENERASI TANGGUH DENGAN PROTEIN HEWANI ASAL TERNAK



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis dalam mengarahkan pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan.

Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan sektor peternakan, termasuk potensi, tantangan, dan peluang yang ada. Kami juga menyadari bahwa pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur membawa dampak signifikan terhadap dinamika pembangunan daerah, termasuk sektor peternakan. Oleh karena itu, dokumen ini dirancang untuk tidak hanya menjawab tantangan saat ini, tetapi juga memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan tersebut.

Proses penyusunan Renstra ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparatur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Partisipasi aktif dari berbagai stakeholder menjadi kunci dalam menghasilkan rencana yang komprehensif dan realistis.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kami membuka diri untuk masukan dan saran dari semua pihak guna meningkatkan kualitas dan implementasi rencana ini. Harapan kami, Renstra ini dapat menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan sektor peternakan dan kesehatan hewan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan dalam pelaksanaan rencana ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, Oktober 2025

Kepala

Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi
Kalimantan Timur



Rahmi Himawan
Rahmi Himawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 GAMBARAN PELAYANAN	II-1
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah.....	II-1
2.1.2 Sumber daya perangkat daerah.....	II-4
2.1.3 Kondisi umum dan Kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	II-32
2.1.4 Kelompok sasaran layanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	II-63
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	II-73
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	II-74
2.1.7 Kerjasama yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat daerah.....	II-75
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	II-78
2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat daerah.....	II-78
2.2.2 Isu strategis	II-82
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-2
3.3 Strategi PD dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029	III-7
3.3.1 Analisa strategi dengan mempertimbangkan Internal Faktor (IFE) dan Eksternal Faktor (EFE).....	III-9
3.3.2 Analisa Strategi berdasarkan kuadran SWOT (lanjutan IFE/EFE).....	III-11
3.4 Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-14
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Uraian Program	IV-1
4.2 Uraian Kegiatan.....	IV-1
4.3 Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	IV-28
4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	IV-43
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) PD	IV-44
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).....	IV-45
BAB V PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Profil Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Kondisi Per 31 Desember 2024.	II-23
Tabel II-2. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Induk Dinas Peternakan dan....	II-26
Tabel II-3. Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan	II-27
Tabel II-4. Sarana dan Prasarana UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan	II-28
Tabel II-5. Perkembangan Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 (ekor)	II-33
Tabel II-6. Rumah Tangga Usaha Peternakan (RTUP) pada Sensus Tani 2013 dan Sensus Tani 2023	II-34
Tabel II-7. Kelompok Peternak Berdasarkan Komoditas Tahun 2024 (kelompok)....	II-34
Tabel II-8. Data Pemotongan Ternak Tahun 2019-2024 (ekor).....	II-35
Tabel II-9. Pemotongan Ternak Provinsi Kalimantan Timur dari Kab/Kota Tahun 2024 (ekor)	II-36
Tabel II-10. Pemasukan Daging Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 (ton) .	II-37
Tabel II-11. Perkembangan Harga Komoditas Ternak dan Produk Tahun 2019-2024	II-38
Tabel II-12. Pemasukan dan pengeluaran Ternak dari Provinsi Kalimantan Selatan 2023-2024 (ekor) melalui chekpoint	II-40
Tabel II-13. Pemasukan Ternak Berdasarkan Komoditas Tahun 2019-2024 (ekor)	II-41
Tabel II-14. Pemasukan Telur ke Kalimantan Timur (ton)	II-42
Tabel II-15. Konsumsi Daging berdasarkan kabupaten/kota (ton).....	II-43
Tabel II-16. Produksi Daging berdasarkan Kabupaten/Kota.....	II-44
Tabel II-17. Surplus/Defisit Daging berdasarkan Kabupaten/kota.....	II-44
Tabel II-18. Konsumsi daging berdasarkan Komoditas Ruminansia/Non Ruminansia	II-45
Tabel II-19. Prosentase Konsumsi daging berdasarkan komoditas Ruminansia/Non Ruminansia	II-45
Tabel II-20. Produksi daging berdasarkan Komoditas Ruminansia/Non Ruminansia	II-45
Tabel II-21. Prosentase Produksi daging berdasarkan komoditas Ruminansia/Non Ruminansia	II-45
Tabel II-22. Surplus/defisit daging berdasarkan berdasarkan komoditas Ruminansia/Non Ruminansia.....	II-46
Tabel II-23. Konsumsi Telur Berdasarkan kabupaten/kota (ton)	II-46
Tabel II-24. Produksi Telur berdasarkan kabupaten/Kota.....	II-47
Tabel II-25. Surplus/Defisit telur berdasarkan Kabupaten/Kota.....	II-47
Tabel II-26. Surplus/Defisit komoditas daging dan telur Kalimantan Timur.....	II-48
Tabel II-27. Kejadian PHMSZ Tahun 2019-2024 (Kasus)	II-49
Tabel II-28. Ruang Lingkup Uji Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tahun 2024	II-50
Tabel II-29. Pemanfaatan Kawasan Peternakan Tahun 2019-2024 di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur	II-52
Tabel II-30. PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)	II-53
Tabel II-31. Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020- 2024	II-54
Tabel II-32. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur (persen) 2020-2024	II-54
Tabel II-33. Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020- 2024	II-57
Tabel II-34. Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023- 2024	II-58
Tabel II-35. Profil responden berdasarkan unsur pembangunan	II-79
Tabel II-36. Profil responden berdasarkan sumber data lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan.....	II-79
Tabel II-37. Analisis trending word dan topic	II-79

Tabel II-38. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	II-81
Tabel II-39. Isu Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim ...	II-83
Tabel III-1. Keselarasan Target Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Tujuan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029	III-1
Tabel III-2. Perumusan Tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	III-2
Tabel III-3. Faktor-faktor Internal terkait pembobotan pembangunan Peternakan di Kalimantan Timur.....	III-8
Tabel III-4. Faktor-faktor Eksternal dan pembobotan terkait pembangunan Peternakan di Kalimantan Timur.....	III-9
Tabel III-5. Penahapan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim	III-14
Tabel III-6. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) PD	III-16
Tabel IV-1. Keterkaitan Permasalahan Dengan Program.....	IV-7
Tabel IV-2. Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim Tahun 2025-2029.....	IV-8
Tabel IV-3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	IV-28
Tabel IV-4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-43
Tabel IV-5. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim Tahun 2025-2030.....	IV-45
Tabel IV-6. Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim Tahun 2025-2030	IV-46

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1. Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur	II-4
Gambar II-2. Peta Sebaran Populasi Ternak Sapi	II-5
Gambar II-3. Peta Sebaran Populasi Ternak Kambing	II-6
Gambar II-4. Peta Sebaran Populasi Ternak Domba	II-7
Gambar II-5. Peta Sebaran Populasi Ternak Ayam Pedaging	II-8
Gambar II-6. Peta Sebaran Populasi Ternak Ayam Petelur	II-9
Gambar II-7. Peta Sebaran Populasi Ternak Ayam Buras	II-10
Gambar II-8. Peta Sebaran Populasi Walet	II-11
Gambar II-9. Peta Sebaran Lebah Kelulut	II-12
Gambar II-10. Peta Sebaran Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	II-13
Gambar II-11. Peta Sebaran Rumah Potong Hewan (RPH)	II-14
Gambar II-12. Peta Sebaran Vaksinasi PMK 2025 (Dosis)	II-15
Gambar II-13. Peta Sebaran Kegiatan Vaksinasi PMK 2023	II-15
Gambar II-14. Peta Sebaran Kasus PHMSZ 2024	II-16
Gambar II-15. Peta Sebaran Kasus PHMSZ 2023	II-17
Gambar II-16. Peta Sebaran Lokasi PDKT	II-18
Gambar II-17. Peta Sebaran IB 2025	II-19
Gambar II-18. Peta Sebaran Penandaan Ternak	II-20
Gambar II-19. Peta Sebaran Lokasi HPT 2024	II-21
Gambar II-20. Peta Sebaran Lokasi HPT 2019-2023	II-22
Gambar III-1 Matrik IFE/EFE	III-10
Gambar III-2 Matrik Strategi SWOT	III-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki potensi yang signifikan dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan, yang dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Sektor peternakan tidak hanya berperan dalam menyediakan sumber pangan protein hewani, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka stunting, dan pengentasan kemiskinan. Namun, berbagai tantangan internal dan eksternal masih menghambat optimalisasi potensi ini. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain rendahnya produktivitas pakan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta infrastruktur yang belum memadai. Di sisi eksternal, fluktuasi harga, perubahan iklim, dan persaingan pasar menjadi ancaman serius yang perlu diatasi.

Salah satu isu terkini yang mempengaruhi dinamika pembangunan di Kalimantan Timur adalah pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur. Pemindahan IKN ini membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk peternakan dan kesehatan hewan. Dampak positif yang diharapkan adalah peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan permintaan akan produk peternakan seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Namun, di sisi lain, pemindahan IKN juga berpotensi menimbulkan tantangan baru, seperti kompetisi penggunaan lahan antara sektor peternakan dengan pembangunan infrastruktur dan permukiman, serta tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan beberapa kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti program pengembangan potensi peternakan melalui penguatan produksi dan pencegahan serta pengendalian penyakit yang efektif, potensi pengembangan berbagai jenis ternak, serta peningkatan konsumsi daging dan telur. Namun, kelemahan dan ancaman seperti masalah kesehatan hewan, rendahnya daya saing peternak, minimnya investor peternakan, keterbatasan modal, dan penyakit hewan menular juga perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan potensi dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada, sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari pemindahan IKN.

Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual, tantangan, dan peluang yang ada, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kalimantan Timur selama periode 2025-2029, dengan tetap memperhatikan dinamika dan dampak dari pemindahan IKN.

Dengan latar belakang ini, diharapkan Renstra dapat menjadi dokumen yang komprehensif dan responsif terhadap tantangan serta peluang yang muncul, khususnya dalam konteks pemindahan IKN dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
3. Undang-undang No. 18 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045;
7. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur juga senantiasa memperhatikan peraturan perundangan lainnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2025-2029. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual, tantangan, dan peluang yang ada, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

1. Menyediakan kerangka strategis yang komprehensif untuk pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Mengidentifikasi dan memprioritaskan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur pendukung sektor peternakan dan kesehatan hewan.

5. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memberikan gambaran umum tentang kondisi geografis, demografis, dan potensi sektor peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas, fungsi dan struktur Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan, sumberdaya perangkat daerah (capaian SPM sesuai dengan tupoksi), dan Kelompok sasaran layanan

Permasalahan pelayanan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan, baik dari aspek internal maupun eksternal.

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029,

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANIAN SUBSEKTOR PETERNAKAN

Bab ini memuat tentang uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif.

Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan substansi, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

b. Fungsi

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
4. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kawasan dan agribisnis peternakan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesehatan hewan;

8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat veteriner;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
12. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Uraian Tugas

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai uraian tugas :

- 1) Merumuskan program kerja di lingkungan dinas berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Merumuskan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan hasil produksi peternakan dan kesehatan hewan;
- 6) Melaksanakan koordinasi program kegiatan dengan perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi hasil peternakan;
- 7) Mengendalikan pelaksanaan program dinas berdasarkan rencana program dan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar;

- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur baik lisan maupun tertulis.

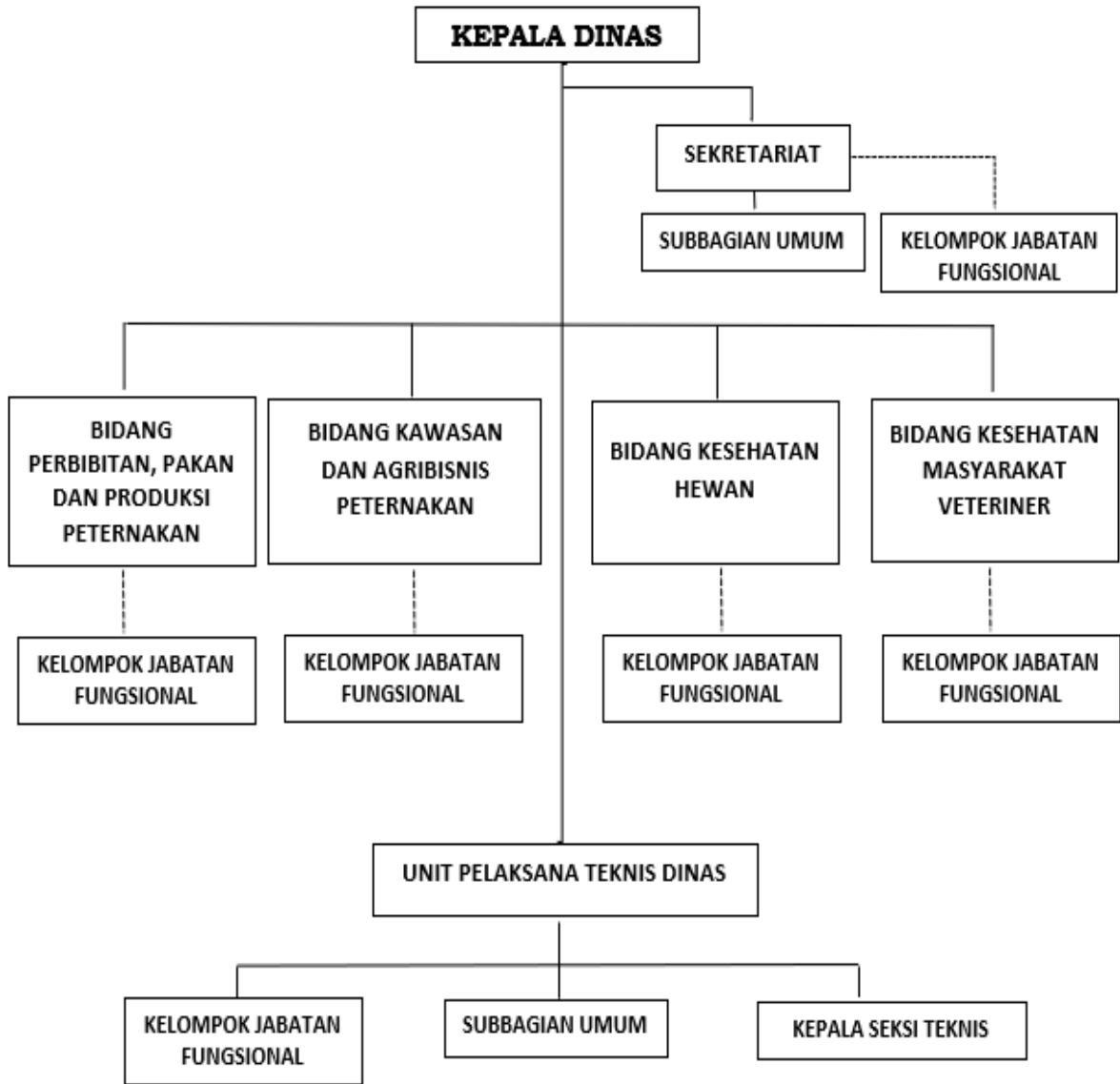
d. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan
4. Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis Peternakan
5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak
 - c. Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak
8. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan
 - c. Kepala Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar bagan berikut;



Gambar II-1. Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

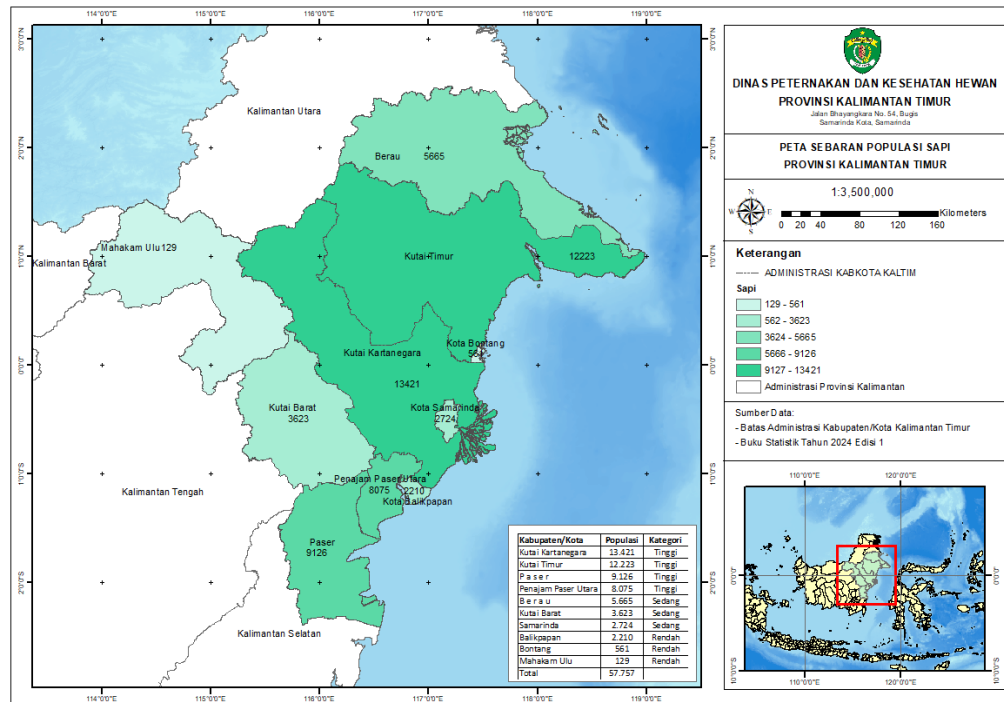
2.1.2 Sumber daya perangkat daerah

a. Aspek Geografi

Secara geografis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terletak pada koordinat 00°29'34,3"S 117°08'41,5"E. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat peternak meliputi pelayanan teknis, sarana dan prasarana, pembinaan dan dukungan regulasi.

b. Sebaran Ternak

(1) Komoditas Ternak Sapi

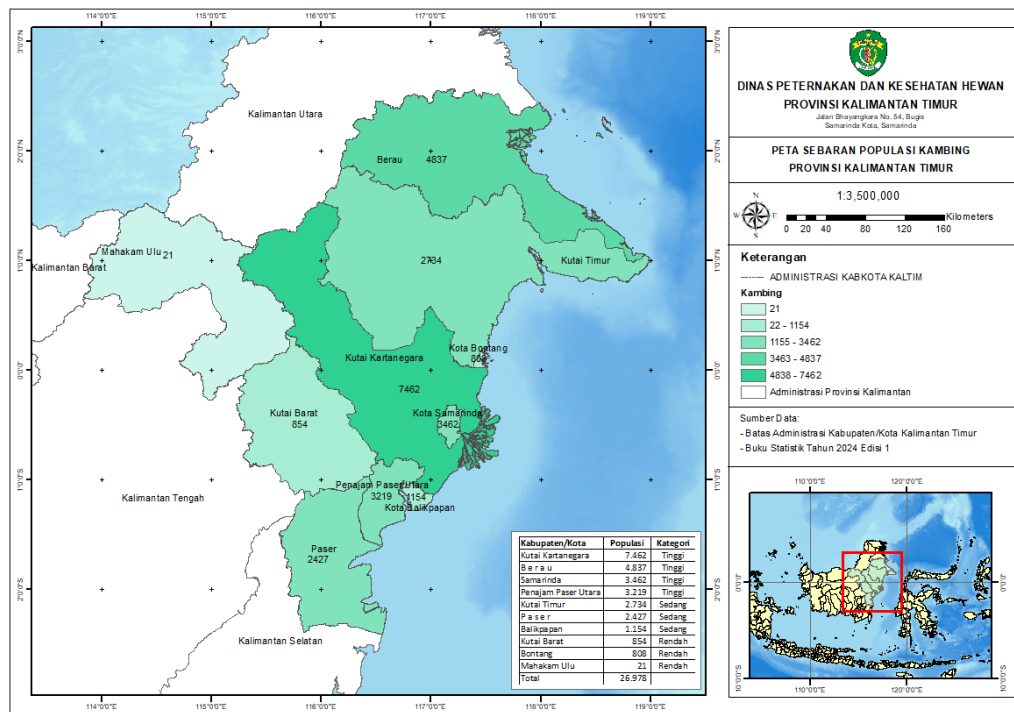


Gambar II-2. Peta Sebaran Populasi Ternak Sapi

Berdasarkan data buku statistik peternakan dan kesehatan hewan edisi 1 tahun 2024, populasi ternak sapi potong di Kalimantan timur pada tahun 2023 berjumlah 57.757 ekor yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota yang dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepadatan populasi yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota sebagai berikut:

- Tingkat kepadatan populasi tinggi terdapat di Kutai Kartanegara memiliki jumlah populasi ternak sapi potong berjumlah 13.421 ekor, Kutai Timur berjumlah 12.223 ekor, Paser berjumlah 9.126 ekor dan Penajam Paser Utara berjumlah 8.075 ekor.
- Tingkat kepadatan populasi sedang terdapat di Berau memiliki jumlah ternak sapi potong berjumlah 5.665 ekor, Kutai Barat berjumlah 3.623 dan samarinda berjumlah 2.724 ekor.
- Tingkat kepadatan populasi rendah terdapat di Balikpapan memiliki jumlah populasi ternak sapi potong berjumlah 2.210 ekor, Bontang berjumlah 561 ekor dan Mahakam Ulu berjumlah 129 ekor.

(2) Komoditas Ternak Kambing

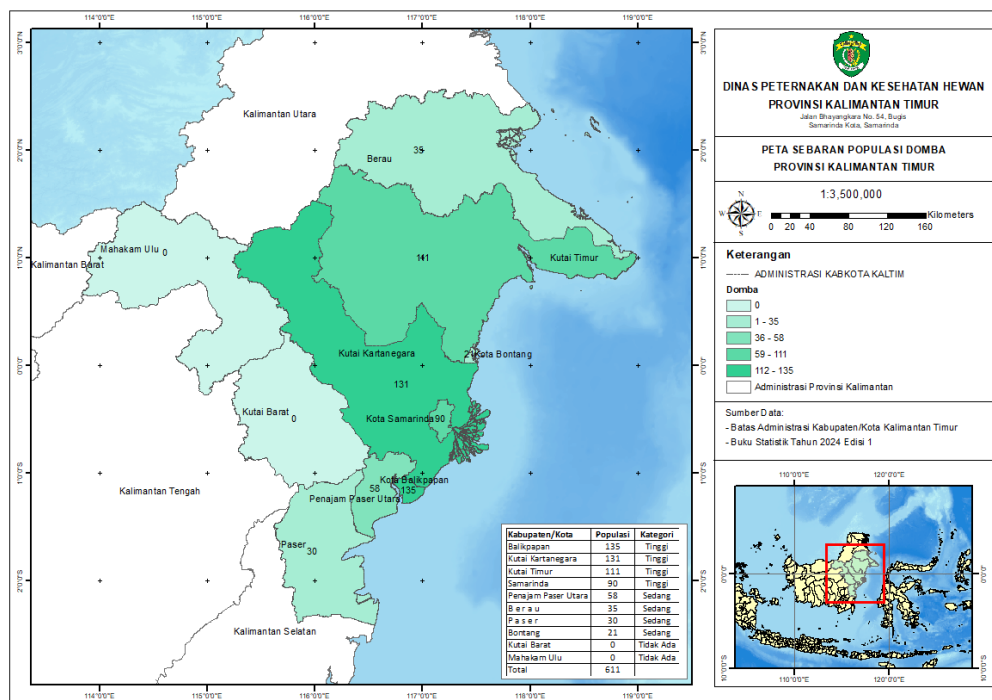


Gambar II-3. Peta Sebaran Populasi Ternak Kambing

Berdasarkan data buku statistik peternakan dan kesehatan hewan edisi 1 tahun 2024, populasi ternak kambing potong pada tahun 2023 di Kalimantan timur berjumlah 26.978 ekor yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota yang dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepadatan populasi yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota sebagai berikut:

- Tingkat kepadatan populasi tinggi terdapat di Kutai Kartanegara memiliki jumlah populasi ternak kambing potong berjumlah 7.462 ekor, Berau berjumlah 4.837 ekor, Samarinda berjumlah 3.462 ekor, dan Penajam Paser Utara berjumlah 3.219 ekor.
- Tingkat kepadatan populasi sedang terdapat di Kutai Timur memiliki jumlah populasi ternak kambing potong berjumlah 2.734 ekor, Paser berjumlah 2.427 ekor dan Balikpapan berjumlah 1.154 ekor.
- Tingkat kepadatan populasi rendah terdapat di Kutai Barat memiliki jumlah populasi ternak sapi potong berjumlah 854 ekor, Bontang berjumlah 808 ekor dan Mahakam Ulu berjumlah 21 ekor.

(3) Komoditas Ternak Domba

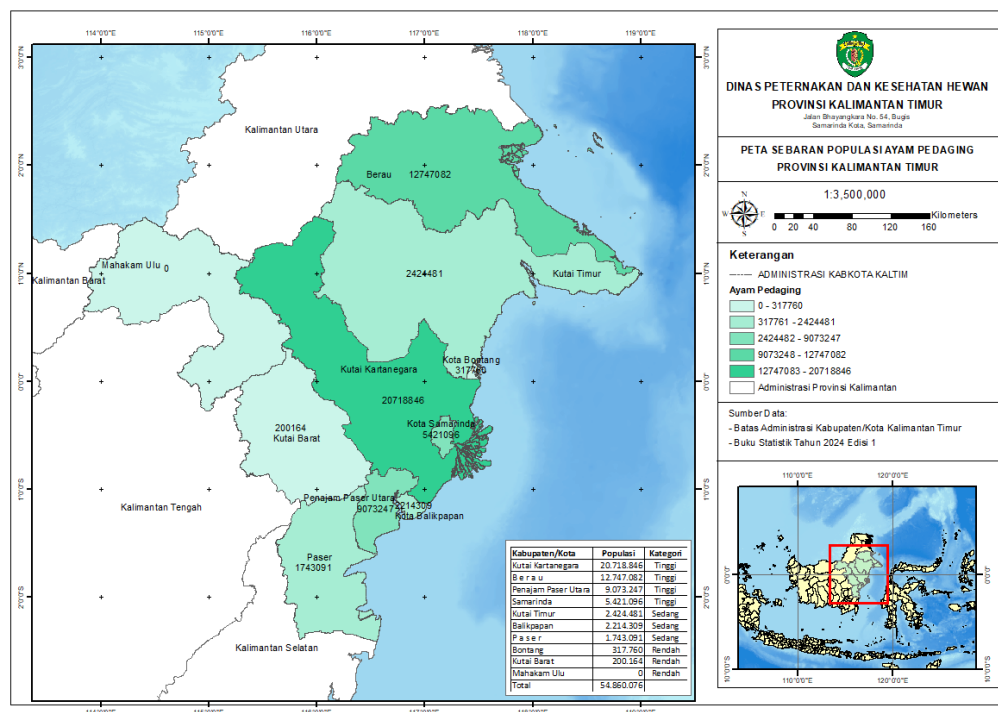


Gambar II-4. Petas Sebaran Populasi Ternak Domba

Berdasarkan data buku statistik peternakan dan kesehatan hewan edisi 1 tahun 2024, populasi ternak domba di Kalimantan timur pada tahun 2023 berjumlah 611 ekor yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota yang dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepadatan populasi yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota sebagai berikut:

- Tingkat kepadatan populasi tinggi terdapat di Balikpapan memiliki jumlah populasi ternak domba berjumlah 135 ekor, Kutai Kartanegara berjumlah 131 ekor, Kutai Timur berjumlah 111 ekor dan Samarinda berjumlah 90 ekor.
- Tingkat kepadatan populasi sedang terdapat di Penajam Paser Utara memiliki jumlah populasi ternak domba berjumlah 58 ekor, Berau berjumlah 35 ekor, Paser berjumlah 30 ekor, dan Bontang berjumlah 21 ekor.
- Tidak terdapat kepadatan populasi terdapat di Kutai Barat dan Mahakam Ulu karena tidak ada pemeliharaan domba di dua Kabupaten tersebut.

(4) Komoditas Ternak Ayam Pedaging

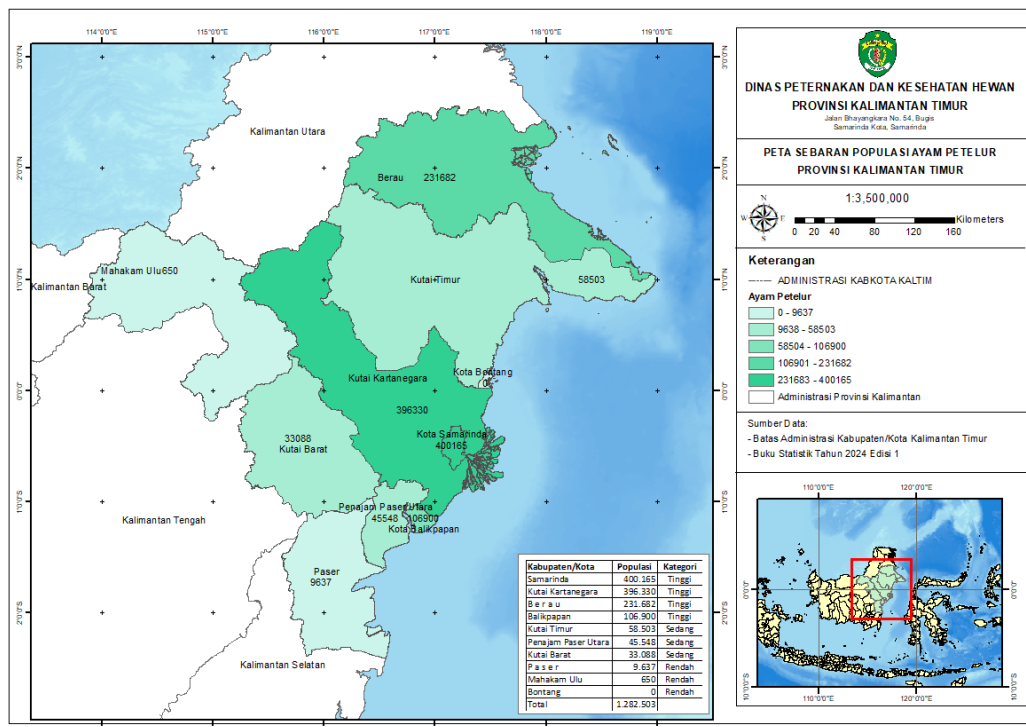


Gambar II-5. Peta Sebaran Populasi Ternak Ayam Pedaging

Berdasarkan data buku statistik peternakan dan kesehatan hewan edisi 1 tahun 2024, populasi ternak ayam pedaging di Kalimantan timur pada tahun 2023 berjumlah 54.860.076 ekor yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota yang dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepadatan populasi yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota sebagai berikut:

- Tingkat kepadatan populasi tinggi terdapat di Kutai Kartanegara memiliki jumlah populasi ternak ayam pedaging berjumlah 20.718.846 ekor, Berau berjumlah 12.747.082 ekor, Penajam Paser Utara berjumlah 9.073.247 ekor, dan Samarinda berjumlah 5.421.096 ekor.
- Tingkat kepadatan populasi sedang terdapat di Kutai Timur memiliki jumlah populasi ternak ayam pedaging berjumlah 2.424.481 ekor, Balikpapan berjumlah 2.214.309 ekor, dan Paser berjumlah 1.743.091 ekor
- Tingkat kepadatan populasi rendah terdapat di Bontang memiliki jumlah populasi ternak ayam pedaging berjumlah 317.760 ekor, Kutai Barat berjumlah 200.164 ekor, dan tidak ada pemeliharaan ayam pedaging di Mahakam ulu.

(5) Komoditas Ternak Ayam Petelur

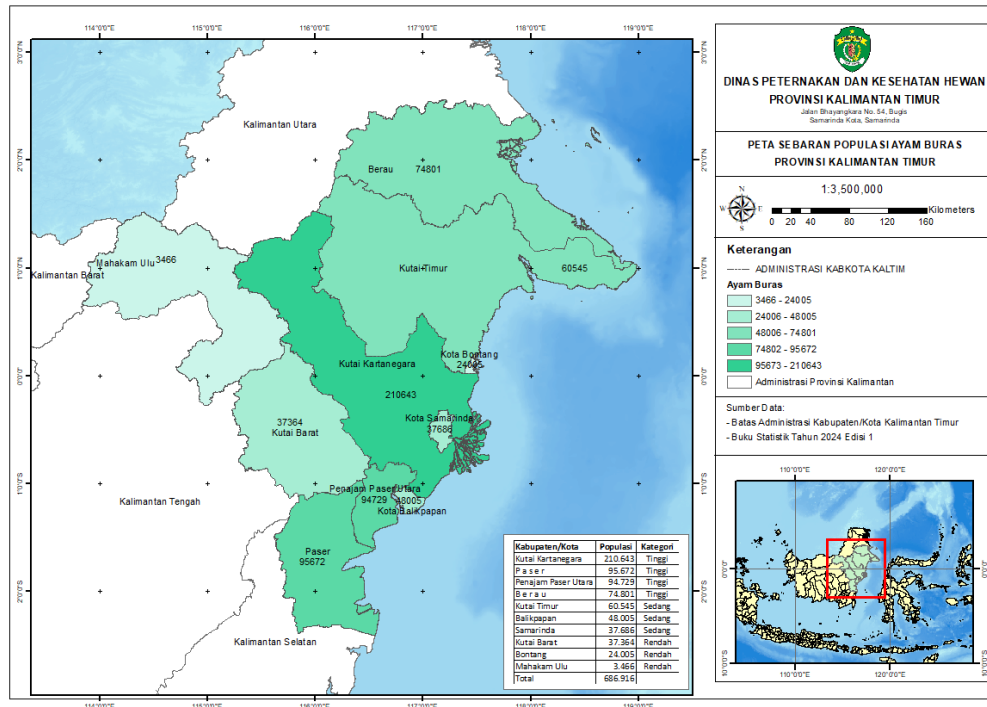


Gambar II-6. Peta Sebaran Populasi Ternak Ayam Petelur

Berdasarkan data buku statistik peternakan dan kesehatan hewan edisi 1 tahun 2024, populasi ternak ayam petelur di Kalimantan timur pada tahun 2023 berjumlah 1.282.503 ekor yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota yang dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepadatan populasi yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota sebagai berikut:

- Tingkat kepadatan populasi tinggi terdapat di Samarinda memiliki jumlah populasi ternak ayam pedaging berjumlah 400.165 ekor, Kutai Kartanegara berjumlah 396.330 ekor, Berau berjumlah 231.682 ekor, dan Balikpapan berjumlah 106.900 ekor .
- Tingkat kepadatan populasi sedang terdapat di Kutai Timur memiliki jumlah populasi ternak ayam pedaging berjumlah 58.503 ekor, Penajam Paser Utara berjumlah 45,548 ekor, dan Kutai Barat 33.088 ekor.
- Tingkat kepadatan populasi rendah terdapat di Paser memiliki jumlah populasi ternak ayam pedaging berjumlah berjumlah 9.637 ekor, Mahakam ulu berjumlah 650 ekor, dan dan tidak ada pemeliharaan ayam pedaging di Bontang

(6) Komoditas Ternak Ayam Buras

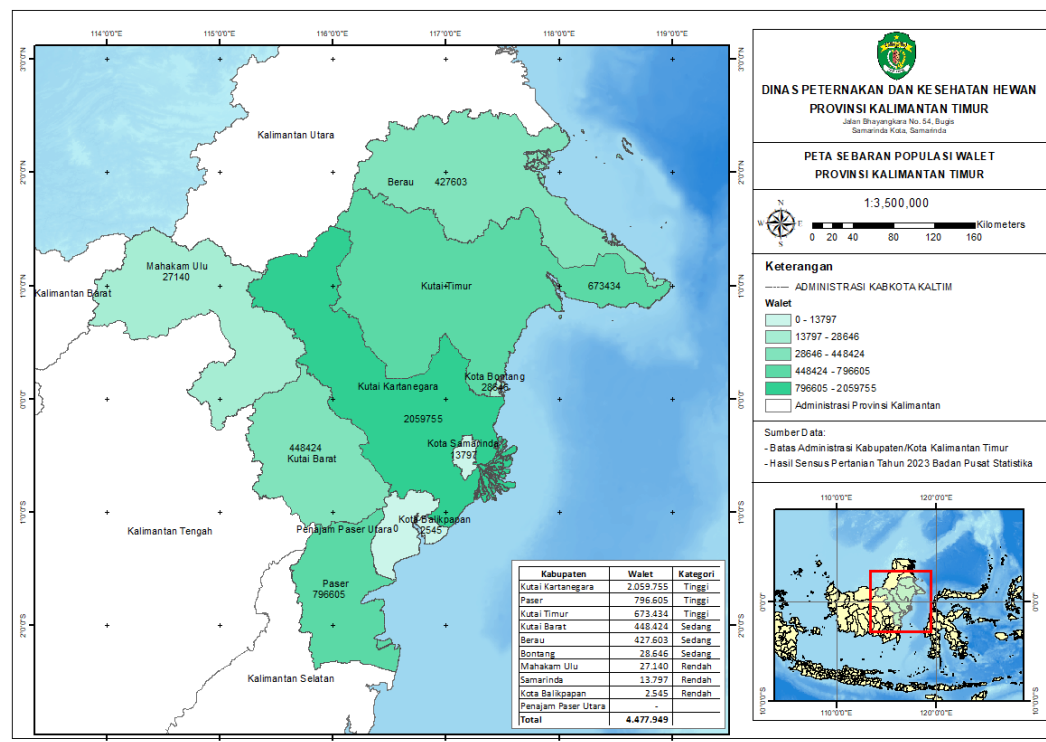


Gambar II-7. Peta Sebaran Populasi Ternak Ayam Buras

Berdasarkan data buku statistik peternakan dan kesehatan hewan edisi 1 tahun 2024, populasi ternak ayam buras di Kalimantan timur pada tahun 2023 berjumlah 686.916 ekor yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota yang dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepadatan populasi yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota sebagai berikut:

- Tingkat kepadatan populasi tinggi terdapat di Kutai Kartanegara memiliki jumlah populasi ternak ayam buras berjumlah 210.643 ekor, Paser berjumlah 95.672 ekor, Penajam Paser Utara berjumlah 94.729 ekor dan Berau berjumlah 74.801 ekor.
- Tingkat kepadatan populasi sedang terdapat di Kutai Timur memiliki jumlah populasi ternak ayam buras berjumlah 60.545 ekor, Balikpapan berjumlah 48.005 ekor dan Samarinda berjumlah 37.686 ekor.
- Tingkat kepadatan populasi rendah terdapat di Kutai Barat memiliki jumlah populasi ternak ayam buras berjumlah 37.364 ekor, Bontang berjumlah 24.005 ekor dan Mahakam Ulu berjumlah 3.466 ekor.

(7) Komoditas Burung Walet

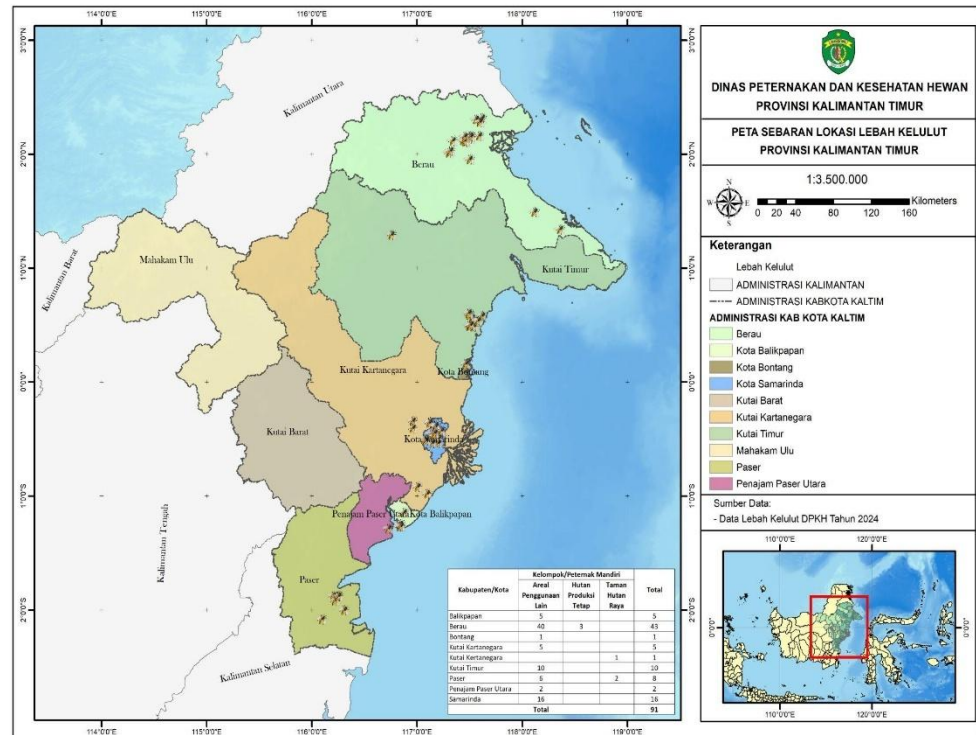


Gambar II-8. Peta Sebaran Populasi Walet

Berdasarkan data buku statistik peternakan dan kesehatan hewan edisi 1 tahun 2024, populasi ternak walet di Kalimantan timur pada tahun 2023 berjumlah 4.557.023 ekor yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota yang dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepadatan populasi yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota sebagai berikut:

- Tingkat kepadatan populasi tinggi terdapat di Kutai Kartanegara memiliki jumlah populasi ternak walet berjumlah 2.059.755 ekor, Paser berjumlah 796.605 ekor, Kutai Timur berjumlah 722.979 ekor dan Berau berjumlah 452.695 ekor.
- Tingkat kepadatan populasi sedang terdapat di Kutai Barat memiliki jumlah populasi ternak walet berjumlah 448.424 ekor, Samarinda berjumlah 34.668 ekor dan Bontang berjumlah 28.646 ekor.
- Tingkat kepadatan populasi rendah terdapat di Balikpapan memiliki jumlah populasi ternak walet berjumlah 10.537 ekor, Mahakam Ulu berjumlah 2.714 ekor dan Penajam Paser Utara berjumlah 0 ekor.

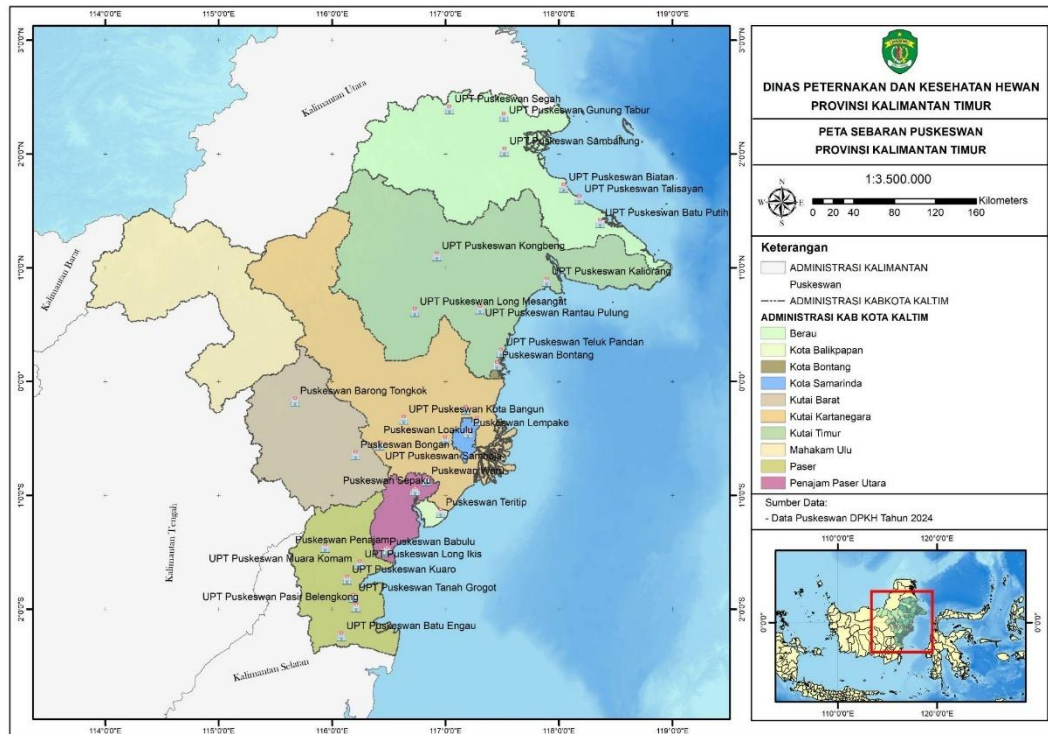
(8) Komoditas Ternak Lebah Madu (Kelulut)



Gambar II-9. Peta Sebaran Lebah Kelulut

Lebah kelulut adalah salah satu jenis lebah tanpa sengat yang memiliki peran penting dalam ekosistem dan sektor ekonomi, terutama dalam produksi madu berkualitas tinggi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mendata sebaran lebah kelulut yang tersebar 9 Kabupaten/Kota berjumlah 91 lokasi yaitu Balikpapan berjumlah 5 lokasi, Berau berjumlah 43 lokasi, Bontang berjumlah 1 lokasi, Kutai Kartanegara berjumlah 5 lokasi, Kutai Kartanegara berjumlah 1 lokasi, Kutai Timur berjumlah 10 lokasi, Paser berjumlah 8 lokasi, Penajam Paser Utara berjumlah 2 lokasi dan Samarinda berjumlah 16 lokasi. Adapun lokasi lebah kelulut tersebar di kawasan areal penggunaan lain.

c. Sebaran pusat kesehatan hewan (Puskeswan)

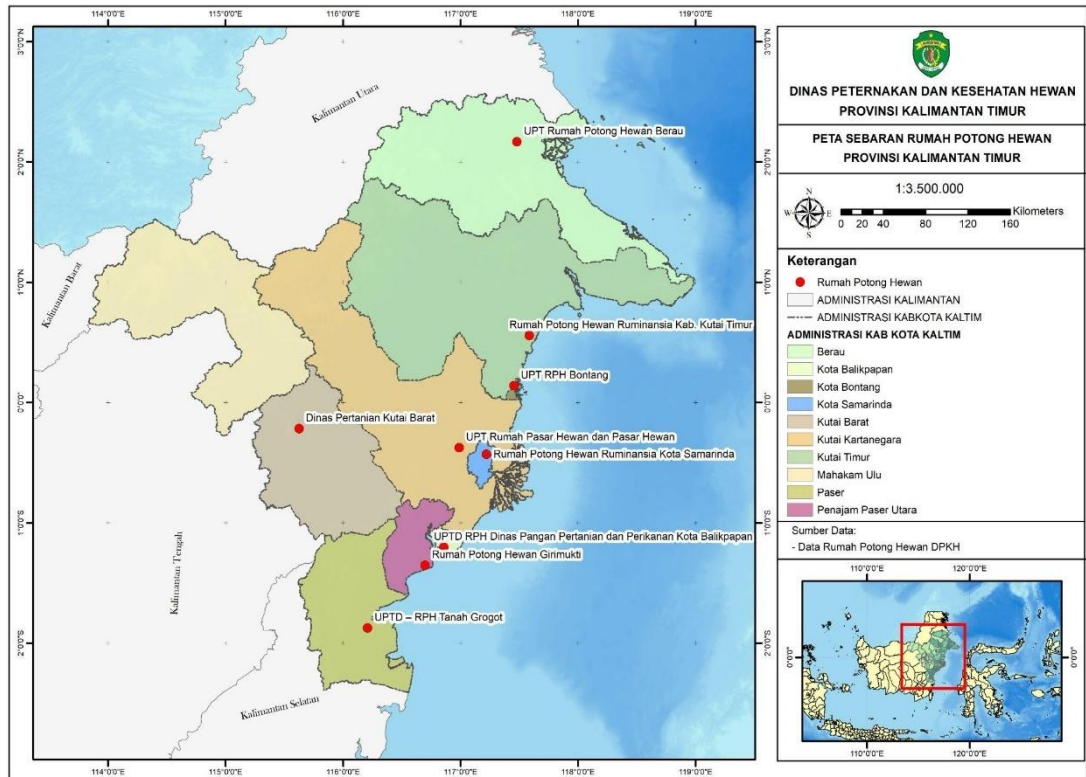


Gambar II-10. Peta Sebaran Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)

Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) merupakan fasilitas penting dalam mendukung kesehatan hewan dan pengembangan sektor peternakan di Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah yang besar serta populasi ternak yang signifikan, keberadaan Puskeswan menjadi sangat penting untuk memberikan pelayanan medis bagi hewan ternak, hewan peliharaan, serta mencegah penyebaran penyakit zoonosis yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 31 unit yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota dengan jumlah 1 puskeswan (Balikpapan), 6 puskeswan (Berau), 1 puskeswan (Bontang), 2 puskeswan (Kutai Barat), 5 puskeswan (Kutai Kartanegara), 5 puskeswan (Kutai Timur), 6 puskeswan (Paser), 4 puskeswan (Penajam Paser Utara) dan 1 puskeswan (Samarinda).

d. Sebaran Rumah Potong hewan

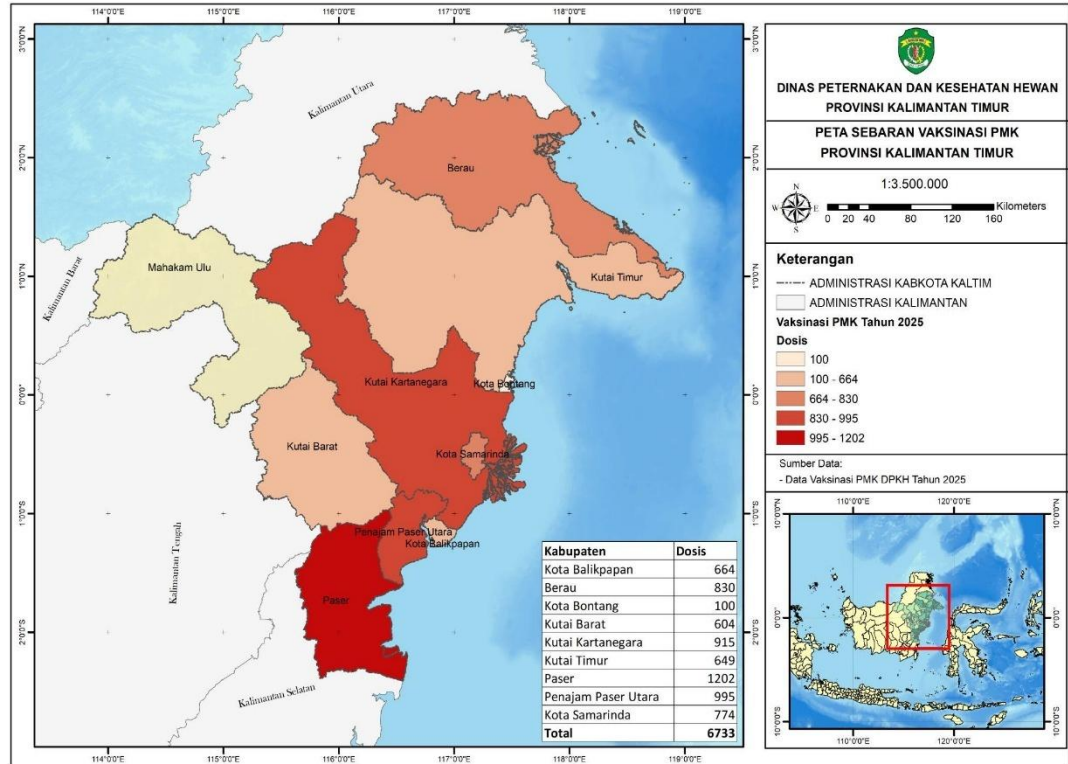


Gambar II-11. Peta Sebaran Rumah Potong Hewan (RPH)

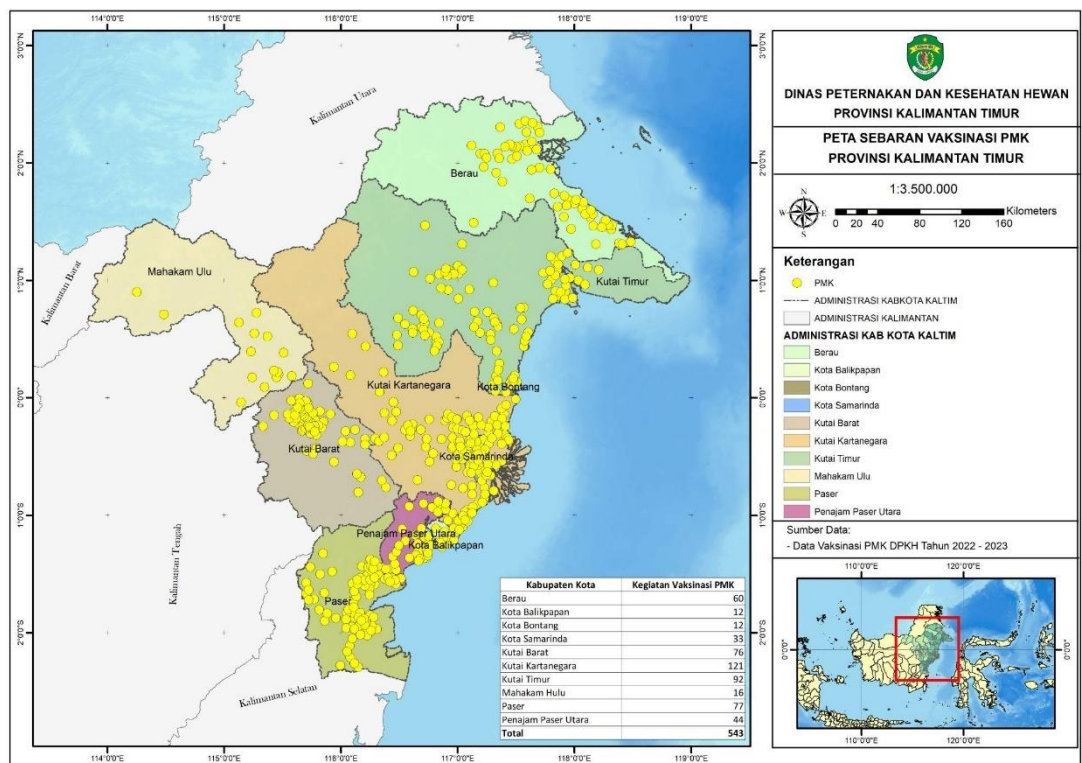
Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan fasilitas penting dalam industri peternakan yang berfungsi untuk menyembelih dan mengolah daging secara higienis serta memenuhi standar kesehatan masyarakat. Keberadaan RPH yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Timur berperan dalam menjamin ketersediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Pemetaan sebaran RPH menjadi langkah strategis dalam mengidentifikasi daerah dengan infrastruktur pemotongan hewan yang memadai, serta menentukan kebutuhan pengembangan untuk mendukung industri peternakan dan konsumsi masyarakat.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Rumah Potong Hewan sebanyak 9 unit yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota.

e. Cakupan Vaksinasi PMK



Gambar II-12. Peta Sebaran Vaksinasi PMK 2025 (Dosis)



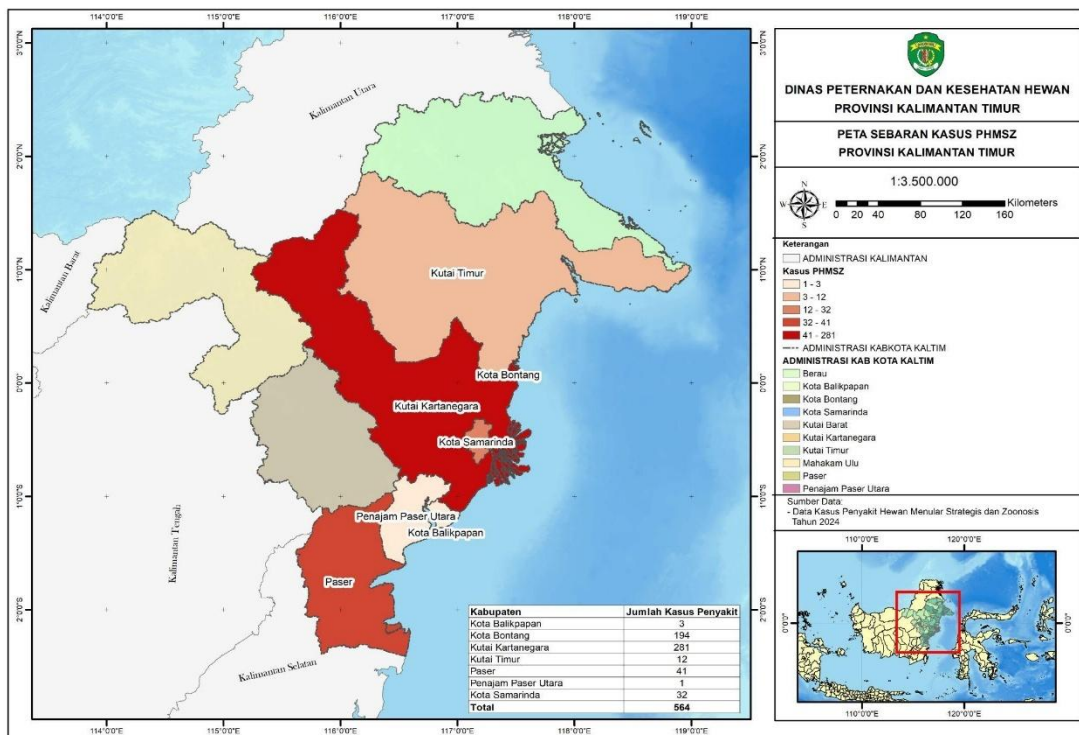
Gambar II-13. Peta Sebaran Kegiatan Vaksinasi PMK 2023

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah penyakit menular yang menyerang hewan berkuku belah, seperti sapi, kerbau, domba, kambing dan babi. Penyakit ini disebabkan oleh virus PMK yang dapat menyebar dengan cepat melalui kontak

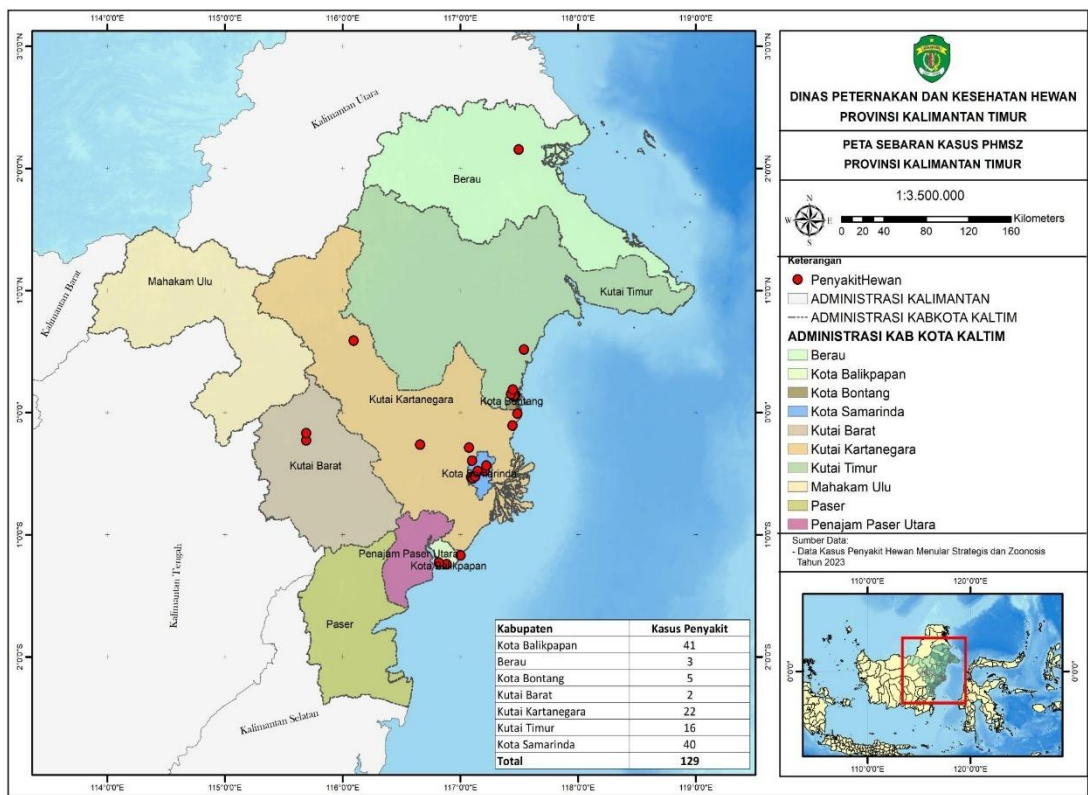
langsung atau melalui benda-benda yang terkontaminasi virus. Pada tahun 2025 telah dilakukan vaksinasi PMK di 9 Kabupaten/Kota dengan total 6.733 dosis sedangkan pada tahun 2022 - 2023 terdapat 86 wilayah kecamatan yang dilakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Apabila terjadi kasus PMK di wilayah Kalimantan Timur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan, seperti karantina hewan, pemusnahan hewan yang terinfeksi, dan pemberian vaksinasi massal pada hewan yang belum terinfeksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ke daerah lain dan melindungi kesehatan hewan serta masyarakat yang terkait dengan kegiatan peternakan.

f. Sebaran Identifikasi Kasus PHMSZ (Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis)



Gambar II-14. Peta Sebaran Kasus PHMSZ 2024



Gambar II-15. Peta Sebaran Kasus PHMSZ 2023

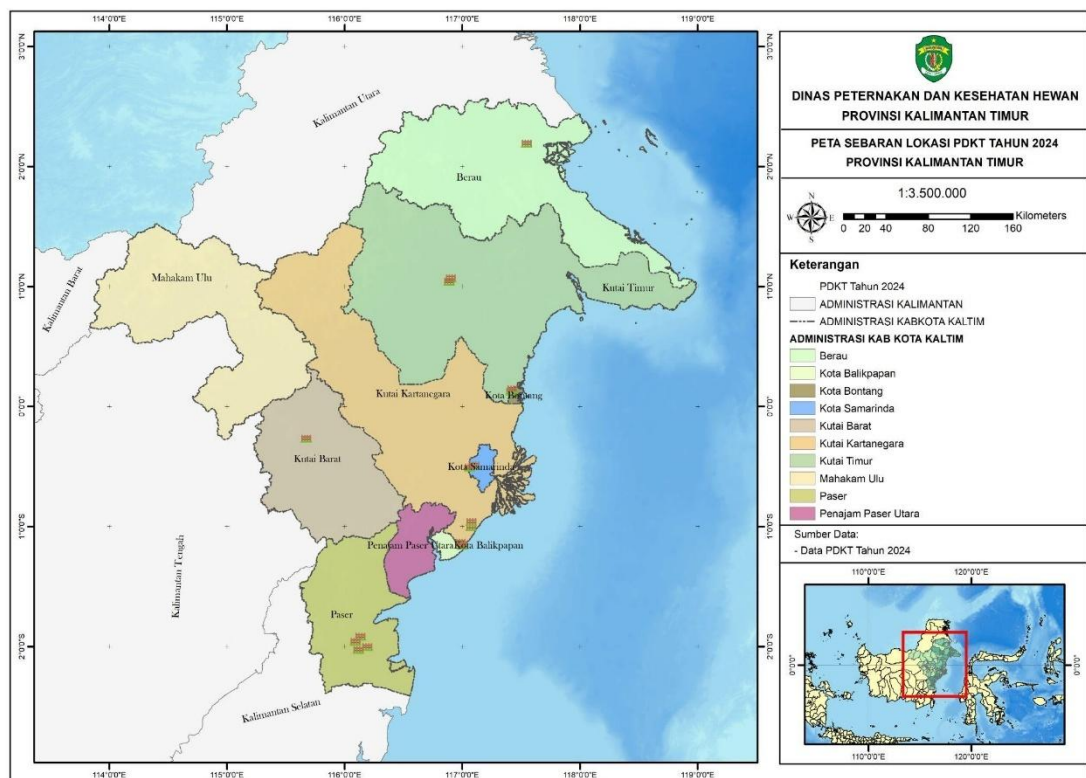
Penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMSZ) adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonosis. Di Kalimantan Timur, penyakit ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada industri peternakan, kesehatan masyarakat, serta ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemetaan sebaran kasus PHMSZ sangat penting dalam mengidentifikasi wilayah terdampak serta dalam upaya pencegahan dan pengendaliannya.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan penyakit menular strategis dan zoonosis pada hewan, seperti penyakit Jembrana, Rabies, Avian Influenza (AI / Flu Burung), African Swine Fever (ASF), Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) serta melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui vaksinasi, karantina dan tindakan sanitasi yang ketat di fasilitas peternakan dan pasar hewan.

Pada tahun 2024 terdapat 564 kasus penyakit PHMSZ yang ada di 16 kecamatan di 7 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang terdeteksi penyakit Avian Influenza (Flu Burung) sebanyak 488 kasus, penyakit Rabies sebanyak 3 kasus, penyakit African Swine Fever (ASF) sebanyak 21 kasus, penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) sebanyak 45 kasus, penyakit Rabies sebanyak 3 kasus dan penyakit Jembrana sebanyak 7 kasus.

Pada Tahun 2023 terdapat 129 kasus penyakit PHMSZ yang ada di 18 kecamatan di 7 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang terdeteksi penyakit Avian Influenza (Flu Burung) sebanyak 96 kasus, penyakit Rabies sebanyak 5 kasus, penyakit African Swine Fever (ASF) sebanyak 2 kasus, penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) sebanyak 1 kasus, penyakit Rabies sebanyak 5 kasus dan penyakit Brucellosis sebanyak 25 kasus.

g. Sebaran Project Pengembangan Desa Korporasi ternak (PDKT)



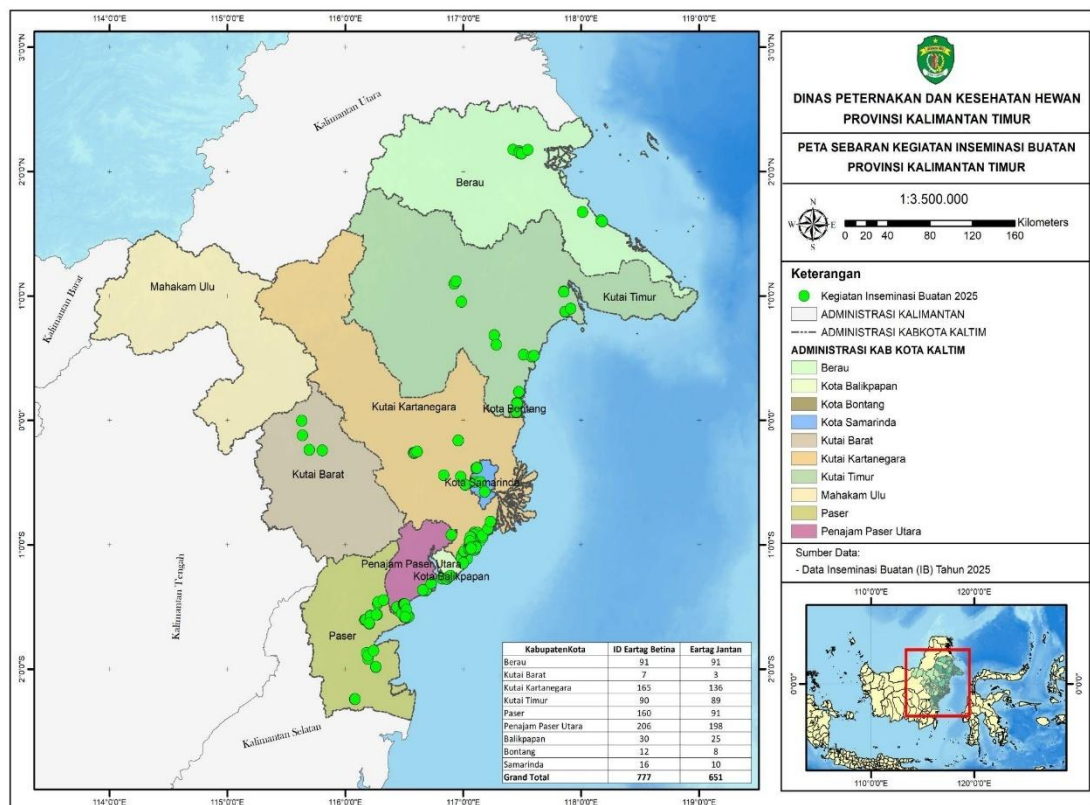
Gambar II-16. Peta Sebaran Lokasi PDKT

Pada tahun 2024, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki program *mayor project* yaitu Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) yang didasarkan pada pemahaman bahwa peternakan dapat menjadi salah satu sektor ekonomi yang

berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Dengan pengembangan usaha ternak yang berkelanjutan, desa korporasi ternak dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Pengembangan Desa Korporasi Ternak tersebar di 7 Kabupaten/Kota yaitu Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda, Kutai Timur dan Berau. Adapun komoditi ternak dari PDKT yaitu sapi dan kambing.

h. Sebaran Kegiatan Inseminasi buatan Pada Ternak



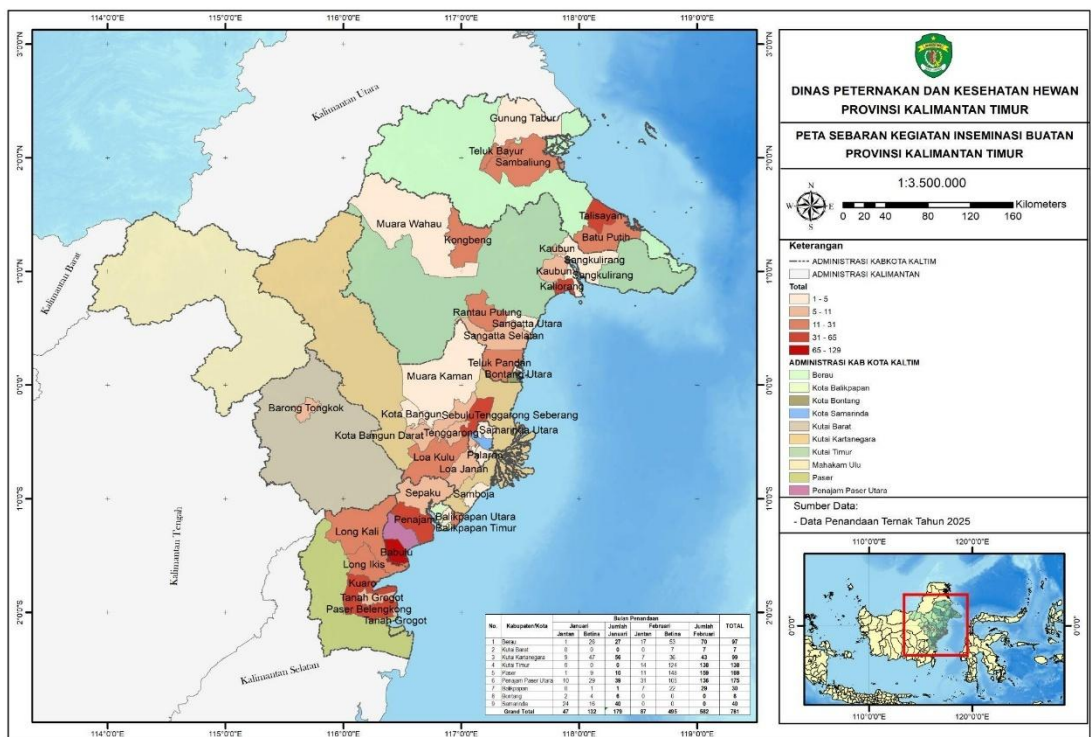
Gambar II-17. Peta Sebaran IB 2025

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki program inseminasi buatan (IB) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas peternakan di wilayah tersebut. Inseminasi buatan adalah teknik reproduksi yang dilakukan dengan memasukkan sperma pejantan ke dalam saluran reproduksi betina secara buatan tanpa melalui proses kawin alami. Teknologi ini banyak diterapkan pada ternak seperti sapi, kambing, domba, kuda, dan unggas untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas keturunan. Inseminasi buatan telah dilakukan di 10

Kabupaten/Kota yang tersebar di 50 wilayah kecamatan di Kalimantan Timur.

Program inseminasi buatan ini dilaksanakan oleh petugas-petugas yang telah terlatih dan terampil dalam melakukan proses inseminasi buatan. Dalam program ini, Dinas bekerja sama dengan para peternak untuk memfasilitasi proses inseminasi buatan bagi hewan ternak mereka. Inseminasi buatan memiliki manfaat yang cukup signifikan bagi peternakan, antara lain dapat meningkatkan produktivitas ternak, meningkatkan kualitas genetik ternak, serta dapat membantu mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh proses perkawinan secara alami.

i. Sebaran pelaksanaan Identifikasi ternak (Penandaan)



Gambar II-18. Peta Sebaran Penandaan Ternak

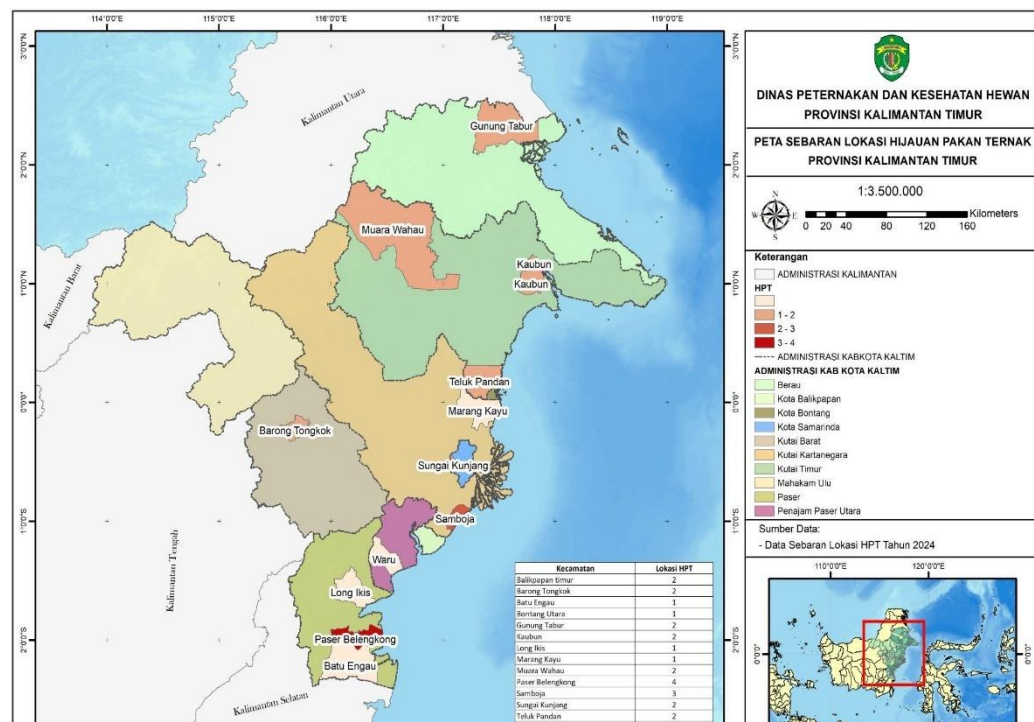
Penandaan hewan merupakan salah satu tugas dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat 41 wilayah kecamatan yang telah dilakukan penandaan pada tahun 2024 di 9 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Penandaan hewan dilakukan dengan memberikan tanda (*ear tag*) pada hewan yang menunjukkan status kesehatan hewan tersebut, seperti tanda vaksinasi, tanda hasil pemeriksaan kesehatan, identitas ternak dan identitas pemilik ternak. Penandaan hewan bertujuan untuk melindungi hewan, mencegah penyebaran penyakit hewan dan memudahkan pelacakan hewan jika terjadi masalah

kesehatan atau permasalahan hukum yang terkait hewan tersebut. penandaan hewan dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih dan terampil dalam melakukan tindakan tersebut, dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

j. Sebaran Hijauan pakan Ternak

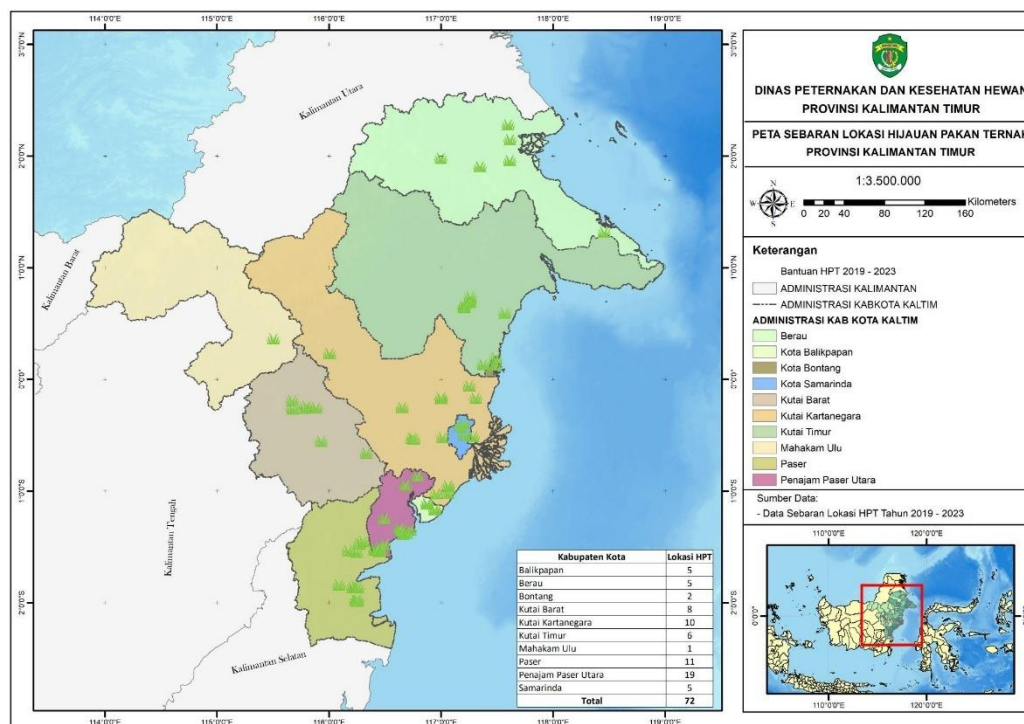
Sebaran lokasi Hijauan Pakan Ternak (HPT) di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, terdapat total 72 lokasi HPT yang tersebar di berbagai kabupaten/kota pada periode 2019–2023, dan 26 lokasi HPT yang terdata pada tahun 2024. Adapun jenis bantuan Hijauan Pakan Ternak (HPT) antara lain rumput odot, rumput gajah, rumput raja, rumput setaria, rumput *Brachiaria humidicola* (BH), rumput pakchong dan rumput gama umami.

Pada periode 2019–2023, penyebaran HPT paling banyak ditemukan di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan 19 lokasi, diikuti oleh Kabupaten Paser 11 lokasi dan Kutai Kartanegara 10 lokasi. Sementara kabupaten/kota lain seperti Berau, Kutai Timur, dan Balikpapan masing-masing mencatat 5–8 lokasi. Wilayah



Gambar II-19. Peta Sebaran Lokasi HPT 2024

dengan jumlah HPT paling sedikit adalah Mahakam Ulu, yaitu hanya 1 lokasi.



Gambar II-20. Peta Sebaran Lokasi HPT 2019-2023

Peta sebaran HPT tahun 2024 terdapat kecamatan dengan jumlah lokasi HPT terbanyak adalah Paser Belengkong sebanyak 4 lokasi dan Samboja, masing-masing dengan 3 lokasi.

k. Sumber Daya Manusia

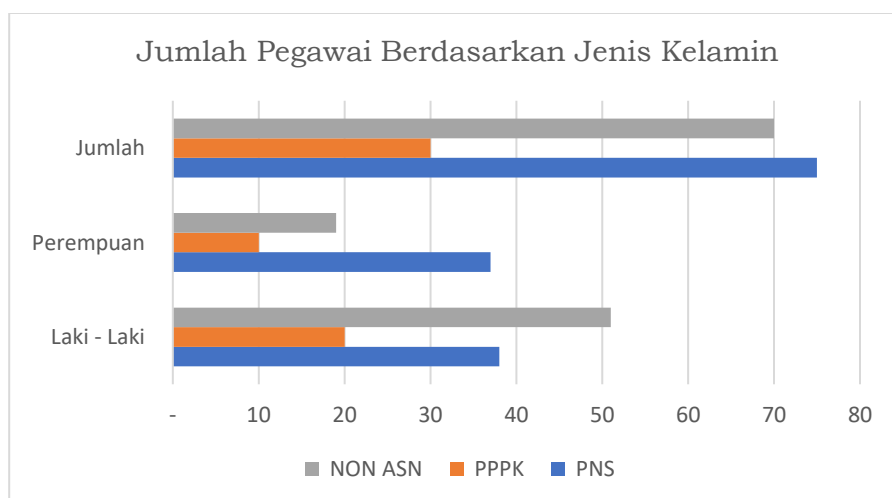
Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi elemen penting bagi suatu organisasi atau institusi. SDM dengan kinerja yang baik memiliki peran yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Keberhasilan ini dapat diraih bila sumber daya manusia dikelola dengan baik pula. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 175 orang terdiri dari 75 orang PNS, 30 orang PPPK, 70 orang Non ASN yang terdistribusi di lingkup Kantor Dinas dan UPTD.

Kondisi umum sumberdaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilihat dari aspek gender, aspek umur, aspek pendidikan dan jenis jabatan yang diampu adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II-1. Profil Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Kondisi Per 31 Desember 2024.

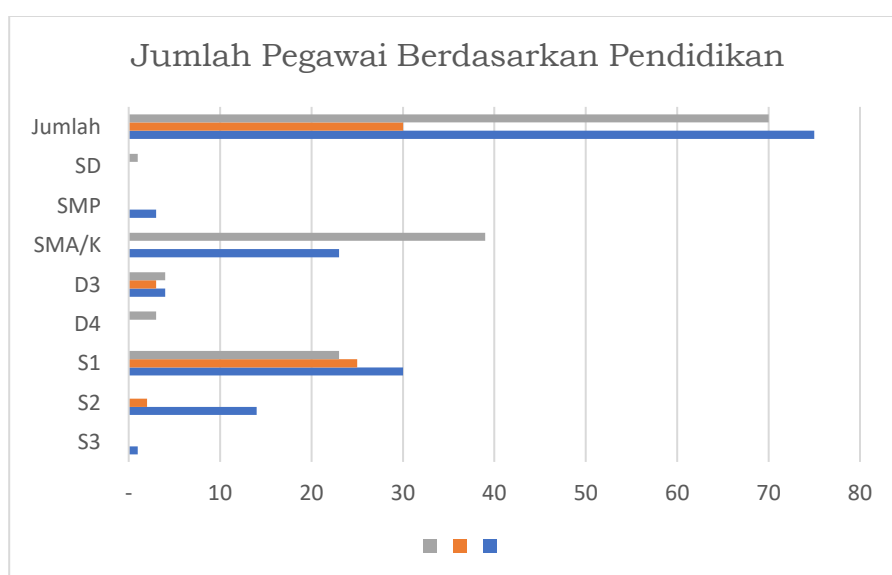
KLASIFIKASI	PNS	PPPK	NON ASN	JUMLAH
JENIS Kelamin				
Laki - Laki	38	20	51	109
Perempuan	37	10	19	66
Jumlah	75	30	70	
UMUR				
> 50	31	-	-	31
40 - 49	36	3	25	64
30 - 39	6	27	42	75
20 - 29	2	-	3	5
Jumlah	75	30	70	
PENDIDIKAN				
S3	1	-	-	1
S2	14	2	-	16
S1	30	25	23	78
D4	-	-	3	3
D3	4	3	4	11
SMA/K	23	-	39	62
SMP	3	-	-	3
SD	-	-	1	1
Jumlah	75	30	70	
JENIS JABATAN				
Struktural	15	-	-	15
Fungsional	18	21	-	39
Pelaksana	42	9	70	121
Jumlah	75	30	70	175
ESSELON				
II A	1	-	-	1
III A	5	-	-	5
III B	2	-	-	2
IV A	7	-	-	7
Jumlah	15	-	-	15
Golongan/Pangkat/Ruang PNS				
IV C	1	0	0	1
IV B	7	0	0	7
IV A	7	0	0	7
III D	19	0	0	19
III C	6	0	0	6
III B	7	0	0	7
III A	12	0	0	12
II D	8	0	0	8
II C	4	0	0	4
II B	4	0	0	4
Jumlah	75			75
Golongan PPPK				
X	0	10	0	10
IX	0	15	0	15
VIII	0	0	0	-
VII	0	3	0	3
VI	0	0	0	-
V	0	0	0	-
IV	0	0	0	-
III	0	2	0	2
Jumlah	0	30	0	30



Grafik II-1. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

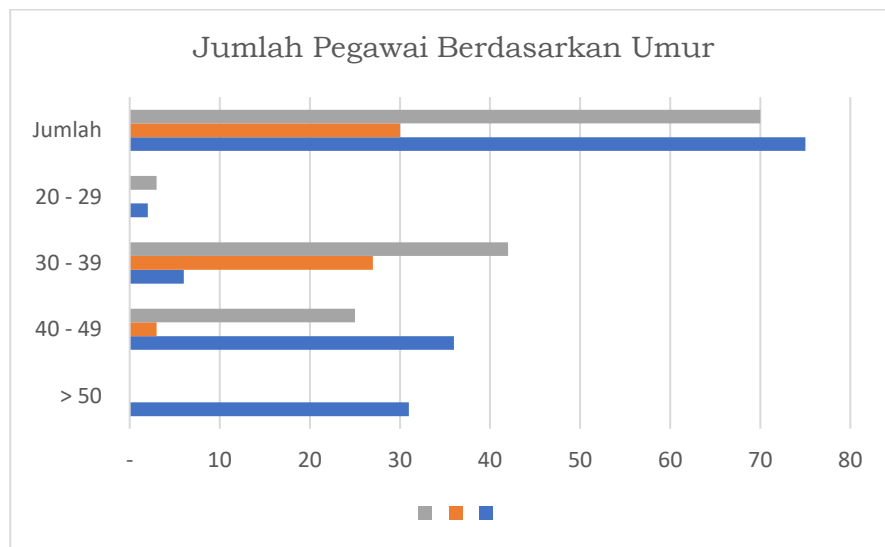
Komposisi pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis kelamin adalah Laki-laki 109 orang atau 62,29% dari total pegawai dan Perempuan 66 orang atau 37,715 dari total 175 orang pegawai yang berarti Proporsi pegawai laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan.

Mayoritas pegawai Laki-laki berada pada status Non-ASN sebanyak 51 orang atau 46,79% dari total laki-laki sedangkan mayoritas pegawai perempuan adalah PNS atau sebanyak 37 orang atau 56,06% dari total perempuan. Kesimpulan dari grafik tersebut adalah Struktur kepegawaian menunjukkan ketergantungan yang cukup besar pada tenaga Non ASN, terutama laki-laki, jika dilihat dari keberlanjutan sumber daya manusia, PNS dan PPPK perempuan lebih stabil, sedangkan untuk Non ASN laki-laki perlu diperhatikan karena sifat Non ASN biasanya kontraktual dan bisa berganti



Grafik II-2. Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan grafik di atas lebih dari 80% pegawai adalah lulusan minimal SMA/K ke atas, dengan dominasi lulusan S1. Pegawai Tetap (PNS/PPPK) sebagian besar berpendidikan tinggi (S1 dan S2). Non ASN sebagian besar berlatar belakang SMA/K, walaupun cukup banyak yang S1. Ada indikasi gap kompetensi antara pegawai ASN dan Non ASN, terutama di tingkat pendidikan formal. Kehadiran pegawai dengan pendidikan SD dan SMP sangat kecil (hanya 4 orang total), kemungkinan untuk tugas-tugas fungsional tertentu.



Grafik II-3. Pegawai berdasarkan Umur

Berdasarkan grafik di atas PNS didominasi pegawai senior (usia >40 tahun), PPPK dan Non ASN didominasi pegawai usia produktif (30–39 tahun), Regenerasi pegawai PNS sangat minim, terlihat dari sedikitnya pegawai muda (20–39 tahun) dan Non ASN menjadi tulang punggung untuk tenaga muda, terutama di usia 30–39 tahun. Berdasarkan data yang akan ada gelombang pensiun besar dalam 5–10 tahun ke depan dari kelompok PNS usia >50 tahun dan 40–49 tahun sehingga Perlu strategi regenerasi ASN, misalnya dengan rekrutmen CPNS baru atau mempermanenkan PPPK dan pembinaan dan pengembangan Non ASN juga penting, karena banyak dari mereka berada di usia produktif dan berpotensi.

1. Sumber Daya Aset atau Modal

Sumber Daya Aset atau Modal memiliki peran dalam mendukung Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, data Sarana dan Prasarana Dinas dan UPTD dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel II-2. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Induk Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Tanah Kantor	3,272	m2
2	Gedung Kantor	2	Unit (@2 Lantai)
3	Gedung Klinik Hewan	1	unit
4	Taman	1,113	m2
5	Listrik	3	Jaringan
6	Air	2	Jaringan
7	Telepon	3	Line (1 Fax)
8	Area Parkir	3	Area
9	Ruang Rapat	3	Ruang
10	Ruang Arsip	2	Ruang
11	Koperasi	-	Buah
12	Perpustakaan	1	Ruang
13	Ruang CS	-	Ruang
14	PC	63	Unit
15	Note book	31	unit
16	Laptop	60	Unit
17	AC	63	unit
18	Ruang Obat	1	Ruang
19	Ruang Persediaan/Laktasi	1	Ruang
20	Mobil Dinas Ess II + III	7	Unit
21	Mobil operasional	7	Unit
22	Motor Dinas	45	Unit
23	Kantin	1	Buah
24	Website	1	Buah
25	Papan Pengumuman	2	Buah
26	Mushola	1	Unit
27	Aplikasi	5	buah
28	Brankas	13	buah
29	Genset	1	unit
30	Printer – Printer Multifungsi	39	Buah
31	Kajian Walet	1	Buah

Tabel II-3. Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Tanah	686.4	M2
2	Gedung	1	Unit (2 Lantai)309 m ²
3	Klinik Hewan	0	Ruang
4	Taman	10	M2
5	Listrik	41,500	KVA
6	Air	1	Jaringan
7	Telepon	1	Line
8	Internet	2	Line
9	Area Parkir	1	Area
10	Ruang Rapat	1	Ruang
11	Ruang Pengujian Lab	7	Ruang
12	Ruang Kepala UPTD	1	Ruang
13	Ruang Staff	4	Ruang
14	Ruang Arsip	1	Ruang
15	Koperasi	0	Buah
16	Perpustakaan	0	Ruang
17	Ruang CS	1	Ruang
18	Komputer PC	6	Unit
19	Laptop	15	Unit
20	Ruang Media/ Reagen / Sampel	1	Ruang
21	Ruang Persediaan/Gudang	2	Ruang
22	Ruang Pengadaan	0	Ruang
23	Mobil Dinas	2	Unit
24	Mobil Dinas Operasional	1	Unit
25	Motor Dinas	4	Unit
26	Kantin	0	Buah
27	Website	1	Buah
28	Papan Pengumuman	1	Buah
29	LED Display/ Running Text	1	Buah
30	Papan iklan/ Baleho	1	Buah
31	Mushola	1	Unit
32	File Arsip	2	Buah
33	Printer	10	Buah
34	Scanner	2	Buah

Tabel II-4. Sarana dan Prasarana UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan
Pakan Ternak

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Tractor lainnya	1	Unit
2	Mesin Proses lainnya	1	Unit
3	Portable Generating Set	1	Unit
4	Pompa Air	12	Unit
5	PC Unit	21	Unit
6	Laptop	14	Unit
7	Notebook	2	Unit
8	CPU (Peralatan mainframe)	1	Unit
9	Hard disc	1	Unit
10	Monitor	1	Unit
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	35	Buah
12	Alat Bantu Produksi lainnya	1	Unit
13	Sport Utility Vehicle (SUV)	1	Unit
14	Truck + attachment	1	Unit
15	Pickup	1	Unit
16	Sepeda Motor	9	Unit
17	Mesin Kompresor	1	Buah
18	Neraca Halus + Lemari Kapasitas 500 gram	1	Buah
19	Neraca Dengan Digital Display	1	Buah
20	Alat Timbangan/Biara lainnya	2	Buah
21	Traktor Four Wheel (Dengan Kelengkapannya)	1	Unit
22	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Lainnya	1	Unit
23	Alat Panen Lainnya	1	Unit
24	Oven	2	Unit
25	Alat Laboratorium Lainnya	4	Unit
26	Alat Processing Lainnya	3	Unit
27	Alat Pencacah Hijauan	2	Unit

No	Uraian	Volume	Satuan
28	Stick Pengukur Sapi	1	Unit
29	Container	1	Unit
30	Alat-Alat Peternakan Lainnya	3	Unit
31	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Buah
32	Lemari Besi/Metal	6	Buah
33	Lemari Kayu	22	Buah
34	Rak Kayu	5	Buah
35	Filling Cabinet Besi	3	Buah
36	Brandcash	2	Buah
37	Lemari Kaca	6	Buah
38	CCTV - Camera Control Television System	8	Unit
39	White Board	1	Buah
40	LCD Projector	1	Buah
41	Papan Tulis	1	Buah
42	Alat Kantor Lainnya	2	Buah
43	Meja Kerja Kayu	50	Buah
44	Kursi Besi/Metal	28	Buah
45	Kursi Kayu	17	Buah
46	Meja Rapat	20	Buah
47	Tempat Tidur Besi	2	Buah
48	Tempat Tidur Kayu	35	Buah
49	Meja Resepsionis	1	Buah
50	Meja Bundar	1	Buah
51	Meja Makan Besi	7	Buah
52	Kursi Rapat	40	Buah
53	Kursi Tamu	6	Buah
54	Kursi Putar	4	Buah
55	Kursi Biasa	26	Buah
56	Meja Komputer	2	Buah
57	Meubelair Lainnya	1	Buah
58	Jam Elektronik	2	Buah

No	Uraian	Volume	Satuan
59	Mesin Pemotong Rumput	26	Unit
60	Mesin Cuci	1	Unit
61	Alat Pembersih Lainnya	2	Unit
62	Lemari Es	7	Unit
63	A.C Window	19	Unit
64	A.C Split	17	Unit
65	Kipas Angin	17	Buah
66	Kompas Gas (Alat Dapur)	3	Buah
67	Televisi	8	Buah
68	Amplifier	1	Buah
69	Sound System	1	Buah
70	Wireless	1	Buah
71	Mic Conference	17	Buah
72	Camera Video	1	Buah
73	Camera Film	1	Buah
74	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah
75	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Buah
76	Water Filter	1	Buah
77	Tangga Aluminium	2	Buah
78	Dispenser	4	Buah
79	Mimbar/Podium	1	Buah
80	Handy Cam	1	Buah
81	Alat Pemanas Ruangan	1	Buah
82	Home Theater	1	Buah
83	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Buah
84	Alat Pembantu Kebakaran	2	Buah
85	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	1	Buah
86	Meja Kerja	21	Buah
87	Kursi Kerja	5	Buah
88	Power Supply Microphone	2	Buah
89	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	Buah
90	Video Tape Recorder Stationer	1	Buah

No	Uraian	Volume	Satuan
91	Layar Film/Projector	2	Buah
92	Camera Digital	4	Buah
93	Camera Conference	1	Buah
94	Handy Talky (HT)	1	Buah
95	Facsimile	1	Buah
96	Unit Transceiver HF Transportable	1	Buah
97	Finger Printer Time and Attendance Access Control System	1	Buah
98	Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	2	Unit
99	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit
100	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	1	Unit
101	Microscope	1	Unit
102	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit
103	Timbangan/Neraca	2	Unit
104	Refrigerator	1	Unit
105	Alat laboratorium umum lainnya (dst)	1	Unit
106	Aquadestilator	1	Unit
107	Magnetic Stirer (Alat Laboratorium Patologi)	1	Unit
108	Alat laboratorium patologi lainnya (dst)	1	Unit
109	Mesin Printing	1	Unit
110	Cervix Dilatator	6	Unit
111	Container N2 Cair (Alat Laboratorium Pertanian)	2	Unit
112	Disk Mill	1	Unit
113	Neraca Analitis Kalibrator	1	Unit
114	Alat Laboratorium Lainnya	17	Unit
115	Generator Set	2	Unit
116	Mikroskop	1	Unit
117	Tanah	504.607,00	m2

No	Uraian	Volume	Satuan
118	Gedung Kantor Permanen	100	m2
119	Gedung Tertutup Permanen	36	m2
120	Bengkel/Hanggar Darurat	12	m2
121	Gedung Laboratorium Permanen	162,50	m2
122	Rumah Sakit Hewan	24,00	m2
123	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	80,00	m2
124	Gedung Pendidikan Permanen	120,00	m2
125	Gedung Pertemuan Lain-lain	30,00	m2
126	Gedung Pos Jaga Permanen	12,00	m2
127	Bangunan Untuk Kandang	1.317,00	m2
128	Rumah Negara Golongan (II dan III) Tipe A Permanen	127,00	m2
129	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	519,17	m2
130	Flat/Rumah Lain-lain	30	m2
131	Bangunan Peternakan/Perikanan (Kandang Infasi)	138	m2
132	Taman	18	m2
133	Papan nama	4	Unit
134	Alat Berat (Excavator)	1	Unit
135	Tangki Air Gandeng	2	Unit
136	Smart TV	1	Unit
137	A.C Sanding	1	Unit
138	scanner	3	Unit

2.1.3 Kondisi umum dan Kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Kondisi umum Peternakan dan Kesehatan hewan

Secara umum subsektor peternakan mengalami perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya baik jumlah populasi ternak, produksi daging, produksi telur dan aneka ternak.

Tabel II-5. Perkembangan Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 (ekor)

No	Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024*	r(%)
1	Sapi	119.974	121.290	108.613	57.757	62.678	-14,98
2	Sapi Perah	87	76	68	12	69	-5,63
3	Kerbau	6.552	6.539	6.490	1.325	4.254	-10,24
4	Kambing	69.929	68.997	58.552	26.978	44.308	-10,78
5	Domba	635	694	642	611	935	10,16
6	Babi	83.652	76.292	45.839	18.957	27.973	-23,96
7	Kuda	95	143	95	24	94	-0,26
8	Ayam Buras	4.435.205	4.815.976	5.183.873	686.916	2.569.524	-12,76
9	Ayam Petelur	1.218.994	1.223.739	1.340.217	1.282.503	1.295.328	1,53
10	Ayam Pedaging	59.402.832	60.804.149	61.412.191	54.860.076	55.408.677	-1,73
11	Itik	254.749	261.263	269.564	47.290	155.377	-11,63
12	Kelinci	10.830	9.462	7.931	857	1.006	-155,21
13	Puyuh	79.222	94.339	88.143	19.518	16.161	-32,79
14	Merpati	5.015	5.375	5.678	5.735	5.792	3,67
15	Itik Manila	52.823	64.178	67.608	45.791	21.090	-20,51

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur (2024)

Berdasarkan jenisnya, ternak dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing, domba dan babi), ternak unggas (ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, itik dan itik manila) serta aneka ternak (kelinci, puyuh dan merpati).

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan populasi ternak besar sejak Tahun 2020-2024 untuk sapi sebesar -14,98%, dan Kerbau -10,24%. Rata-rata pertumbuhan populasi ternak kecil Tahun 2020-2024 untuk kambing sebesar -10,78%, domba 10,16%, dan babi -23,96%. Untuk ternak unggas rata-rata pertumbuhan populasi paling tinggi ada pada Ayam Petelur sebesar 1,53%.

Pertumbuhan dan perkembangan populasi juga diikuti pertumbuhan/perkembangan Rumah Tangga Usaha Peternak (RTUP) pada masing-masing komoditas ternak. Sumber Daya manusia peternakan (Peternak) yang mengusahakan peternakan juga mengalami pasang surut baik pada beberapa komoditas (Rumah Tangga Usaha Peternak), tergambar pada tabel berikut:

Tabel II-6. Rumah Tangga Usaha Peternakan (RTUP) pada Sensus Tani 2013 dan Sensus Tani 2023

No	Komoditas	RTUP		2013 to 2023
		ST2013	ST2023	Growth (%)
1	Sapi Potong	19.777	11.412	-42,30
2	Sapi Perah	2	2	0,00
3	Kerbau	753	188	-75,03
4	Kuda	3	5	66,67
5	Kambing	4.438	3.129	-29,50
6	Domba	13	65	400,00
7	Babi	4.477	3.119	-30,33
8	Ayam Buras	35.391	23.394	-33,90
9	Ayam Petelur	79	264	234,18
10	Ayam Pedaging	1.105	660	-40,27
11	Itik	7.142	1.269	-82,23
12	Itik Manila	3.384	2.780	-17,85
TOTAL		57.437	57.195	-0,42

Sumber: Sensus Pertanian, BPS (2023)

Sumber daya manusia (SDM) kelompok peternak memiliki peran yang penting dalam pembangunan peternakan, SDM kelompok peternak merupakan salah satu aset kunci yang harus diperhatikan. Investasi dalam pengembangan SDM kelompok peternak dapat membawa dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan dan keberhasilan peternakan secara keseluruhan.

Tabel II-7. Kelompok Peternak Berdasarkan Komoditas Tahun 2024 (kelompok)

No.	Kab/Kota	Komoditas						Jumlah Kelompok
		Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Ayam	Itik	
1.	Balikpapan	17	0	0	0	0	1	18
2.	Berau	104	0	2	0	0	1	107
3.	Bontang	11	1	0	1	0	0	13
4.	Kubar	85	0	2	3	10	4	104
5.	Kukar	646	5	23	4	15	12	705
6.	Kutim	242	0	10	0	5	1	258
7.	Mahulu	13	0	1	4	2	0	20
8.	Paser	318	0	5	0	4	5	332
9.	PPU	204	0	5	0	12	1	222
10.	Samarinda	113	0	6	0	3	0	122
TOTAL		1.753	6	54	12	51	25	1.901

Sumber: Laporan Bidang Kawasan dan Agribisnis (2024)

Distribusi kelompok berdasarkan Komoditas Sapi mendominasi dengan total 1.753 kelompok, menunjukkan fokus utama peternakan di wilayah ini. Komoditas Kerbau memiliki jumlah kelompok terendah (6), mengindikasikan komoditas ini

kurang populer atau kurang sesuai dengan kondisi wilayah. Komoditas lain seperti Kambing (54), Babi (12), Ayam (51), dan Itik (25) memiliki jumlah kelompok yang signifikan tetapi jauh di bawah komoditas sapi.

Distribusi kelompok berdasarkan Wilayah Kukar memiliki jumlah kelompok peternak terbanyak (705), terutama dari komoditas sapi (646). Balikpapan dan Bontang memiliki jumlah kelompok relatif kecil (18 dan 13), hal ini faktor keterbatasan lahan peruntukan peternakan. Berau, Kubar, Kutim, Paser, PPU, dan Samarinda menunjukkan variasi komoditas dengan sapi tetap dominan. Total seluruh kelompok peternak adalah 1.901, dengan kontribusi terbesar dari sapi (92,2% dari total komoditas).

Tabel II-8. Data Pemotongan Ternak Tahun 2019-2024 (ekor)

No	Jenis Ternak	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	S a p i	51.426	52.857	46.316	49.607	41.510	42.020
2	Sapi Perah	10	2	14	2	-	-
3	Kerbau	387	301	327	433	548	575
4	Kuda	-	2	2	2	90	91
5	Kambing	45.906	45.155	59.881	63.876	60.528	60.642
6	Domba	160	388	373	170	404	419
7	Babi	29.562	30.003	37.741	32.700	21.776	23.269
8	Ayam Buras	6.558.623	6.652.808	6.742.366	7.257.422	961.682	3.597.332
9	Ayam Petelur	426.847	609.497	734.243	804.130	769.502	777.197
10	Ayam Pedaging	61.097.909	53.462.549	54.723.734	55.270.972	49.934.555	50.433.901
11	Itik	127.342	127.377	130.632	134.782	23.648	77.691
12	Kelinci	6.644	8.123	7.097	5.948	644	756
13	Puyuh	59.227	71.300	84.905	79.329	17.566	14.545
14	Merpati	5.970	6.269	6.719	7.098	7.239	7.384
15	Itik Manila	25.734	31.694	38.507	40.565	27.473	12.654

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024)

Dominasi pemotongan ternak pada komoditas Ayam Pedaging, Masih menjadi komoditas teratas (50,4 juta ekor), meski turun 11% sejak 2019. Penurunan ini mungkin dipengaruhi beberapa hal yaitu harga pakan, wabah penyakit, maupun situasi harga jual (*supply demand*). Ayam Buras sangat fluktuatif dikarenakan kondisi ketersediaan populasi ayam buras sangat tidak stabil, dapat diakibatkan wabah AI (Avian Influenza) dan sistem pemeliharaan.

Pemotongan Komoditas Sapi stabil di 42.020 ekor (2024), tapi turun 18% sejak 2019. Penurunan stok, pemotongan Kerbau naik 48,5% (575 ekor) sejak 2019, menunjukkan pemanfaatan untuk alternatif daging.

Komoditas Krisis, Itik dan Puyuh turun drastis pada Tahun 2023-2024 (itik berturut 77.691 dan 134.782 di Tahun 2022), diakibatkan wabah dan biaya produksi melonjak. Babi turun 21,3% (23.269 ekor) sejak 2019, didorong adanya wabah ASF (*African Swine Fever*). Anomali 2023-2024, Ayam Buras dan Itik mengalami penurunan ekstrem di 2023, lalu sedikit naik pada Tahun 2024, Indikasi pemulihan pasca-wabah.

Tabel II-9. Pemotongan Ternak Provinsi Kalimantan Timur dari Kab/Kota Tahun 2024 (ekor)

No	Kab/Kota	Jenis Ternak					Jumlah
		Sapi Jantan	Sapi Betina Produktif	Sapi Betina Tidak Produktif	Kerbau Jantan	Kerbau Betina Tidak Produktif	
1	Balikpapan	2.693	0	388	92	0	3.173
2	Berau	1.549	0	11	0	0	1.560
3	Bontang	1.890	0	1	0	0	1.891
4	Kutai Barat Kutai	1.035	0	0	4	0	1.039
5	Kartanegara	439	0	0	0	0	439
6	Kutai Timur	740	0	0	0	0	740
7	Paser Penajam Paser	825	0	0	0	0	825
8	Utara	910	0	2	0	0	912
9	Samarinda	5.088	7	82	13	15	5.205
10	Mahakam Ulu	4	0	0	0	0	4
JUMLAH		15.173	7	484	109	15	15.788

Sumber: Data fungsi DPKH, 2024

Pemotongan ternak Sapi jantan menyumbang 96,1% dari total pemotongan (15.173 dari 15.788 ekor), masih terdapat pemotongan Sapi betina tidak produktif sebanyak 388 ekor di Balikpapan dan 11 ekor di Berau menunjukkan masih banyak sapi betina yang tidak produktif yang perlu mendapat perhatian, sedangkan sapi betina produktif sebanyak 7 ekor (di Samarinda), mengindikasikan perlindungan terhadap betina produktif perlu mendapatkan perhatian untuk menjaga populasi ternak.

Samarinda menjadi pusat pemotongan tertinggi (5.205 ekor), didominasi sapi jantan (5.088 ekor). Mahakam Ulu memiliki angka

terendah (4 ekor), hal ini menunjukkan konsumsi daging terbesar di Samarinda.

Komoditas Minor Kerbau hanya dipotong 109 ekor (jantan) dan 15 ekor (betina tidak produktif), menegaskan rendahnya kontribusi kerbau dalam rantai pasok daging.

Tabel II-10. Pemasukan Daging Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 (ton)

No	Jenis Ternak	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Sapi	4.725,52	2.761,94	2.973,94	2.643,77	4.584,46	4.226,46
2	Kerbau	1.596,59	2.336,21	3.286,84	3.243,39	3.935,38	4.137,88
3	Kambing	104,84	246,99	109,56	145,73	40,16	256,50
4	Domba	8,86	31,27	10,23	11,77	112,97	117,71
5	Ayam Buras	-	-	-	-	-	-
6	Ayam Pedaging	9.226,84	7.856,15	11.947,43	13.316,53	20.563,45	26.284,34
7	Itik	399,48	545,03	13,00	1.012,51	617,92	887,76
Jumlah		16.062,12	13.777,59	18.341,00	20.373,70	29.854,34	35.910,66

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024)

Pemasukan Daging menunjukkan peningkatan Volume yang signifikan dari 16.062,12 ton (2019) menjadi 35.910,66 ton (2024*), dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 17,5%. Lonjakan tertinggi terjadi pada 2023-2024 (+20,3%), didorong oleh permintaan pasar, pergeseran minat ke produk *Frozen*. Dominasi pemasukan daging Ayam Pedaging meningkat dari 57,4% (2019) menjadi 73,2% (2024) dari total pemasukan, dengan puncak 26.284,34 ton (2024). Tren ini mencerminkan pergeseran konsumsi ke protein unggas yang lebih terjangkau (murah) dan berproduksi cepat. Volatilitas daging Sapi yang Fluktuatif dengan titik terendah 2.643,77 ton (2022) dan pemulihan di 2023-2024 (4.226,46 ton). Penurunan 2020-2022 mungkin terkait pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasok maupun permintaan. Pemasukan Daging Kerbau: meningkat konsisten (+161% sejak 2019), mencapai 4.137,88 ton (2024), menunjukkan potensi sebagai alternatif daging ruminansia dan menjadi substitusi kebutuhan daging sapi.

Anomali daging Kambing/Domba menunjukkan Volatilitas tinggi (kambing 256,50 ton di 2024 dan 40,16 ton di 2023), diduga akibat fluktuasi harga atau perubahan preferensi konsumen. Daging Itik meningkat di 2024 (887,76 ton) setelah penurunan drastis di 2021 (13,00 ton), mengindikasikan kerentanan terhadap *supply* lokal

maupun situasi usaha kuliner yang menggunakan daging kambing/domba dan itik.

Tabel II-11. Perkembangan Harga Komoditas Ternak dan Produk Tahun 2019-2024

Komoditas	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Tingkat Produsen							
Sapi Hidup	Kg/BH	46.286	46.461	48.468	59.357	58.400	62.473
Ayam Pedaging Hidup	Kg/BH	46.286	23.015	24.317	25.801	26.895	26.295
Telur Ayam Ras	Kg	23.801	23.617	23.561	27.297	28.270	28.266
Tingkat Konsumen							
Daging Sapi	Kg	135.342	132.393	133.434	154.515	159.696	158.983
Daging Ayam Pedaging	Kg	38.353	41.102	40.380	41.866	41.513	39.878
Telur Ayam Ras	Kg	22.714	28.399	27.811	31.597	32.719	32.027

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024)

Tren Harga Tingkat Produsen untuk Sapi Hidup, Kenaikan harga signifikan dari Rp46.286/kg (2019) menjadi Rp62.473/kg (2024*), dengan puncak di 2022 (Rp59.357/kg), Faktor Pendorong situasi tersebut adalah Keterbatasan pasokan, peningkatan biaya pakan, dan permintaan stabil. Ayam Pedaging Hidup, menunjukkan Fluktuasi dengan tren meningkat dari Rp23.015/kg (2020) ke Rp26.295/kg (2024*), harga tertinggi Tahun 2019 (Rp46.286/kg), Penyebab Volatilitas pasar akibat wabah unggas dan *oversupply*. Telur Ayam Ras (Produsen) Kenaikan stabil dari Rp23.801/kg (2019) ke Rp28.266/kg (2024*), dengan lonjakan di 2022 (Rp27.297/kg). Ha ini merupakan Implikasi Kenaikan biaya produksi (pakan, energi) diteruskan ke harga.

Tren Harga Tingkat Konsumen Daging Sapi, Meningkat dari Rp135.342/kg (2019) ke Rp158.983/kg (2024*), dengan kenaikan tertinggi di 2022 (Rp154.515/kg), Gap Produsen-Konsumen diakibatkan pengambilan Margin tinggi menunjukkan biaya distribusi dan *markup* ritel. Daging Ayam Pedaging, Relatif stabil (Rp38.353–41.866/kg), dengan penurunan 2024 (Rp39.878/kg), Efisiensi Rantai Pasok sehingga Harga terkendali karena produksi massal dan kompetisi pasar. Telur Ayam Ras (pada tingkat Konsumen) mengalami Kenaikan konsisten dari Rp22.714/kg (2019) ke Rp32.027/kg (2024*), mencerminkan inflasi dan permintaan elastis.

Inflasi pada komoditas Sapi dan Ayam, Harga sapi naik 35,1% (2019–2024), sementara ayam pedaging turun 13,9%, menunjukkan perbedaan dinamika pasar. Stabilitas Harga Ayam ini Didukung produksi efisien, berbeda dengan ruminansia yang bergantung pada pasokan dan biaya tinggi. Sedangkan Kesenjangan Harga cenderung diakibatkan Margin tinggi daging sapi (produsen–konsumen) mengindikasikan inefisiensi distribusi.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa harga semua komoditas mengalami peningkatan sekaligus penurunan secara bersamaan hal ini karena bervariasinya permintaan akan komoditas ternak di Kalimantan Timur setiap Tahunnya. Harga komoditas peternakan seperti daging, susu, dan telur, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan pasar, suplai produksi, biaya produksi, persaingan industri, serta faktor-faktor. Peningkatan harga pakan juga dapat mempengaruhi harga komoditas peternakan, karena pakan merupakan biaya terbesar dalam produksi ternak. Jika harga pakan naik, maka biaya produksi juga akan naik dan hal ini dapat mempengaruhi harga jual produk sehingga harga komoditas peternakan sangat dinamis dan terus berubah seiring dengan perubahan di pasar.

Pada ternak ruminansia besar, masih mengandalkan usaha peternakan rakyat yang belum mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat dan pengelolaan pakan belum diusahakan dengan baik. Terbatasnya infrastruktur terkait pengawasan lalu lintas ternak perlu ditingkatkan untuk mengendalikan penyebaran penyakit hewan dan agar dapat menghasilkan kualitas serta keamanan produk yang terjamin. Sedangkan dari sisi konsumsi, terjadi kesenjangan ketersediaan dan permintaan, khususnya pada daging sapi sehingga harus dipenuhi dari luar Kalimantan Timur. Kapasitas produksi ayam ras masih mampu ditingkatkan lagi untuk memenuhi pasar luar Kalimantan Timur dengan penambahan sarana Rumah Potong Unggas (RPU).

Pemasukan ternak dari luar daerah berfungsi untuk menutupi kesenjangan ketersediaan pada beberapa komoditas ternak yang mengalami kekurangan. Pemasukan ternak dari luar daerah selain berdampak untuk pemenuhan kebutuhan, juga

berdampak terhadap keseimbangan harga komoditas antar daerah. Pemasukan ternak dari luar daerah dilakukan dengan tetap melakukan pengawasan terhadap resiko masuknya penyakit, berikut data pemasukan ternak dari luar daerah ke dalam Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II-12. Pemasukan dan pengeluaran Ternak dari Provinsi Kalimantan Selatan 2023-2024 (ekor) melalui chekpoint

No.	Komoditas	Pemasukan		Pengeluaran	
		2023	2024	2023	2024
1	Ayam Pedaging	6,018,154	4,269,375	500	29,460
2	Layer Afkir	-	86,890	-	4,640
3	GPS/PS Afkir	-	188,327	-	18,005
4	Layer	146,910	40,777	-	-
5	Buras	108,342	110,067	800	-
6	DOC	550	1,406,813	-	15,1093
7	DOD	550	2,200	-	-
8	Entok	-	18,228	-	-
9	Sapi	-	164	1,730	1,834
10	Kerbau	-	22	9	66
11	Kambing	-	1,468	-	53
12	Domba	-	-	2	-
13	Kuda	-	2	-	-
14	Karkas (Kg)	-	82,120	-	-
15	Telur Tetras (butir)	-	85,200	-	695,820
16	Babi	-	-	-	1,530
FREKUENSI		5,680	4,917	237	370

Sumber: Data Checkpoint, 2024

Tren Utama dan Temuan Kritis yaitu terjadi Perubahan Signifikan pada Unggas Komersial Ayam Pedaging dengan Penurunan pemasukan signifikan 29.1% (6.02 juta ke 4.27 juta ekor), namun pengeluaran naik 5,792% (500 ke 29,460 ekor), Indikasinya adalah Peningkatan ekspor/distribusi antar wilayah (ke Kalsel), atau Penyesuaian stok akibat wabah atau fluktuasi dan harga pasar. Pemasukan Komoditas DOC (Day Old Chicken) mengalami Peningkatan ekstrem 255,684% (550 ke 1.41 juta ekor), menunjukkan bahwa terjadi Ekspansi usaha pembibitan unggas, Permintaan tinggi untuk produksi daging ayam, atau strategi para peternak untuk keseimbangan harga DOC, atau terjadi peningkatan pengawasan pada lalu lintas di *chek poin* akibat peningkatan kinerja tim chek poin. Pada komoditas Sapi terjadi Pemasukan 164 ekor (2024) dengan pengeluaran stabil (~1,800 ekor). Implikasi pengeluaran rutin dan stabil ini menunjukkan bahwa terjadi sistem

bisnis (transaksi) yang rutin. Pada Komoditas Kambing menunjukkan Pemasukan 1,468 ekor (2024) dengan pengeluaran minimal (53 ekor), mencerminkan kambing memiliki Potensi pengembangan sebagai komoditas alternatif.

Fenomena Spesifik yang terjadi pada Tahun 2024, terdapat komoditas baru yang dapat diidentifikasi dari lalulintas ternak antar Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yaitu Entok/itik manila dengan Pemasukan 18,228 ekor (tidak ada di 2023), Komoditas Babi terjadi Pengeluaran 1,530 ekor (2024). Karkas/daging frozen ayam tercatat pemasukan 82,120 kg (2024), Telur Tetas terjadi Pemasukan 85,200 butir dan pengeluaran 695,820 butir (2024).

Pemasukan ternak dari luar daerah secara keseluruhan melalui jalur udara/jalur laut melalui pos karantina hewan pada masing komoditas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-13. Pemasukan Ternak Berdasarkan Komoditas Tahun 2019-2024 (ekor)

No.	Jenis Ternak	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	S a p i	39.573	49.101	50.611	43.871	47.201	39.059
2	Sapi Perah	-	-	-	-	-	-
3	Kerbau	378	-	-	9	12	3
4	Kuda	-	-	-	57	80	54
5	Kambing	53.661	32.481	62.761	32.657	28.186	33.525
6	Domba	139	355	-	-	-	8
7	Babi	2.609	6.254	-	-	1.698	3.088
8	Ayam Buras	980.112	226.778	96.507	237.500	101.900	156.168
9	DOC Ayam Petelur	597.180	788.522	487.800	512.900	371.100	587.200
10	DOC Ayam Pedaging	1.735.309	1.186.639	965.178	1.158.800	968.620	1.126.490
11	I t i k	98.456	12.262	6.509	25.946	67.622	14.600
12	Kelinci	377	-	-	-	-	32
13	Puyuh	50.600	79.915	44.000	32.400	14.200	1.200
14	Merpati	287	-	-	-	-	-
15	Itik Manila	5.498	-	-	-	-	-

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024)

Tren Utama penurunan Signifikan pada Ruminansia Besar komoditas Sapi menunjukkan Penurunan 21.4% dari puncak pemasukan 50.611 ekor (2021) ke 39.059 ekor (2024*) pemasukan sapi di dominasi oleh sapi potong/sapi bakalan (jantan) dengan tujuan untuk dipotong. Kondisi ini dapat bermakna bahwa sapi

potong yang masuk dengan tujuan untuk di potong dan dikonsumsi dagingnya menurun, pada sisi lain konsumsi daging di masyarakat meningkat, menunjukkan adanya pergeseran minat konsumen terhadap daging sapi *frozen* signifikan meningkat.

Volatilitas pada Unggas Komersial DOC Ayam Pedaging peningkatan pemasukan 1.126.490 ekor (2024) setelah penurunan 2021-2023, mencerminkan bahwa terjadi dinamika dan resiliensi terhadap usaha perunggasan, produksi DOC di Kalimantan Timur sebenarnya mencukupi, namun konsumen/peternak *minded* dengan merek tertentu ataupun sudah mengikat kerjasama dengan pabrik DOC tertentu.

Perubahan Pola pada Ternak Kecil komoditas Kambing mengalami stagnasi di kisaran 28.186-33.525 ekor (2021-2024), menunjukkan permintaan pasar yang stabil dan Keterbatasan inovasi budidaya secara internal. Komoditas Babi kembali adanya pemasukan (3.088 ekor di 2024) setelah kejadian ASF pada 2021-2022 pemenuhan secara lokal belum mencukupi akibat adanya penyakit ASF yang belum juga tuntas secara internal di Kalimantan Timur.

Tabel II-14. Pemasukan Telur ke Kalimantan Timur (ton)

No	Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Ayam Buras	-	-	-	-	-
2	Ayam Petelur	11.380,14	13.902,24	12.424,91	18.605,22	26.585,45
3	Itik	8,60	-	2,43	247,97	248,21
4	Puyuh	2,50	-	-	-	-
Jumlah		11.391,24	13.902,24	12.427,34	18.853,19	26.833,66

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024)

Peningkatan pemasukan 118% dari 12.203 ton (2019) menjadi 26.585 ton (2024*), menunjukkan ekspansi signifikan industri petelur di luar daerah terutama dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, lonjakan terbesar terjadi pada 2023-2024 yaitu mencapai +43%, mencerminkan permintaan pasar yang kuat namun produksi lokal belum dapat memenuhi peningkatan permintaan.

Tabel II-15. Konsumsi Daging berdasarkan kabupaten/kota (ton)

No.	Kab / Kota	2020	2021	2022	2023	2024*
1	P a s e r	4,777.91	4,919.26	5,422.53	2,101.82	2,131.20
2	Kutai Barat	3,262.55	3,585.67	3,420.19	3,057.03	3,108.88
3	Kutai Kartanegara	14,135.39	14,721.74	15,004.56	6,092.57	6,577.78
4	Kutai Timur	4,278.18	5,231.27	5,354.67	4,509.95	5,271.63
5	B e r a u	2,966.67	2,813.93	3,004.66	11,382.19	11,485.77
6	Penajam Paser Utara	2,736.70	2,646.66	2,719.17	1,828.99	2,536.19
7	Mahakam Ulu	295.96	279.75	194.49	56.32	77.63
8	Balikpapan	22,956.21	26,533.69	26,644.18	34,614.19	42,756.17
9	Samarinda	21,501.67	22,682.07	24,534.18	32,599.22	31,185.91
10	Bontang	5,114.52	4,277.96	4,653.96	4,768.98	4,763.30
Jumlah		82,025.75	87,692.00	90,952.59	101,011.26	109,894.46

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024)

Konsumsi Daging Kalimantan Timur nampak adanya peningkatan total konsumsi sebesar 34% dari 82.026 ton menjadi 109.894 ton pada 5 Tahun terakhir, dengan peningkatan konsumsi tahunan rata-rata 7,6% (melebihi pertumbuhan populasi ternak penghasil daging). Polarisasi Spasial terjadi di Balikpapan dan Samarinda yang menyumbang angka konsumsi sebesar 67,3% total pada Tahun 2024, dan terjadi Disparitas ekstrim Balikpapan sebesar 42.756 ton dengan Mahakam Ulu sebesar 77,63 ton. Indikasinya terjadi perubahan pola distribusi/logistik regional dari daerah surplus ke daerah terpencil dan adanya perbedaan pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan. Resiliensi Pasca-Pandemi COVID ditunjukkan adanya pemulihan konsumsi di semua wilayah pada Tahun 2021-2022 dengan akselerasi peningkatan konsumsi daging di Balikpapan mencapai +86% sejak Tahun 2020.

Tabel II-16. Produksi Daging berdasarkan Kabupaten/Kota

No.	Kab / Kota	2020	2021	2022	2023	2024*
1	P a s e r	5,030.30	5,178.58	5,708.49	2,212.95	2,243.89
2	Kutai Barat	3,434.26	3,774.55	3,600.20	3,217.92	3,272.50
3	Kutai Kartanegara	14,879.36	15,496.57	15,794.28	6,413.23	6,923.98
4	Kutai Timur	4,503.35	5,506.10	5,635.78	4,747.31	5,549.09
5	B e r a u	3,122.75	2,962.52	3,163.51	11,981.25	12,079.07
6	Penajam Paser Utara	2,880.74	2,785.96	2,862.29	1,925.25	2,669.68
7	Mahakam Ulu	309.12	292.61	204.07	58.69	81.09
8	Balikpapan	13,982.23	14,039.89	13,956.10	17,117.99	17,026.34
9	Samarinda	18,312.17	18,458.98	18,455.56	23,214.80	24,413.03
10	Bontang	5,383.71	4,503.11	4,898.90	5,014.52	5,008.39
Jumlah		71,837.98	72,998.87	74,279.18	75,903.93	79,267.06

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024)

Tabel II-17. Surplus/Defisit Daging berdasarkan Kabupaten/kota

No.	Kab / Kota	2020	2021	2022	2023	2024*
1	P a s e r	5.282%	5.271%	5.274%	5.287%	5.288%
2	Kutai Barat	5.263%	5.268%	5.263%	5.263%	5.263%
3	Kutai Kartanegara	5.263%	5.263%	5.263%	5.263%	5.263%
4	Kutai Timur	5.263%	5.254%	5.250%	5.263%	5.263%
5	B e r a u	5.261%	5.281%	5.287%	5.263%	5.166%
6	Penajam Paser Utara	5.263%	5.263%	5.263%	5.263%	5.263%
7	Mahakam Ulu	4.447%	4.598%	4.927%	4.215%	4.457%
8	Balikpapan	-39.092%	-47.087%	-47.620%	-50.546%	-60.178%
9	Samarinda	-14.834%	-18.619%	-24.776%	-28.787%	-21.718%
10	Bontang	5.263%	5.263%	5.263%	5.149%	5.145%
Jumlah		-14.525%	-18.631%	-20.108%	-26.331%	-27.870%

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024), diolah.

Dinamika Produksi daging mengalami pertumbuhan produksi tahunan rata-rata 2,5% mulai Tahun 2020 sampai Tahun 2024, namun terdapat anomali produksi di kabupaten Berau pada Tahun 2023 yaitu +279% dan terkoreksi positif di Tahun 2024, Penurunan produktivitas signifikan Balikpapan yaitu -18,2% dari puncak Tahun 2021. Data tersebut menggambarkan terjadi ketimpangan regional dan defisit di wilayah kota yaitu Balikpapan (defisit -60,2% di 2024) dan Samarinda (defisit -21,7% di 2024), sedangkan Surplus konsisten di wilayah Kabupaten. Secara total kondisi defisit semakin meningkat dari tahun 2020 sampai 2024 dengan rasio defisit total dari -14,5% (2020) ke -27,9% (2024), kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi tidak seimbangan

produksi/produktifitas ternak penghasil daging terhadap peningkatan konsumsi, selain itu terdapat pergeseran minat konsumsi masyarakat terhadap daging frozen dengan berbagai macam pertimbangan (lebih murah, praktis, lebih higienis, dapat disimpan lama).

Tabel II-18. Konsumsi daging berdasarkan Komoditas Ruminansia/Non Ruminansia

No.	Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023	2024*
1	RUMINANSIA	13,949.29	14,165.59	14,390.02	16,581.12	17,095.47
2	NON RUMINANSIA	68,076.46	73,526.41	76,562.57	84,430.14	92,798.99
Jumlah		82,025.75	87,692.00	90,952.59	101,011.26	109,894.46

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024), diolah.

Tabel II-19. Prosentase Konsumsi daging berdasarkan komoditas Ruminansia/Non Ruminansia

No.	Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023	2024*
1	RUMINANSIA	17.01%	16.15%	15.82%	16.42%	15.56%
2	NON RUMINANSIA	82.99%	83.85%	84.18%	83.58%	84.44%
Jumlah		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024), diolah.

Tabel II-20. Produksi daging berdasarkan Komoditas Ruminansia/Non Ruminansia

No.	Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023	2024*
1	RUMINANSIA	9,023.77	8,194.07	8,785.15	8,669.18	9,144.03
2	NON RUMINANSIA	62,814.21	64,804.80	65,494.04	67,234.74	70,123.02
Jumlah		71,837.98	72,998.87	74,279.18	75,903.93	79,267.06

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024), diolah.

Tabel II-21. Prosentase Produksi daging berdasarkan komoditas Ruminansia/Non Ruminansia

No.	Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023	2024*
1	RUMINANSIA	12.56%	11.22%	11.83%	11.42%	11.54%
2	NON RUMINANSIA	87.44%	88.78%	88.17%	88.58%	88.46%
Jumlah		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024), diolah.

Tabel II-22. Surplus/defisit daging berdasarkan berdasarkan komoditas Ruminansia/Non Ruminansia

No.	Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023	2024*
1	RUMINANSIA	-35.31%	-42.16%	-38.95%	-47.72%	-46.51%
2	NON RUMINANSIA	-7.73%	-11.86%	-14.46%	-20.37%	-24.44%
Jumlah		-12.42%	-16.76%	-18.33%	-24.86%	-27.87%

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024), diolah.

Analisis terhadap keseimbangan pasokan daging Berdasarkan Jenis Ternak (Ruminansia/non Ruminansia) pada Tahun 2020-2024 sebagai berikut Dominasi ternak Non-Ruminansia pada Konsumsi non-ruminansia (unggas) mencapai 75-80% terhadap total konsumsi, sedangkan produksi non-ruminansia mendominasi (85-89% total produksi). Data tersebut menggambarkan terjadi Kondisi kontribusi yang rendah jenis ternak ruminansia, dimana terjadi defisit konsumsi dan produksi ternak ruminansia yang meningkat dari -25,5% (2020) ke -46,5% (2024) dengan produksi yang stagnan di kisaran 8.000-9.000 ton/tahun.

Tabel II-23. Konsumsi Telur Berdasarkan kabupaten/kota (ton)

No.	Kab / Kota	2020	2021	2022	2023	2024*
1	P a s e r	909.06	919.29	877.21	155.74	191.10
2	Kutai Barat	297.13	331.45	341.48	276.45	304.23
3	Kutai Kartanegara	3,420.46	3,477.67	3,521.54	3,258.81	3,490.48
4	Kutai Timur	1,118.20	1,078.49	1,484.35	504.10	706.55
5	B e r a u	2,097.51	2,251.68	2,206.50	1,831.77	1,852.30
6	Penajam Paser Utara	740.97	611.02	613.87	444.21	595.72
7	Mahakam Ulu	24.16	27.99	27.20	6.75	9.64
8	Balikpapan	10,962.89	13,176.30	12,284.05	18,453.50	26,537.62
9	Samarinda	4,001.62	4,481.39	4,600.46	3,652.40	3,643.86
10	Bontang	95.38	77.82	61.96	22.28	55.04
Jumlah		23,667.39	26,433.11	26,018.62	28,606.00	37,386.55

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024)

Konsumsi telur terkonsentrasi di wilayah Balikpapan menyumbang 71% total konsumsi pada Tahun 2024 dengan Disparitas tinggi antara Balikpapan sebesar 26.537 ton dan Mahakam Ulu sebesar 9,64 ton pada 2024, Pertumbuhan Eksponensial di Balikpapan menunjukkan pertumbuhan tahunan

komposit 24,6% Tahun 2020-2024 dan Samarinda relatif stagnan (+3,8% periode sama). Volatilitas konsumsi Kutai Timur terjadi penurunan 66% Tahun 2022→2023 diikuti pemulihan konsumsi 40% Tahun 2023→2024 sedangkan di Bontang terjadi fluktuasi ekstrim (95,38 ton→22,28 ton→55,04 ton). Secara total konsumsi telur meningkat signifikan sampai 30,70% pada tahun 2023→2024.

Tabel II-24. Produksi Telur berdasarkan kabupaten/Kota

No.	Kab / Kota	2020	2021	2022	2023	2024*
1	P a s e r	1,455.61	1,556.80	1,483.72	196.54	239.94
2	Kutai Barat	384.22	418.57	424.55	292.98	334.43
3	Kutai Kartanegara	3,607.94	3,669.02	3,726.94	3,377.63	3,687.30
4	Kutai Timur	1,308.24	1,310.25	1,799.30	533.58	871.56
5	B e r a u	2,130.79	2,371.80	2,262.04	1,878.66	1,900.42
6	Penajam Paser Utara	896.92	770.45	777.91	487.02	755.59
7	Mahakam Ulu	44.94	49.01	48.15	7.99	13.71
8	Balikpapan	938.82	937.43	945.85	879.93	905.79
9	Samarinda	3,094.14	3,195.57	4,027.44	3,172.80	3,818.11
10	Bontang	146.95	123.67	98.43	31.87	91.19
Jumlah		14,008.57	14,402.56	15,594.32	10,858.99	12,618.05

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024)

Tabel II-25. Surplus/Defisit telur berdasarkan Kabupaten/Kota

No.	Kab / Kota	2020	2021	2022	2023	2024*
1	P a s e r	60.123%	69.348%	69.141%	26.198%	25.557%
2	Kutai Barat	29.310%	26.285%	24.326%	5.979%	9.927%
3	Kutai Kartanegara	5.481%	5.502%	5.833%	3.646%	5.639%
4	Kutai Timur	16.995%	21.489%	21.218%	5.848%	23.354%
5	B e r a u	1.587%	5.335%	2.517%	2.560%	2.598%
6	Penajam Paser Utara	21.047%	26.092%	26.722%	9.637%	26.836%
7	Mahakam Ulu	86.010%	75.098%	77.022%	18.370%	42.220%
8	Balikpapan	-91.436%	-92.885%	-92.300%	-95.232%	-96.587%
9	Samarinda	-22.678%	-28.692%	-12.456%	-13.131%	4.782%
10	Bontang	54.068%	58.918%	58.861%	43.043%	65.680%
Jumlah		-40.811%	-45.513%	-40.065%	-62.039%	-66.250%

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024), diolah

Analisis produksi dan keseimbangan Pasokan Telur di Kalimantan Timur (2020-2024), menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi yang signifikan yaitu turun 9.9% (2020-2024)

dari 14.009 ton menjadi 12.618 ton, penurunan tertinggi terjadi di Paser (-84.2%) dan Kutim (-33.4%) sehingga berdampak terhadap *supply* secara total terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi untuk Kalimantan Timur terutama daerah sekitar dan Kota Balikpapan. Ketimpangan yang ekstrim yaitu terjadi defisit tinggi di Balikpapan (-96.6% di 2024) dan surplus tinggi di Bontang (65.7%). Samarinda menunjukkan perbaikan kondisi dari defisit -28.7% ke surplus 4.8%.

Tabel II-26. Surplus/Defisit komoditas daging dan telur Kalimantan Timur

NO.	KOMODITAS	2020	2021	2022	2023	2024*
1	DAGING	-14.53%	-18.63%	-20.11%	-26.33%	-27.87%
2	TELUR	-40.81%	-45.51%	-40.06%	-62.04%	-66.25%

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024), diolah

Analisis defisit komoditas daging dan telur Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 menggambarkan bahwa terjadi eskalasi defisit daging meningkat mencapai 92%, defisit telur 62% dengan gap komoditas telur 2.4x lebih besar daripada daging. Peningkatan kondisi defisit 2023-2024 komoditas telur (+6.3% dalam 1 tahun) dan defisit daging terkonsolidasi di level tertinggi yaitu -27%.

Diagnosis penyebab kondisi surplus/defisit tersebut dari sisi *supply* dimana produktivitas peternakan yang stagnan atau peningkatan yang tidak signifikan, hal ini juga diakibatkan ketergantungan impor bahan pakan, infrastruktur logistik yang mahal, ketidakjelasan harga pasar, sistem usaha yang tidak efisien. Sisi permintaan (*demand*), kecepatan permintaan produk mengalami peningkatan signifikan (+3.2%/tahun), peningkatan konsumsi per kapita dan perubahan preferensi terhadap pemenuhan kebutuhan protein oleh masyarakat.

Dinamika populasi ternak dan konsumsi produk hasil ternak di Kalimantan Timur begitu dinamis, pada berbagai komoditas mengalami pertumbuhan positif dan beberapa komoditas juga mengalami pertumbuhan negatif. Dinamika populasi ternak selain dipengaruhi pemotongan, pemasukan, pengeluaran dan produksi/produktivitas.

Faktor Kesehatan hewan dalam produksi/produktivitas menjadi faktor yang dalam perkembangan terakhir menjadi perhatian yang serius mengingat kejadian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMSZ) semakin meningkat terutama penyakit yang baru terjadi/masuk ke wilayah Kalimantan Timur, berikut data kejadian PHMSZ Tahun 2019-2024.

Tabel II-27. Kejadian PHMSZ Tahun 2019-2024 (Kasus)

No	Penyakit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jembrana	7	26	0	0	0	7
2	Rabies	1	2	1	1	4	3
3	Avian Influenza (AI/Flu Burung)	0	488	5	76	96	488
4	African Swine Fever (ASF)	0	0	784	1251	11	21
5	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	0	0	0	123	37	132
6	Lumpy Skin Disease (LSD)	0	0	0	0	0	45
Total		8	516	790	1451	148	696

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, IKK (2024)

Analisis Epidemiologi terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Kalimantan Timur (2019-2024) menunjukkan tren kasus penyakit yang bersiklus yaitu Avian Influenza mengalami gelombang epidemi pada Tahun 2020 sebanyak 488 kasus dan 2024 juga terjadi sebanyak 488 kasus dengan penurunan signifikan di periode antaranya, sedangkan ASF mencapai puncak pada Tahun 2021 dengan 1,251 kasus dengan penurunan drastis (>95%) pada 2022-2023. Penyakit baru yang muncul yaitu LSD dengan kasus pertama Tahun 2024 sebanyak 45 kasus dan PMK muncul Tahun 2020 dan menjadi endemik berfluktuasi 37-132 kasus/tahun. Penyakit yang terkendali yaitu Jembrana tidak muncul selama 2021-2023, kemudian muncul kembali pada Tahun 2024, Rabies menunjukkan terjadi kasus rendah (<5/tahun) tetapi konsisten.

Faktor risiko utama yang menyebabkan munculnya penyakit tersebut yaitu perubahan Iklim sehingga meningkatkan aktifnya vektor penyakit, penyebab lain yaitu dinamika perdagangan yang mendorong meningkatnya aktifitas lalu lintas ternak ilegal, ditambah dengan lemahnya biosekuriti terutama di peternakan rakyat

Dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat munculnya penyakit strategis tersebut yaitu menurunnya produksi unggas mencapai 15-20% saat wabah AI dan mengganggu Neraca dagang akibat defisit daging babi saat ASF dan meningkatnya biaya kesehatan hewan menjadi 3x lipat.

Kesehatan hewan menjadi faktor penting terhadap keberhasilan produksi, dalam pelaksanaan penyelidikan dan penelusuran kasus penyakit hewan diperlukan peran laboratorium kesehatan hewan yang memadai. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet memiliki peran penting dalam pemantauan, diagnostik, dan penelitian berbagai penyakit hewan. Berikut adalah ruang lingkup pengujian yang dapat dilakukan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

Tabel II-28. Ruang Lingkup Uji Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tahun 2024

No	Ruang Lingkup Uji	No	Ruang Lingkup Uji
1	Uji PCR Avian influenza (AI)	29	Uji Lab Bioteknologi Identifikasi Spesies Babi
2	Uji HA-HI AI	30	Uji Lab Bioteknologi Identifikasi Spesies Tikus
3	Uji RBT (Rose Bengal Test)	31	Uji Lab Bioteknologi Identifikasi Spesies Anjing
4	Uji Test Pullorum	32	Uji Lab Bioteknologi Identifikasi Spesies Kucing
5	Uji FAT (Fluorescent Antibody Test)	33	Uji Mikrobiologi TPC
6	Uji PCR Inclusion Body Hepatitis (IBH)	34	Uji Mikrobiologi Salmonella
7	Uji Elisa Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR)	35	Uji Mikrobiologi E. coli
8	Uji Elisa Infectious Bovine Viral Disease (BVD)	36	Uji Mikrobiologi Staphylococcus
9	Uji Elisa Jembrana Disease (JD)	37	Uji Mikrobiologi Coliform
10	Uji HA-HI NewCastle Disease (ND)	38	Uji Fisiko Kimia Formalin
11	Uji PCR Jembrana Disease (JD)	39	Uji Fisiko Kimia Boraks
12	Identifikasi parasit cacing dengan uji Apung	40	Uji Fisiko Kimia Nitrit
13	Identifikasi parasit cacing uji Sedimen	41	Uji Fisiko Kimia Pewarna Rhodamin - B.
14	Identifikasi parasit darah	42	Uji Fisiko Kimia Pewarna Metanil Yellow
15	Pemeriksaan Bedah bangkai (Patologi Anatomi)		
16	Uji PCR PMK		
17	Uji Elisa PMK		
18	Uji Elisa Rabies		
19	Uji Elisa ASF (African Swine Fever)		
20	Uji PCR ASF		
21	Uji HA-HI AI		

No	Ruang Lingkup Uji	No	Ruang Lingkup Uji
1	Uji PCR Avian influenza (AI)	29	Uji Lab Bioteknologi Identifikasi Spesies Babi
22	Uji HA-HI ND		
23	Uji Rose Bengal Test (RBT)		
24	Uji Pullorum test		
25	Uji Apung Identifikasi Parasit Cacing		
26	Uji Sedimen Identifikasi Parasit Cacing		
27	Uji Elisa Rabies		
28	Uji PCR AI		

Sumber: Laporan Tahunan UPTD Laboratorium Keswan & Kesmavet (2024)

Pembangunan peternakan tidak terlepas dengan kawasan yang digunakan untuk aktivitas budidaya/usaha peternakan, ketersediaan kawasan khusus peternakan akan memberikan beberapa kemudahan diantaranya adalah:

1. Kejelasan tentang status lahan/kawasan akan memudahkan dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana peternakan serta pengendalian lingkungan.
2. Kawasan peternakan yang ditetapkan pemerintah dan otoritas terkait dapat menerapkan regulasi, kebijakan, dan standar yang lebih baik untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan peternakan. Hal ini meliputi perizinan, persyaratan sanitasi, perlindungan lingkungan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, praktik peternakan dapat diawasi dan dikontrol secara lebih efektif.
3. Mempermudah mengelola risiko dan konflik antara kegiatan peternakan dengan kegiatan lain di sekitarnya. Dalam kawasan tersebut, dapat dilakukan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini membantu mengurangi risiko pencemaran lingkungan, konflik antara peternakan dengan pemukiman penduduk, serta memastikan adanya keselarasan antara kegiatan peternakan dan sektor lainnya.
4. Kawasan peternakan yang terencana, menjadi perhatian utama untuk keberlanjutan keamanan pangan yang bersumber pada komoditas peternakan. Kegiatan pengawasan dan pemantauan dapat dilakukan lebih terfokus untuk memastikan produksi hewan yang sehat, kualitas pangan yang baik, dan pencegahan penyakit yang dapat menular ke manusia (zoonosis).

Melalui pendekatan pembangunan peternakan berbasis kawasan memudahkan pengelolaan yang lebih baik, lingkungan yang lebih berkelanjutan, kesehatan hewan yang lebih terjamin, dan peningkatan produktivitas dalam sektor peternakan, berikut pemanfaatan kawasan untuk aktifitas peternakan dari Tahun 2019-2024;

Tabel II-29. Pemanfaatan Kawasan Peternakan Tahun 2019-2024 di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Lahan Peternakan (Ha)				Total
	Area Lainnya	Kebun Sawit	Kehutanan	Pertambahan	
Balikpapan	4	0	2	0	6
Berau	15	36	0	31	82
Bontang	0	9	0	0	9
Kutai Barat	31	16	0	37	84
Kutai Kartanegara	247	19	0	250	516
Kutai Timur	9	101	0	100	210
Mahakam Ulu	9	0	0	0	9
Paser	104	118	0	0	222
Penajam Paser Utara	13	47	0	0	60
Samarinda	27	6	0	0	33
Total	458	352	2	418	1230

Sumber: Data Fungsi DPKH, 2024

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator penting dalam analisis ekonomi suatu wilayah atau Daerah, PDRB memiliki peran penting dalam analisis ekonomi dan perencanaan Pembangunan suatu daerah. Pengukuran PDRB subsektor peternakan diukur untuk digunakan sebagai ukuran dinamika aktivitas ekonomi pada subsektor peternakan, yang menjadi bagian pada sektor pertanian arti luas.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya PDRB subsektor peternakan diantaranya adalah populasi ternak, jumlah Pemotongan ternak, pemasukkan dan pengeluaran ternak serta harga komoditas produk peternakan.

Tabel II-30. PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	53455,32	59132,92	64994,64	67688,16	74362,72
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	36303,77	41058,55	45892,64	47126,29	52862,2
a Tanaman Pangan	1459,16	1380,46	1418,13	1460,7	1547,8
b Tanaman Hortikultura	2349,3	2400,91	2537	2735,58	2964,14
c Tanaman Perkebunan	29979,28	34687,74	39137,95	39957,44	45124,95
d Peternakan	2219,28	2283,19	2473,65	2618,53	2819,92
e Jasa Pertanian dan Perburuan	296,84	306,25	325,91	354,04	405,39
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	6989,5	7230,44	7488,49	8094,58	8528,41
3 Perikanan	10162,05	10843,93	11613,51	12467,28	12972,11

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, BPS (2024)

PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (milyar rupiah) yang diberikan dari subsektor peternakan terhadap sektor pertanian sebesar 5,46 % setiap Tahun. Kontribusi terbesar di Tahun 2022 sebesar 8,34% dan terendah pada Tahun 2021 sebesar 2,88%.

Kontribusi subsektor peternakan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,69% dengan peningkatan nilai milyar rupiah sebesar 201,39 M. Persentase Kontribusi sektor peternakan terbesar berada di Tahun 2020 sebesar 0,37% untuk kontribusi terendah berada di Tahun 2022 sebesar 0,27% dan mengalami peningkatan di Tahun 2024 sebesar 0,33% untuk kontribusi pada subsektor peternakan.

Tabel II-31. Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020- 2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,8	8,49	7,05	8,02	8,66
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	5,98	5,89	4,98	5,58	6,16
a	Tanaman Pangan	0,24	0,2	0,15	0,17	0,18
b	Tanaman Hortikultura	0,39	0,34	0,27	0,32	0,34
c	Tanaman Perkebunan	4,93	4,98	4,25	4,74	5,26
d	Peternakan	0,37	0,33	0,27	0,31	0,33
e	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,15	1,04	0,81	0,96	0,99
3	Perikanan	1,67	1,56	1,26	1,48	1,51

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, BPS (2024)

Tabel II-32. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur (persen) 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,98	-0,07	2,15	2,49	2,38
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	-0,36	-0,97	2,4	1,95	2,01
a	Tanaman Pangan	4,35	-4,45	-1,64	-3,51	2,49
b	Tanaman Hortikultura	0,54	0,92	-0,51	1,84	2,01
c	Tanaman Perkebunan	-0,9	-1,09	2,95	2,31	1,77
d	Peternakan	1,5	0,39	2,22	1,14	4,01
e	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,63	-0,43	0,92	4,63	3,44
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	-6,28	-0,88	-0,86	3,45	0,72
3	Perikanan	0,68	3,32	3,24	3,54	4,45

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, BPS (2024)

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sub sektor peternakan pada tahun 2020 – 2024 yang terendah pada tahun 2021 yaitu 0,39% dan yang tertinggi pada tahun 2024 yaitu 4,01%. LPE subsektor peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu (1) Peningkatan produksi daging, susu, telur, atau produk lain yang dihasilkan dari peternakan, (2) Nilai tambah yaitu selisih antara nilai produksi dan biaya input, keuntungan peternak, upah pekerja, dan biaya operasional lainnya (3) Jumlah Ternak (populasi) (4) Tingkat investasi dalam infrastruktur peternakan, teknologi, dan peralatan (5) Pertumbuhan nilai ekspor produk peternakan.

Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan Kalimantan Timur (2020-2024) menunjukkan kinerja subsektor peternakan mengalami fluktuasi signifikan pada titik rendah Tahun 2021 yaitu +0.39% namun masih positif, kemudian mengalami pemulihan dengan pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2024 yaitu 4.01% bahkan lebih tinggi daripada sub sektor lainnya.

Faktor-faktor penentu LPE subsektor peternakan yaitu terjadinya wabah penyakit PHMSZ, diantaranya ASF dan PMK pada Tahun 2021 dan AI Tahun 2020 dan Tahun 2024 yang menyebabkan kontraksi, faktor utama yang lebih dominan yaitu kebijakan revitalisasi peternakan (upaya peningkatan produksi-produktifitas, pengembangan komoditas ternak alternatif dan pengkondisian iklim usaha peternakan yang kondusif) yang dilakukan mulai berdampak positif pada Tahun 2022-2024.

b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan diukur melalui beberapa indikator kinerja utama (IKU) diantaranya sebagai berikut:

1. Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB (%), definisi indikator adalah besaran produk domestik regional bruto (PDRB) harga berlaku subsektor peternakan terhadap besaran produk domestik regional bruto (PDRB) harga berlaku Kalimantan Timur. Sumber data dari Badan Pusat Statistik.
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Migas dan Batubara (%), definisinya adalah indikator yang mengukur pertumbuhan ekonomi pada subsektor peternakan tanpa memasukkan kontribusi dari sektor migas (minyak dan gas bumi) dan batubara, dalam periode waktu tertentu.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Skor), adalah indikator yang mengukur daya beli peternak dengan membandingkan harga produk yang dijual (output) terhadap harga barang/jasa yang dibutuhkan untuk produksi (input) dalam subsektor peternakan.

4. Produksi Daging (ton), adalah jumlah produksi daging dari seluruh komoditas ternak penghasil daging selama 1 Tahun.
5. Produksi Telur (ton), adalah jumlah produksi telur dari seluruh komoditas ternak penghasil telur selama 1 Tahun.
6. Produksi Ternak Lainnya (ton), adalah jumlah produksi aneka ternak (walet, madu, dan lainnya) dari seluruh komoditas aneka ternak selama 1 Tahun.
7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Skor), adalah Nilai yang diukur sesuai dengan PERMENPAN 88 Tahun 2021 tentang evaluasi AKIP dan PERGUB Kalimantan Timur 26 Tahun 2022 beserta PERGUB 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas PERGUB 26 Tahun 2022.
8. Indeks Kepuasan Masyarakat (Skor), diukur sesuai dengan survei kepuasan masyarakat yang mengacu pada PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) diukur dengan indikator sebagai berikut:

Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%), definisinya adalah Indikator ini mengukur efektivitas program pengendalian penyakit hewan menular dengan membandingkan penurunan jumlah kejadian (*outbreak*) atau kasus penyakit hewan menular dalam periode tertentu terhadap data *baseline* (acuan).

Tabel II-33. Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020– 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	(2020)			(2021)			(2022)			(2023)			(2024)		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatkan Kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah		Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB(%)	0.34	0.37	109%	0.36	0.33	92%	0.37	0.27	73%	0.37	0.31	84%	-	0.33	-
1. Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi Sub Sektor Peternakan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Migas dan Batubara										-	1.14	-	2.00	4.01	201%
	1. Meningkatkan Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	104.50	101.65	97%	102.00	104.27	102%	103.00	108.04	105%	104.00	107.23	103%	108.58	104.14	96%
	2. Meningkatkan Produksi Pangan Asal Ternak	1. Produksi Daging (ton)	85,479.70	80,917.96	95%	73,274.74	75,811.96	103%	74,740.23	74,461.03	100%	76,235.08	76,110.37	100%	76,024.70	77,652.26	102%
		2. Produksi Telur (ton)	12,058.60	11,386.32	94%	14,148.65	13,181.14	93%	14,290.14	14,834.64	104%	14,433.04	15,594.32	108%	15,294.50	15,397.23	101%
3. Produksi Ternak Lainnya (ton)								-	188.5	-	-	166.62	-	174.95	175.61	100%	
2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah										-	77.89		78.50	78.74	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat										-	85.76		85.00	86.11	101%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	75.34		-	76.17		-	77.06		-	75.6		77.07	81.7	106%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80.04		-	83.24		-	80.25		-	85.55		85.00	86.03	101%

Sumber: Laporan LKJIP DPKH, 2024

Tabel II-34. Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023- 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target	2023		2024		
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
I.	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian							
1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-2	-89,8	72,99	-2,74	370,3	-0,74

Sumber : Laporan LPPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Kalimantan Timur

Pencapaian Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. *Kontribusi Lapangan Usaha Subsektor Peternakan terhadap Ekonomi Daerah*, PDRB merupakan indikator utama untuk pembentukan output dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Subsektor peternakan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pertanian, sehingga subsektor peternakan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, terutama dalam menjaga ketersediaan dan kecukupan protein hewani yang mayoritas terdapat pada komoditas peternakan, seperti daging, telur, dan susu yang tidak dapat digantikan dan ketersediaannya sebagian masih bergantung kepada impor. Berdasarkan data BPS Kalimantan Timur kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap ekonomi daerah mencapai 0,37 pada Tahun 2020 merupakan angka tertinggi selama 5 tahun terakhir, kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap ekonomi daerah paling rendah berada pada Tahun 2022 dengan nilai 0,27. Struktur PDRB sektor pertanian luas pada tahun 2023 mencapai 8,02% dari total PDRB, bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,97%. Pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, harga, dan biaya. Kenaikan Nilai PDRB sub sektor peternakan yang juga sangat dipengaruhi oleh populasi ayam. Peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas ternak bersinergi dengan peningkatan nilai PDRB sub sektor peternakan.
2. *Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) subsektor peternakan*, Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mengukur seberapa cepat perekonomian suatu wilayah atau sektor berkembang dalam periode

tertentu, biasanya dinyatakan dalam persentase. LPE digunakan untuk menilai kinerja ekonomi, baik secara makro (seluruh perekonomian) maupun mikro (sektor tertentu seperti peternakan, pertanian, atau industri). Pada Tahun 2024 LPE sektor peternakan mencapai 4,01% merupakan nilai tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir. Faktor yang mempengaruhi LPE diantaranya investasi, teknologi, permintaan pasar, tenaga kerja, kejadian penyakit hewan dan kebijakan pemerintah untuk mengintervensi subsektor peternakan. Kondisi yang dapat menghambat LPE bidang peternakan diantaranya bergesernya minat konsumsi produk segar ke produk beku, adanya penurunan pada harga ayam hidup, karena masuknya ayam beku ke wilayah kaltim, adanya peningkatan kasus penyakit hewan (AI, PMK, dan LSD) yang menghambat produksi dan produktivitas serta lalulintas ternak, harga pakan atau bahan baku lainnya yang tinggi dapat mengurangi margin keuntungan peternak dan menghambat (tidak adanya pabrik pakan), fluktuasi harga produk peternakan di pasar global atau domestik dapat mempengaruhi pendapatan peternak.

3. *NTP (Nilai Tukar Petani),*

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli petani di pedesaan. NTP merupakan indikator yang mengukur perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (harga jual produk pertanian) dengan indeks harga yang dibayar petani (harga barang dan jasa yang dikonsumsi untuk produksi dan rumah tangga). NTP mencerminkan tingkat kesejahteraan petani, di mana $NTP > 100$ menunjukkan petani mengalami surplus, sedangkan $NTP < 100$ menunjukkan petani mengalami defisit. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa NTP Peternakan Nilainya diatas 100, yang paling tinggi berada pada Tahun 2019 dengan nilai 110,94 dan yang terendah berada di Tahun 2020 yaitu 101,65. Semakin tinggi nilai NTP maka kesejahteraan peternak akan meningkat karena pendapatan lebih tinggi dibandingkan biaya produksi dan konsumsi, sedangkan semakin turun nilai NTP maka mencerminkan kesejahteraan peternak yang menurun karena biaya produksi dan konsumsi lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Faktor yang mempengaruhi harga yang diterima peternak diantaranya fluktuasi harga, supply demand, akses pasar, dan kualitas produk. Faktor yang mempengaruhi harga yang dibayar peternak diantaranya harga inputan

peternak, biaya tenaga kerja, harga barang konsumsi, inflasi, dan kebijakan subsidi.

4. *Produksi Daging,*

Pangan asal ternak sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan masyarakat Indonesia. Permintaan pangan asal ternak saat ini cenderung terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani serta perubahan gaya hidup sebagai akibat arus globalisasi dan urbanisasi sehingga mengandalkan kepada pasokan impor, baik dalam bentuk sapi hidup atau daging. Berdasarkan Tabel 30. dapat dilihat tren produksi daging fluktuatif setiap tahunnya. Produksi terendah berada di Tahun 2022 dengan jumlah produksi daging mencapai 74.461,03 Ton dan yang paling tinggi Tahun 2020 mencapai 80.917,96 Ton. Pada Tahun 2021-2022 produksi daging mengalami penurunan hal ini mungkin akibat Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat yang berakibat penurunan konsumsi produk daging. Pada Tahun 2023-2024 trend produksi daging mengalami peningkatan hal ini karena adanya peningkatan populasi penduduk. Namun produksi daging Kalimantan Timur belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi daging masyarakat Kalimantan Timur yang mencapai 92.994,89 ton/tahun pada Tahun 2024, sehingga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daging masih mendatangkan daging dan produk olahan daging dari luar Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya populasi ternak yang terbatas, bergesernya minat konsumsi dari daging segar ke daging beku, keterbatasan lahan untuk pakan dan kawasan peternakan dan adanya penyakit hewan yang dapat mempengaruhi produksi daging.

5. *Produksi Telur,*

Berdasarkan tabel.30 dapat dilihat tren produksi telur mengalami peningkatan, produksi telur terendah mencapai 11.083,3 Ton pada Tahun 2019 dan produksi telur tertinggi mencapai 15.397,23 Ton pada Tahun 2024. pada Tahun 2019 Pandemi covid-19 menyebabkan pendapatan masyarakat menurun sehingga konsumsi kebutuhan protein asal hewan menurun. Pembatasan kegiatan dalam skala besar juga menyebabkan konsumsi pangan asal hewan menurun sehingga produksi pangan asal hewan juga menurun. Peningkatan produksi telur linear dengan peningkatan konsumsi telur. Peningkatan konsumsi telur dipengaruhi oleh

kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi makanan bergizi dan sehat, ketersediaan dan harga terjangkau membuat masyarakat lebih suka mengonsumsi produk telur dibandingkan produk lainnya. Faktor yang mempengaruhi produksi telur diantaranya genetik ternak, nutrisi dan pakan ternak, manajemen pemeliharaan, kesehatan ternak, lingkungan.

6. *Produksi Aneka Ternak,*

Berdasarkan tabel.30 dapat dilihat trend produksi aneka ternak mengalami fluktuatif, produksi paling tinggi pada tahun 2022 mencapai 188,5 Ton dan yang paling rendah pada tahun 2023 mencapai 166,62 Ton. Pada Tahun 2024 produksi aneka ternak (walet, madu kelulut dan maggot) mengalami kenaikan dari 166,62 ton menjadi 175,61 ton atau sebesar 5,40%. Hal ini disebabkan Permintaan sarang burung wallet untuk kebutuhan ekspor di Indonesia terus meningkat sehingga mendorong peningkatan produksi. Faktor penghambat dalam produksi aneka ternak diantaranya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia terkait produksi aneka ternak lainnya (madu kelulut, walet dan maggot) masih terbatas, kurangnya akses informasi pasar untuk pemasaran produk lebih luas, perubahan iklim dan cuaca dapat mengganggu populasi walet dan produksi sarang, peternak masih menggunakan metode tradisional dan kurang memahami teknik modern untuk meningkatkan hasil produksi, produktivitas dan kualitas madu kelulut masih rendah.

7. *NILAI AKIP,*

Berdasarkan tabel berikut Nilai AKIP mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun dilakukan pengukuran mulai Tahun 2024 dengan target 77,07 dengan realisasi 81,7 atau capaian 106%. Penilaian Nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, agar setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan benar-benar berorientasi pada hasil yang efektif dan efisien.
2. Mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan orientasi hasil.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pencapaian target-target kinerja yang terukur dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.

4. Menjadi alat evaluasi kinerja bagi instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan dan anggaran secara sistematis.
5. Mewujudkan birokrasi yang berorientasi hasil, tidak hanya sekadar menjalankan prosedur, tetapi menghasilkan output, outcome, hingga dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),

Berdasarkan tabel berikut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, ditetapkan target IKM sebesar 85,00 dan realisasi yang dicapai adalah 86,03 atau 101% dari target, menunjukkan kinerja pelayanan publik yang melampaui target yang ditetapkan.

Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai alat ukur tingkat kepuasan masyarakat, bahan evaluasi dan perbaikan kinerja, dasar penyusunan kebijakan pelayanan, dan peningkatan kualitas layanan,

2.1.4 Kelompok sasaran layanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Kelompok Sasaran Internal (*Stakeholder yang secara langsung terlibat dalam struktur atau program dinas*)

(1) **Aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** terdiri dari Pegawai dinas (struktural & fungsional seperti dokter hewan, penyuluh), Tenaga kontrak/outsourcing yang mendukung operasional dinas. Kebutuhan Layanan adalah peningkatan kapasitas SDM (pelatihan, sertifikasi kompetensi). Penyediaan sarana kerja (alat diagnostik, kendaraan lapangan). Sistem evaluasi kinerja berbasis target program. Strategi Layanan yang dapat dilakukan dengan pelatihan rutin teknis veteriner, manajemen, dan IT, Penganggaran khusus untuk alat pendukung tugas. Kinerja dilakukan evaluasi melalui Sistem reward/punishment berbasis SKP/KPI/Perjanjian Kinerja yang terintegrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pegawai (SAKIP).

(2) **Unit Pelaksana Teknis (UPTD)** yaitu UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet. Kebutuhan Layanan utama yaitu Standardisasi layanan (SOP, akreditasi lab). Modernisasi infrastruktur (cold chain vaksin, peralatan lab). Strategi Layanan dengan melakukan audit internal berkala untuk jaminan mutu. Kolaborasi dengan pihak terkait Laboratorium (BPMSOH, B-Vet, dan Lab pihak terkait lainnya)

(3) *Fungsi Cascading*

Peran fungsi secara internal yang terlibat secara langsung terlibat dalam struktur program dinas seperti yang digambarkan pada struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (gambar 1.) adalah sebagai berikut:

- **Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahkan subbagian-subbagian yang

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

- **Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan** mempunyai tugas menyusun rencana operasional, mendistribusikan tugas kepada bawahan, memberi petunjuk pelaksanaan, menyusun bahan perumusan, melaksanakan kebijakan perbibitan, pakan dan produksi peternakan, pengelolaan sumber daya genetik hewan yang terdapat pada lebih dari satu Daerah kabupaten/kota, melaksanakan pengawasan mutu benih/bibit ternak dan pakan ternak di lintas Daerah kabupaten/kota, mengendalikan peredaran benih/bibit ternak, dan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota, menyediakan dan mengendalikan peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak yang sumbernya dari dan ke daerah provinsi lain, mengelola wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari satu Daerah kabupaten/kota, melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan, mengoordinasikan perbibitan, melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- **Bidang Kawasan dan Agribisnis Peternakan** mempunyai tugas menyusun rencana operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk pelaksanaan tugas, menyusun bahan perumusan kebijakan kawasan, pembiayaan, investasi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, melaksanakan pengembangan dan penataan kawasan peternakan, memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin usaha peternakan, melaksanakan pembinaan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan / investasi, penjaminan dan kemitraan usaha agribisnis peternakan, membina dan penyebarluasan informasi dan promosi komoditas peternakan, melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan harga komoditi peternakan, melaksanakan ,menganalisa permintaan dan penawaran (supply demand) produk peternakan, melaksanakan

pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak, pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh/petugas teknis peternakan, melaksanakan pembinaan pengembangan dan pengawasan tataniaga ternak dan hasil ternak, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kawasan, pembiayaan, investasi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, mengevaluasi, menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- **Bidang Kesehatan Hewan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, melaksanakan penjaminan kesehatan hewan, mengawasi pemasukan dan pengeluaran hewan lintas Daerah provinsi, memberikan rekomendasi, menyusun penilaian/analisa resiko penyakit hewan, melaksanakan pengawasan peredaran obat hewan, melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota , melaksanakan Fasilitasi, mengevaluasi, menyusun laporan serta pengembangan teknis di bidang Kesehatan Hewan. Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Hewan membawahkan
- **Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, menyusun penilaian/analisa resiko pemasukan produk hewan antar provinsi terkait penyakit zoonosis, memberikan rekomendasi penerbitan izin laboratorium kesehatan masyarakat veteriner di daerah provinsi serta pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi

higiene sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan, melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas serta pengembangan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- **UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak** dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknik Dinas di bidang Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Untuk melaksanakan tugas UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :
 - ✓ Penyusunan rencana teknis operasional Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - ✓ Pelaksanaan kebijakan teknis operasional Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - ✓ Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - ✓ Pengelolaan urusan ketatausahaan
 - ✓ Pembinaan kelompok jabatan fungsional
 - ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak terdiri dari ;

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak
- d. Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak
- e. Kelompok Jabatan fungsional

- **UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknik Dinas di bidang Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Untuk melaksanakan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan
 - e. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan Tugas dan Fungsinya

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari ;

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan'
- d. Seksi penyidikan dan pengujian penyakit peternakan
- e. Kelompok Jabatan fungsional
- f. Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Seksi-seksi di masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang

tenaga senior sebagai Ketua, ketua kelompok dan bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD.

- g. Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh gubernur atas usul Kepala Dinas.

b. Kelompok Sasaran Eksternal (*Pihak di luar dinas yang menjadi penerima manfaat layanan*)

(1) *Peternak yang terdiri Peternak Rakyat yang memerlukan pendampingan intensif (contoh: program kemitraan sapi-potong, PDKT, Integrasi dll). Peternak Komersial memerlukan kemudahan perizinan dan akses ekspor. Strategi Layanan yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan aktif secara langsung kepada peternak maupun melalui petugas medis/paramedis Kabupaten/Kota. Memberikan BIMTEK (Bimbingan Teknis) budidaya ternak berkelanjutan.*

(2) *Pelaku Usaha dan Industri misalnya RPH/RPU (Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas) memerlukan sertifikasi NKV, sertifikasi halal dan pengawasan mutu lainnya. Industri Pakan Ternak yang memerlukan regulasi impor bahan baku, akses bahan baku dan peredaran produk pakan. Strategi Layanan yang dapat dilakukan pengawasan dan supporting system untuk jaminan kualitas RPH/ kualitas Pakan. Memberikan fasilitasi pertemuan bisnis dan pengembangan usaha dengan mitra usaha lokal/luar dengan membangun jejaring bisnis.*

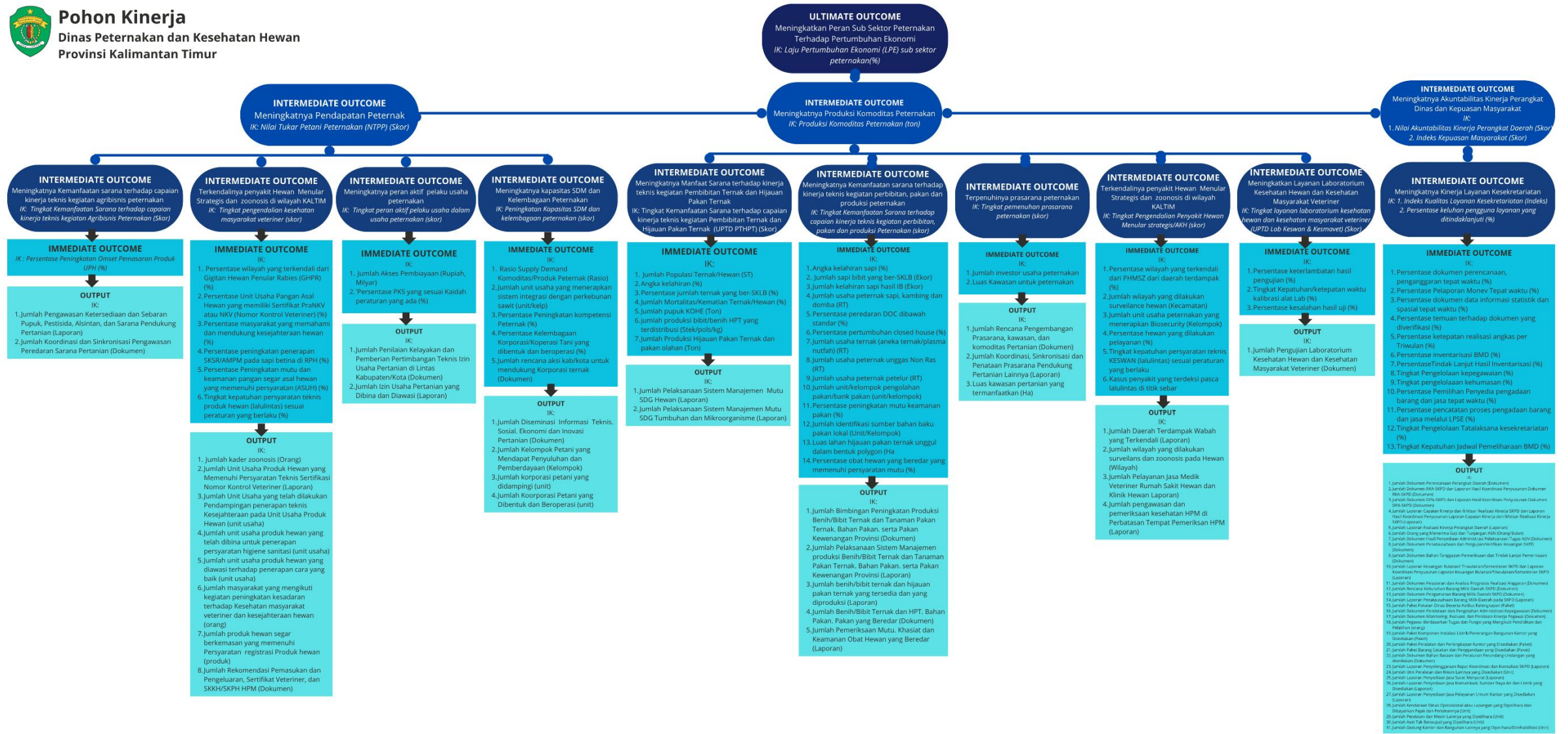
(3) *Masyarakat Umum sebagai Konsumen/komunitas dengan melakukan Edukasi keamanan pangan, keamanan kesehatan melalui sosialisasi penanganan zoonosis (rabies, flu burung). Strategi Layanan yang dapat dilakukan dengan menyediakan Hotline pengaduan maupun Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) via media sosial, dan media lainnya.*

(4) *Pemerintah Daerah & Lembaga Terkait maupun dengan swasta melalui fungsi crosscutting seperti pada gambar2.*

Dengan skema ini, layanan dinas dapat lebih **terukur, relevan, dan berdampak langsung** pada peningkatan sektor peternakan di Kalimantan Timur.



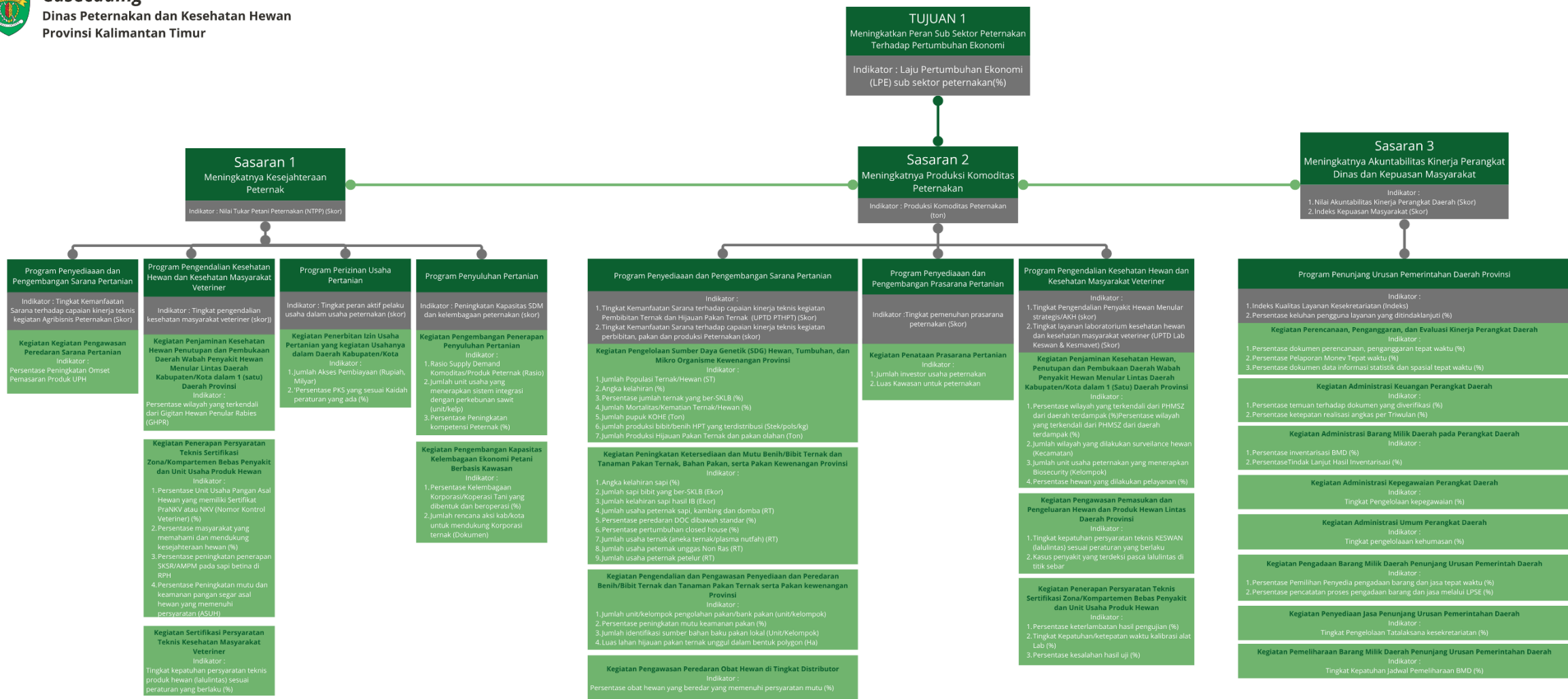
Pohon Kinerja
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur





Casecading

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur



2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki fungsi crosscutting dengan perangkat daerah lain dalam pemberian pelayanan dan pencapaian kinerja. Perangkat Daerah yang telah memiliki komitmen bersama antara lain:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Komitmen bersama didasari kebutuhan strategis untuk mensinergikan program kerja kedua dinas dalam mendukung rantai nilai pembangunan peternakan secara terpadu dengan poin penting:

- Rapat koordinasi dan sinkronisasi program secara berkala di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota
- Pembentukan tim kerja bersama untuk perencanaan dan implementasi program percontohan di desa
- Penyelenggaraan pelatihan terpadu (teknis peternakan dan manajemen BUMDes) bagi masyarakat dan aparatur desa
- Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penunjang usaha peternakan di desa
- Pendampingan dalam akses permodalan dari lembaga keuangan atau program pemerintah lainnya bagi usaha peternakan desa
- Penyusunan panduan atau modul bersama terkait pengembangan peternakan berbasis desa

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur

Komitmen bersama didasari kebutuhan strategis untuk mensinergikan program kerja kedua dinas dalam mendukung rantai nilai pembangunan peternakan secara terpadu dengan poin penting:

- Rapat koordinasi dan evaluasi program secara berkala
- Pembentukan tim teknis gabungan untuk implementasi program tertentu
- Penyelenggaraan kegiatan bersama seperti pelatihan, workshop, seminar, dan studi banding
- Fasilitasi akses permodalan, teknologi, dan informasi bagi pelaku usaha peternakan

- Penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia di kedua dinas terkait sub sektor peternakan
- Advokasi kebijakan yang mendukung iklim usaha peternakan yang kondusif

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dapat diwujudkan melalui pemanfaatan Bantuan Dana Desa yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sub-sektor peternakan sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi desa. Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan berkelanjutan, seperti pengadaan ternak produktif (sapi, kambing, domba, dan ayam), pembangunan kandang, penyediaan pakan ternak, serta pelatihan dan pendampingan teknis bagi kelompok peternak desa. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian desa sekaligus mendukung target pembangunan daerah.

Penguatan kelembagaan peternakan desa melalui Dana Desa dapat diwujudkan dengan mendukung pengembangan unit usaha BUMDes atau koperasi peternak, termasuk fasilitasi sarana produksi dan pengolahan hasil ternak. Dana Desa tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada peternak, tetapi juga memperkuat kelembagaan ekonomi desa sehingga tercipta rantai nilai peternakan yang lebih terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dukungan BUMD dalam bentuk pendampingan, akses permodalan, maupun pembukaan pasar baru akan semakin mempercepat terbangunnya ekosistem peternakan desa yang tangguh.

Program **ketahanan pangan** desa dapat dikaitkan dengan kebijakan nasional *Makan Bergizi Gratis* sebagaimana menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah pusat. Sub-sektor peternakan mampu menjadi pemasok utama kebutuhan protein hewani seperti daging, telur, dan susu bagi program tersebut. Melalui pemanfaatan Dana Desa, peternakan rakyat dapat diarahkan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi bagi anak sekolah maupun masyarakat desa, sehingga tujuan gizi

seimbang, peningkatan kualitas SDM, dan pencegahan stunting dapat tercapai secara nyata. Dengan keterlibatan BUMD, distribusi dan manajemen pasokan pangan bergizi dapat lebih terjamin, sehingga manfaat program dapat dirasakan merata di seluruh pelosok desa.

Pengembangan kelembagaan melalui Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dalam bidang peternakan. Koperasi ini berfungsi sebagai wadah kolektif bagi peternak untuk memperkuat posisi tawar, mengelola distribusi pakan dan hasil ternak, serta menghubungkan rantai pasok dengan pasar yang lebih luas. Dengan dukungan regulasi pemerintah, koperasi ini dapat difungsikan sebagai jembatan antara peternak desa dengan BUMD, industri pengolahan, maupun sektor distribusi pangan. Sinergi antara BUMD, Dana Desa, dan Koperasi Merah Putih akan memperkuat ekosistem usaha peternakan berbasis masyarakat, sehingga keberlanjutan usaha, peningkatan pendapatan peternak, serta ketahanan ekonomi desa dapat terwujud secara lebih terarah dan terukur.

dapun arah kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mendorong sinkronisasi program lintas sektor untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Berlandaskan regulasi tersebut, integrasi BUMD, BUMDes, Dana Desa, dan Koperasi Merah Putih dalam pengembangan sub-sektor peternakan dapat menjadi instrumen strategis untuk mencapai kinerja perangkat daerah, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

2.1.7 Kerjasama yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat daerah

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur telah menjalin kerja sama dengan tiga provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan melalui sinergi program, pertukaran informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan

memastikan keamanan produk hewan melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.

a. Kerja Sama dengan Provinsi Sulawesi Tengah

Kerja sama antara Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah difokuskan pada fasilitasi pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan. Beberapa poin penting dalam kerja sama ini meliputi:

- **Pertukaran informasi** mengenai ketersediaan ternak, stok produk peternakan (sapi, kambing, babi, ayam), dan teknologi peternakan.
- **Koordinasi teknis** dalam rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak serta produk hewan.
- **Pencegahan penyakit hewan menular**, termasuk pengawasan lalu lintas ternak untuk mencegah penyebaran penyakit seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).
- **Pengolahan pasca panen** dan pemasaran produk hewan untuk meningkatkan nilai ekonomi.
- **Pemantauan dan evaluasi** secara berkala untuk memastikan efektivitas kerja sama.

Kerja sama ini memperkuat stok ternak dan produk hewan, meningkatkan keamanan pangan, serta mendorong pengembangan teknologi peternakan yang berkelanjutan.

b. Kerja Sama dengan Provinsi Kalimantan Selatan

Kerja sama dengan Kalimantan Selatan bersifat lebih luas, mencakup berbagai bidang pembangunan, termasuk peternakan. Poin pentingnya meliputi:

- **Pengelolaan potensi sumber daya alam dan manusia** untuk mendukung sub sektor peternakan.
- **Sinergi program** di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk pengembangan peternakan.
- **Peningkatan investasi dan perdagangan** produk peternakan antar provinsi.
- **Pembentukan tim bersama** untuk menindaklanjuti kerja sama dengan perjanjian teknis lebih rinci.

Kolaborasi ini membuka peluang pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi distribusi produk hewan, dan memperkuat jaringan kerjasama bisnis peternakan.

c. Kerja Sama dengan Provinsi Jawa Timur

Kerja sama dengan Jawa Timur lebih komprehensif, dengan fokus pada pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas peternakan. Poin pentingnya meliputi:

- **Pengembangan bibit unggul** dan perbaikan genetik ternak untuk meningkatkan produktivitas.
- **Pertukaran teknologi**, termasuk pakan ternak, pengolahan produk hewan, dan laboratorium kesehatan hewan.
- **Pencegahan penyakit hewan** melalui analisis risiko bersama dan sistem informasi terintegrasi.
- **Peningkatan kapasitas SDM** melalui pelatihan, magang, dan sekolah lapangan bagi peternak.
- **Penguatan kelembagaan** melalui harmonisasi regulasi dan forum bisnis peternakan.

Kerja sama ini mendorong modernisasi peternakan, meningkatkan kualitas produk hewan, dan memperkuat sistem kesehatan hewan untuk daya saing pasar.

Kerja sama dengan Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur memberikan kontribusi signifikan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai tujuannya, yaitu:

1. **Ketahanan pangan** melalui ketersediaan stok ternak dan produk hewan yang stabil.
2. **Peningkatan kualitas produk** melalui penerapan teknologi dan standar kesehatan hewan.
3. **Penguatan ekonomi peternakan** dengan perluasan pasar dan investasi.
4. **Pencegahan penyakit hewan** melalui koordinasi dan sistem pengawasan yang efektif.

Dengan kolaborasi ini, Kalimantan Timur dapat menjadi pusat pengembangan peternakan yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat nasional.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat daerah

Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki peran penting dalam rangka pemenuhan gizi (Protein) yang bersumber dari hewan, Saat ini isu tentang kecukupan gizi terutama menjadi permasalahan utama dalam membangun Sumber Daya Manusia yang cerdas, tangguh, sehat dan berprestasi. Data-data kasus kesehatan di Indonesia termasuk Kalimantan Timur telah banyak didapatkan diantaranya kasus Obesitas, penyakit metabolisme dan Kasus *Stunting* menjadi perhatian utama pemerintah baik pusat maupun daerah.

Kalimantan Timur memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar termasuk kaitannya dengan sub sektor peternakan, namun membangun sub sektor peternakan dan kesehatan hewan memiliki tantangan yang tidak mudah dan masalah yang dihadapi sangat *complicated*.

Identifikasi permasalahan pembangunan sub sektor peternakan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Memetakan sumber informasi yang dapat berkontribusi dan diambil data serta memasukkannya.
2. Membuat instrumen penggalan data dan masukan, serta menyusun jadwal identifikasi permasalahan.
3. Mengumpulkan data secara online (G-Form) dari responden dari berbagai unsur pentahelix diantaranya adalah Unsur Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota), Unsur Akademis, Unsur swasta (pelaku usaha, peternak), Unsur Media, Unsur masyarakat (asosiasi, komunitas, perkumpulan).
4. Menganalisa data dan masukkan yang telah dikumpulkan dengan metode cleaning-profiling data, pengolahan data, trending word analisis, trending topic dan kombinasi frasa, visualisasi dan interpretasi.
5. Melakukan Foccus Group Discussion (FGD) secara internal untuk membahas merumuskan permasalahan, menentukan

urgensi, melakukan pembobotan dan menentukan alternatif strategis

Hasil identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

(1) Profil Responden

Sumber data Identifikasi dan penjarangan data masukan berasal dari responden yang dikelompokkan sebanyak 186 responden, dari 5 unsur pembangunan, dan kelompok internal-eksternal, ditunjukkan pada tabel 32 dan tabel 33.

Tabel II-35. Profil responden berdasarkan unsur pembangunan

Unsur Pembangunan	Jumlah Data
Akademisi	7
Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota	9
Aparatur Pemerintah Provinsi	110
Aparatur Pemerintah Provinsi / Instansi Vertikal	1
Asosiasi	6
Instansi Vertikal	6
Media	3
Pelaku Usaha	12
Peternak	32
Total	186

Tabel II-36. Profil responden berdasarkan sumber data lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan

Unsur Pembangunan	Jumlah Data
Eksternal	86
Internal	100
Total	186

(2) Hasil pengumpulan data dan Analisis Trending word/topic

Data yang berhasil dikumpulkan dari responden dengan menjawab 4 pertanyaan penting dalam instrumen/quisener dan dilakukan analisa trending word dan topic di tunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II-37. Analisis trending word dan topic

Frasa Group 1	Frekuensi	Frasa group 2	Frekuensi
pengembangan ternak	14	keterbatasan sdm	12
peternakan sapi	10	penyakit hewan	10
pemanfaatan lahan	9	keterbatasan modal	8
lahan bekas	8	harga pakan	7
ayam kampung	7	sdm peternakan	6
ternak kambing	7	wabah penyakit	5
pakan ternak	6	akses permodalan	5
sumber pakan	5	kurangnya tenaga	4
integrasi peternakan	5	mahalnya pakan	4
peternakan ayam	5	keterbatasan lahan	4
Frasa group 3	Frekuensi	Frasa group 4	Frekuensi
peningkatan kualitas	15	sdm peternakan	14
pemanfaatan teknologi	12	infrastruktur jalan	12
kerjasama kemitraan	10	akses permodalan	10
pengembangan pasar	9	penyakit hewan	9
hilirisasi produk	8	pemasaran hasil	8
pelatihan peternak	7	keterampilan peternak	7
teknologi peternakan	6	akses lokasi	6
investor peternakan	5	kredit usaha	5
dukungan pemerintah	5	harga jual	5
akses pasar	5	pengetahuan peternak	5

(3) *Interpretasi data*

Permasalahan pembangunan Peternakan dan Kesehatan hewan yang didapatkan dari hasil analisa dan FGD baik secara Internal/Eksternal meng-kategorikan 3 Level Permasalahan (Tabel.35) yaitu:

1. Level Permasalahan Utama, pada level ini permasalahan bersifat global/makro.
2. Level Permasalahan Pokok, pada level ini terdapat 3 permasalahan pokok.
3. Level Permasalahan, pada level ini terdapat 9 permasalahan.
4. Level Akar Masalah, pada level ini bersifat mikro (teknis) terdapat 40 akar permasalahan.

Tabel II-38. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

MASALAH UTAMA	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH		
Peran sub sektor peternakan dan keswan kurang optimal dalam diversifikasi ekonomi	Produksi belum mencukupi terhadap peningkatan konsumsi pangan asal hewan/ternak	Laju produksi lokal kurang optimal memenuhi kebutuhan pangan asal ternak	Produktivitas komoditas ternak besar rendah, Kualitas genetik ternak rendah		
			Kapasitas peternak dalam pemeliharaan ternak rendah		
			Kurangnya Ketersediaan/kecukupan ternak dasar (betina) belum efisiennya pengelolaan Budidaya (HPP tinggi)		
		Munculnya penyakit hewan menular dan wabah yang mengancam produktivitas ternak dan kesehatan masyarakat veteriner	Kurangnya program vaksinasi dan pencegahan penyakit hewan yang efektif. Lemahnya sistem surveilans dan deteksi dini penyakit hewan. Kurangnya kesadaran peternak tentang pentingnya kesehatan hewan dan biosekuriti. Perdagangan dan Mobilitas Hewan yang sulit dikendalikan Sistem Monitoring dan Deteksi Dini yang Lemah dan belum terintegrasi Peningkatan populasi Hewan Pembawa penyakit zoonosis Masih banyaknya pemotongan sapi betina Banyaknya tempat pemotongan hewan yang berdampak pada mutu keamanan produk peternakan Banyak kasus pelanggaran kesejahteraan hewan	Munculnya penyakit hewan menular dan wabah yang mengancam produktivitas ternak dan kesehatan masyarakat veteriner	Kurangnya kesadaran peternak tentang pentingnya kesehatan hewan dan biosekuriti.
					Perdagangan dan Mobilitas Hewan yang sulit dikendalikan
					Sistem Monitoring dan Deteksi Dini yang Lemah dan belum terintegrasi
					Peningkatan populasi Hewan Pembawa penyakit zoonosis
					Masih banyaknya pemotongan sapi betina
					Banyaknya tempat pemotongan hewan yang berdampak pada mutu keamanan produk peternakan
					Banyak kasus pelanggaran kesejahteraan hewan
		Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di sektor peternakan, termasuk kurangnya tenaga ahli dan keterampilan peternak	Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di sektor peternakan, termasuk kurangnya tenaga ahli dan keterampilan peternak	Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di sektor peternakan, termasuk kurangnya tenaga ahli dan keterampilan peternak	Kurangnya program pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi peternak dan tenaga teknis.
					Minimnya regenerasi peternak dan kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor peternakan.
Kurangnya inovasi dan keberlanjutan pendampingan dan pembinaan dari pemerintah dan lembaga terkait.					
Kurangnya Kesadaran tentang Pentingnya Peningkatan Keterampilan					
Tingkat adopsi teknologi dan inovasi peternakan yang rendah					
Tingginya harga pakan dan keterbatasan ketersediaan bahan baku pakan.	Tingginya harga pakan dan keterbatasan ketersediaan bahan baku pakan.	Tingginya harga pakan dan keterbatasan ketersediaan bahan baku pakan.	Ketergantungan pada bahan baku pakan impor (dari luar daerah) yang mahal.		
			Kurangnya pemanfaatan sumber pakan lokal yang potensial.		
			Infrastruktur dan teknologi pengolahan, produksi, distribusi, penyimpanan bahan baku pakan yang belum memadai		
			Kurangnya Teknologi dan Inovasi dan Minimnya pengembangan varietas unggul tahan kondisi cuaca/iklim dan tanah di Kaltim		
Rendahnya pendapatan usaha peternakan untuk menopang kebutuhan ekonomi peternak	Rendahnya pendapatan usaha peternakan untuk menopang kebutuhan ekonomi peternak	Kesulitan peternak dalam mengakses modal dan sistem agribisnis yang tidak kondusif (pasar tidak stabil, ketergantungan terhadap pasar lokal, pergeseran minat ke frozen)	Kurangnya akses ke lembaga keuangan dan program pembiayaan yang terjangkau.		
			Tingginya suku bunga pinjaman dari bank konvensional.		
			Kurangnya Pengetahuan tentang Manajemen Keuangan dan perencanaan bisnis		
			Resiko usaha yang tinggi di sektor peternakan, ketidak jelasan harga pasar		
Keterbatasan lahan untuk peternakan	Keterbatasan lahan untuk peternakan	Keterbatasan lahan untuk peternakan	Alih fungsi lahan peternakan untuk permukiman atau kegiatan lain.		

MASALAH UTAMA	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH	
		dan infrastruktur yang kurang memadai.	Kurangnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, kandang, dan fasilitas pemasaran. Belum optimalnya pemanfaatan lahan bekas tambang, lahan integrasi (perkebunan/perhutanan/lainnya) atau lahan kritis untuk peternakan. Belum adanya kawasan khusus peternakan yang didukung oleh regulasi yang jelas.	
		Daya saing produk peternakan yang rendah dan kesulitan akses pasar	Kurangnya diversifikasi produk dan hilirisasi produk peternakan. Lemahnya jejaring pemasaran dan akses pasar yang terbatas. Kurangnya promosi dan branding produk peternakan lokal Minimnya komoditas unggulan peternakan	
		Kurangnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Kurangnya sinergi antara stakeholder dalam pengembangan sektor peternakan. Minimnya peran swasta dan investor dalam mendukung pembangunan peternakan. Kurangnya kelembagaan peternak yang kuat dan berjejaring. Kurangnya insentif bagi peternak dan investor di sektor peternakan.	
		Penerapan akuntabilitas dan pelayanan pemerintah belum dilaksanakan secara komprehensif	Belum optimalnya fungsi sistem kesekretariatan	Kurangnya Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Kurangnya Sistem perencanaan kinerja serta Monitoring-Evaluasi yang Efektif Belum optimalnya pengelolaan BMD dalam mendukung pelayanan umum Kurang tertibnya dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan Kurangnya Teknologi Informasi dan Digitalisasi Pelayanan umum

2.2.2 Isu strategis

Identifikasi isu strategis dilakukan dengan memperhatikan faktor lingkungan dinamis yang terdiri isu global, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis memperhatikan dan mengacu pada beberapa dokumen yaitu dokumen RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dokumen KLHS provinsi Kalimantan Timur, dokumen RPJMD 2025-2029 dan penjangkaran aspirasi dari *stakeholder* terkait, identifikasi isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-39. Isu Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Integrasi dengan Sektor Lain (Perkebunan, Kehutanan)	Produktivitas dan Kualitas Ternak Rendah, Laju produksi lokal kurang optimal memenuhi kebutuhan pangan asal ternak (Ketahanan Pangan)	Ketergantungan Pakan Impor dan Keberlanjutan Sumber Daya	Mengakhiri Kelaparan (SDGs2)	Mencapai swasembada pangan, energi dan air(AC2-PP1)	Pengembangan Industri Hijau bernilai Tambah tinggi dan berkelanjutan (KT2-AK3)	Pengembangan peternakan terintegrasi berbasis agro-silvopastural untuk meningkatkan produktivitas ternak dan ketahanan pangan, sekaligus mengurangi deforestasi."
Pendidikan dan Regenerasi Peternak	Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di sektor peternakan, termasuk kurangnya tenaga ahli dan keterampilan peternak serta Regenerasi Peternak,			Pemenuhan Pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat (M1-P6)	Pengembangan Kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan(KT2-AK7)	"Peningkatan kapasitas SDM peternakan melalui sekolah vokasi dan pelatihan berbasis teknologi untuk menarik minat generasi muda."
Penguatan Sistem Kesehatan Hewan	Sistem Kesehatan Hewan yang Lemah, Munculnya penyakit hewan menular dan wabah yang mengancam produktivitas ternak.			Peningkatan pencegahan (surveilans-vaksinasi) penyakit hewan dan biosekuriti terpadu untuk mencegah wabah PHMSZ."		
Pemanfaatan Sumber Pakan Lokal	Tingginya harga pakan dan keterbatasan ketersediaan bahan baku pakan.			Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan yang berkualitas(S-PKH, PP1)	"Optimalisasi limbah pertanian dan perkebunan sebagai pakan ternak berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan impor."	
Akses Pembiayaan dan Investasi	Kesejahteraan Peternak, Kebijakan dan Kelembagaan	Partisipasi Stakeholder dan Kemitraan	Menghapus Kemiskinan(SDGs1)	Pemberantasan kemiskinan (AC2-PP5)	Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern (JP1)	"Pembangunan ekosistem pembiayaan inklusif bagi peternak melalui skim kredit mikro dan kemitraan swasta."
	Kesulitan peternak dalam mengakses modal dan tingginya biaya produksi.					"Pengembangan klaster industri peternakan berbasis nilai tambah (olahan daging/susu/telur) untuk meningkatkan daya saing pasar
Hilirisasi Produk Peternakan	Kurangnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (SDGs8)				Pemantapan kolaborasi triple helix (pemerintah-swasta-akademisi) dalam pengembangan kebijakan dan program peternakan berkelanjutan.
Digitalisasi dan Teknologi Peternakan						

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Pemasaran dan Hilirisasi Produk, Daya saing produk peternakan yang rendah					"Adopsi teknologi IoT dan platform digital untuk efisiensi manajemen budidaya, recording, pencatatan keuangan dan pemasaran produk peternakan."
Pengembangan Kawasan Peternakan Berbasis Lahan Bekas Tambang/Lahan Kritis	Keterbatasan lahan untuk peternakan dan infrastruktur yang kurang memadai, serta dampak lingkungan	Alih Fungsi Lahan dan Degradasi Lingkungan	Kesehatan yang baik dan kesejahteraan (SDGs3)	Menjamin pelestarian lingkungan Hidup (AC2-PP11)	Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan (KT2-AK19)	"Revegetasi lahan bekas tambang sebagai kawasan peternakan berkelanjutan dengan dukungan regulasi dan insentif."
Pengembangan dan penataan Infrastruktur Peternakan		Pengelolaan Limbah dan Kesehatan Lingkungan				
		Infrastruktur dan Adaptasi Perubahan Iklim				
		Keanekaragaman Hayati dan Kawasan Khusus Peternakan				Pembangunan infrastruktur peternakan terpadu (kandang modern, cold chain) berbasis green technology untuk mendukung hilirisasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merumuskan 1 (satu) tujuan utama yang mengakomodir beberapa aspek diantaranya aspek ekonomi, peningkatan pendapatan peternak, dan produksi komoditas, dengan sasaran yang terukur untuk jangka waktu lima tahun.

Tujuan yang dirumuskan adalah "Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan Sub Sektor Peternakan". Tujuan ini disusun selaras dengan sasaran dari Pemerintah Pusat, Selaras dengan Sasaran dokumen RPJM Nasional 2025-2029, dokumen RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, dan selaras dengan Visi-Misi Gubernur Kalimantan Timur.

Mengintegrasikan dua aspek utama pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi komoditas peternakan dan peningkatan pendapatan peternak, sesuai tugas dan fungsi dinas.

Tabel III-1. Keselarasan Target Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Tujuan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029

INDIKATOR	TARGET DPKH		TARGET RPJMD		TARGET RPJMN	
	2025	2029	2025	2029	2025	2029
Laju Pertumbuhan Ekonomi	1.87	1.94	6.17-6.24	8.5-8.60	7.8 (rata-rata)	8.60

Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur selaras dengan RPJMD dan RPJMN, tetapi diperlukan upaya yang lebih komprehensif dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi, kebijakan afirmatif, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan termasuk peran swasta. Dengan langkah strategis, sub sektor peternakan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dan berkontribusi secara signifikan bagi target nasional.

3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-229 adalah (1) Meningkatnya Kesejahteraan Peternak; (2) Meningkatnya Produksi dan Daya Saing Komoditas Peternakan; dan (3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah.

Tabel III-2. Perumusan Tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja*					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 1: Terwujudnya Kaltim Sukses										
Sasaran 1: Terakselerasinya Perekonomian Daerah	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sub Sektor Peternakan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Peternakan (%)	4,01	1,87	1,89	1,91	1,93	1,94	1,96
		Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani Peternakan (Indeks)	104,14	105,18	106,23	107,03	108,37	109,45	110,55
		Meningkatnya Produksi dan Daya Saing Komoditas Peternakan	Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	89.493,54	90.243,30	91.030,14	91.856,19	92.723,76	93.653,28	94.593,37
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,65	79,3	80,01	80,72	81,43	82,14	82,85
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	86,11	86,70	87	88,46	89,49	90,53	91,57

*Penentuan Target Merupakan angka historis rata-rata capaian Tahun 2020-2024

Sasaran 1. Meningkatnya Kesejahteraan Peternak

Indikator: Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP)

Nilai Tukar Petani Peternakan adalah Perbandingan antara indeks harga yang diterima peternak (It) dengan indeks harga yang dibayar peternak (Ib) pada sektor peternakan yang dinyatakan dalam persentase. Harga yang diterima peternak adalah Indeks yang disusun berdasarkan hasil produksi peternakan. Secara konsep NTPP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan peternak di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi peternakan.

NTP Peternakan bertujuan untuk, (1) Memantau perkembangan kesejahteraan peternak dari waktu ke waktu, (2) Menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan peternak, (3) Mengevaluasi efektivitas program atau intervensi di sektor peternakan, (4) Memberikan gambaran tentang daya saing usaha peternakan di Kalimantan Timur.

Nilai Tukar Petani Peternakan tahun 2020 hingga 2024 di Kalimantan Timur menunjukkan tren peningkatan meningkat pada 2020-2022 tertinggi pada tahun 2022 (108,77), kemudian terjadi penurunan pada tahun 2023-2024. Tren kenaikan menggambarkan kenaikan pendapatan peternak lebih besar dibanding kenaikan biaya pengeluaran. Faktor yang dapat mempengaruhi tren penurunan 4,1% karena penurunan permintaan masyarakat pasca pandemi, adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), masuknya produk daging *frozen* dan biaya pengeluaran yang lebih besar.

Sementara itu, data target untuk tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan rencana peningkatan NTP Peternakan yang berkelanjutan, dimulai dari 106,23 pada tahun 2026 hingga mencapai 110,55 pada tahun 2030. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan sektor peternakan dan meningkatkan kesejahteraan peternak melalui berbagai program dan kebijakan yang berkelanjutan.

$NTP > 100$ berarti peternak mengalami surplus. Pendapatan peternak naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan peternak lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan peternak sebelumnya. $NTP = 100$ berarti petani mengalami impas/break even. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan. $NTP < 100$ berarti petani mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan peternak pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan peternak pada sebelumnya.

NTP Peternakan merupakan indikator penting yang tidak hanya mencerminkan kesejahteraan peternak tetapi juga menjadi alat evaluasi kebijakan di sektor peternakan. Tren peningkatan NTP Peternakan dari data historis dan target yang ambisius menunjukkan upaya positif dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan peternak di Kalimantan Timur. Namun, pencapaian target tersebut perlu didukung oleh

kebijakan yang efektif, inovasi teknologi, dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Sasaran 2. Meningkatnya Produksi dan Daya Saing Komoditas Peternakan

Indikator: Produksi Komoditas Peternakan (Ton)

Indikator Produksi Komoditas Peternakan (Ton) digunakan untuk mengukur jumlah hasil produksi dari komoditas peternakan. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan hasil produksi (Produksi Daging, Produksi Telur dan Produksi Aneka Ternak lainnya).

Indikator produksi komoditas peternakan ini sebagai alat ukur yang mampu (1) mendorong pertumbuhan Sektor Peternakan, (2) Sebagai alat evaluasi kinerja sektor peternakan secara holistik, (3) Mendorong Ketahanan Pangan melalui peningkatan produksi daging dan telur berkontribusi pada ketersediaan protein hewani yang terjangkau, (4) Mengoptimalkan Diversifikasi Produk mendorong inovasi dan ketahanan ekonomi peternak skala kecil, (5) Mendukung Pembangunan Berkelanjutan sesuai target SDGs (Tujuan 2: Zero Hunger dan Tujuan 8: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif).

Kontribusi peran peningkatan produksi komoditas peternakan dalam Pembangunan Peternakan di Kalimantan Timur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu kontribusi produksi daging (83%) sebagai penggerak utama pendapatan peternak dan PDRB. Peningkatan produksi telur (15%) mendukung industri turunan (misalnya makanan olahan) dan penyerapan tenaga kerja.

Peran dalam upaya ketahanan pangan dengan tren kenaikan produksi komoditas peternakan ini mencerminkan upaya pemenuhan kebutuhan lokal dan mendorong ekspor dengan diversifikasi produk Aneka ternak (sarang burung walet dan madi kelulut) menjadi basis pengembangan usaha kreatif.

Pembangunan SDM dan Visi "Generasi Emas" akan sulit terwujud jika pemenuhan gizi (protein hewani) belum tercukupi, dengan Peningkatan Gizi melalui peningkatan ketersediaan daging dan telur yang stabil mendukung program gizi anak dan ibu hamil mampu mengurangi stunting, dan mewujudkan generasi sehat.

Pemberdayaan Peternak Pelatihan teknis dan akses pasar bagi peternak daging/telur meningkatkan kapasitas SDM lokal berbasis ekonomi hijau. Inovasi dan Edukasi melalui Integrasi teknologi peternakan (IoT untuk monitoring produksi) memacu literasi digital dan inspirasi peternak muda.

Proyeksi dan Implikasi Kebijakan dengan Target 2030 produksi sebesar 94.593,37 Ton perlu didukung dengan Infrastruktur (cold chain, pabrik pakan), Kebijakan harga yang stabil (e.g., subsidi input ternak), Kolaborasi dengan akademisi untuk riset breed unggul. Sektor peternakan yang tangguh akan menciptakan lapangan kerja berkualitas dan ekosistem agribisnis yang inklusif.

Indikator ini tidak hanya merefleksikan kinerja produksi, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan SDM melalui peningkatan gizi, ekonomi, dan inovasi. Dengan bobot yang terdistribusi pada komoditas strategis, Kalimantan Timur dapat mencapai ketahanan pangan sekaligus mempersiapkan generasi emas yang sehat dan produktif.

Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

Indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah (Skor)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu mekanisme penilaian yang mengukur sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran strategisnya secara transparan, efisien, dan efektif, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Penilaian akuntabilitas kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan stakeholders melalui proses evaluasi yang obyektif dan terstandarisasi.

Tujuan pengukuran akntabilitas ini adalah (1) Meningkatkan Transparansi dengan memastikan kinerja instansi dapat diakses dan dipahami oleh publik. (2) Mendorong Efisiensi dengan Mengoptimalkan penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, waktu) untuk mencapai target. (3) Evaluasi berkelanjutan dengan memberikan rekomendasi perbaikan berbasis data. (4) Implementasi amanat PermenPANRB No. 88

Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Kaltim No. 26 Tahun 2022 yang direvisi melalui Pergub No. 12 Tahun 2025.

Sistem Penilaian Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan Pergub Kaltim No. 12 Tahun 2025, sistem penilaian SAKIP mencakup beberapa unsur/ Komponen Penilaian (1) Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) yaitu Kesesuaian dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra) dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). (2) Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) yaitu Ketersediaan indikator kinerja utama (IKU) dan mekanisme pengumpulan data. (3) Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) yaitu Kualitas laporan kinerja (LKPJ) dan ketepatan waktu publikasi. (4) Evaluasi Internal (Bobot 25%) yaitu Implementasi evaluasi mandiri dan tindak lanjut rekomendasi.

Sistem Penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 mengalami Perubahan Sistem penilaian dengan mengacu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 12/2025 yaitu dengan menyederhanakan komponen penilaian dengan memfokuskan pada 4 aspek utama (dari sebelumnya 5 aspek) dan meningkatkan bobot pemanfaatan hasil evaluasi (50%) dibanding keberadaan dokumen (20%).

Nilai akuntabilitas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2019-2024) berfluktuasi dengan rata-rata 77.49 (kategori Baik), Target nilai SAKIP (2025-2030) dengan rencana peningkatan gradual dengan target 81.13 pada 2030. Untuk pencapaian target dibutuhkan peningkatan 3.45 poin dengan berfokus pada (1) Penguatan Evaluasi Internal (Bobot 25%), (2) Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan real-time. (3) Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) dan (4) Memaksimalkan Integrasi data lintas sektor (crosscutting).

SAKIP pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan perkembangan positif, meski masih perlu penyempurnaan dalam aspek evaluasi internal dan pelaporan. Perubahan regulasi (Pergub No. 12/2025) menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas berbasis hasil (performance-based accountability), khususnya dalam mendukung visi ketahanan pangan dan SDM unggul 2030.

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah atau unit penyedia layanan. Indikator ini dihitung berdasarkan survei atau pengumpulan data langsung dari masyarakat yang menerima layanan, dengan skala nilai tertentu (biasanya 0-100). Nilai IKM yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas layanan yang diterima, sedangkan nilai rendah mengindikasikan perlunya perbaikan.

IKM bertujuan untuk memberikan umpan balik langsung dari masyarakat sebagai pengguna layanan, sehingga instansi pemerintah dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Tujuan indikator ini (1) Memantau Kualitas Layanan dan Sebagai alat untuk mengukur sejauh mana layanan publik memenuhi harapan masyarakat. (2) Meningkatkan Akuntabilitas dengan Memastikan transparansi dan tanggung jawab instansi dalam memberikan pelayanan. (3) Perbaikan Berkelanjutan dengan Identifikasi kelemahan layanan dan merancang strategi peningkatan berbasis data. (4) Mendorong Partisipasi Publik dengan Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan dan layanan.

Dibutuhkan peningkatan 5.34 poin dalam 6 tahun (2024-2030), dengan rata-rata kenaikan 0.89 poin/tahun. Target 2030 yang mendekati 100 menunjukkan ambisi untuk mencapai layanan berkualitas sangat tinggi (excellent service).

Pencapaian target dapat diupayakan dengan mengoptimalkan Inovasi Layanan dan memperluas layanan berbasis teknologi (e.g., one-stop service), Penguatan Umpan Balik/responsif dengan mendorong Sistem pengaduan real-time dengan follow-up terstruktur, Penyesuaian Kebijakan dengan Fokus pada layanan sektor prioritas (pelayanan kesehatan hewan, laboratorium, pelatihan teknis, dan fasilitasi perizinan).

3.3 Strategi PD dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Langkah dan strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mencapai Tujuan dan sasaran mengacu kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan dan isu strategis yang telah teridentifikasi. Identifikasi faktor - faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factors) menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci

keberhasilan tersebut akan membimbing dan mengarahkan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan.

Faktor-faktor penentu keberhasilan ini akan terkait dengan permasalahan peternakan dan kesehatan hewan yang dikaitkan dengan Isu Lingkungan (KLHS), Potensi daerah yang menjadi kewenangan, Isu lingkungan dinamis (lingkup Regional, Nasional dan Global) serta Isu strategis.

Faktor-faktor penentu keberhasilan (CSF) dalam pencapaian Tujuan sasaran Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dikategorikan pada hal-hal yang dapat dikendalikan (controllable) yaitu faktor kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal yang sifatnya relatif kurang/tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) yaitu peluang dan ancaman. Pengkategorian Faktor keberhasilan ini untuk selanjutnya dilakukan pendekatan analisis Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Tabel III-3. Faktor-faktor Internal terkait pembobotan pembangunan Peternakan di Kalimantan Timur

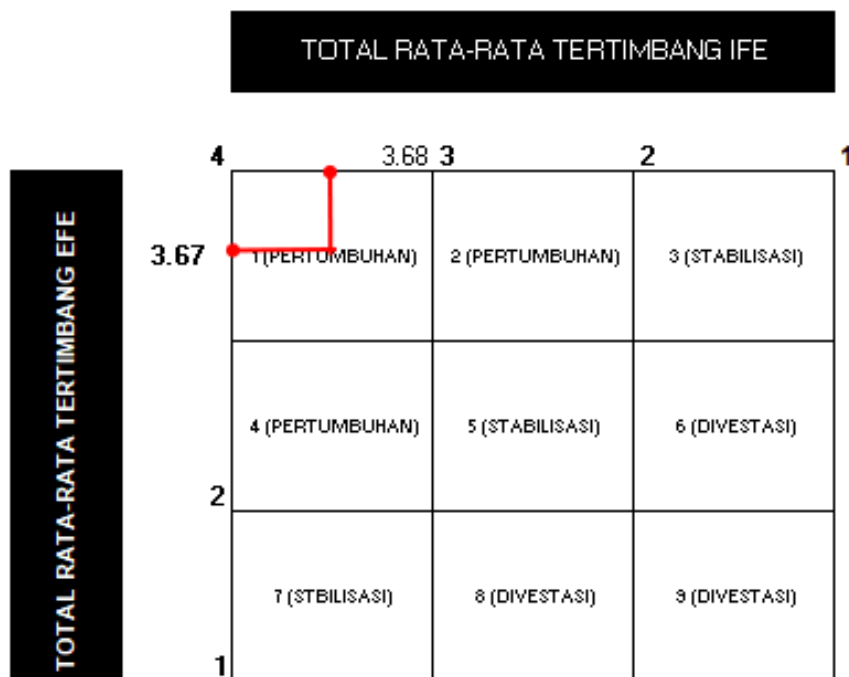
Faktor Internal	BOBOT 1-5 (DAMPAK)	BOBOT (Tingkat Dampak)	RATING 1-4 (PRIORITAS)	SKOR
<i>Kekuatan (Strengths):</i>				2.015
- Program inseminasi dan vaksinasi	4.663	0.080	3.811	0.306
- Kinerja pelayanan yang baik	4.663	0.080	3.842	0.309
- Potensi pengembangan berbagai jenis ternak (sapi, kambing, ayam, dll.)	4.600	0.079	3.800	0.301
- Pemanfaatan lahan bekas tambang dan lahan perhutanan sosial	4.147	0.071	3.526	0.252
- Potensi Ketersediaan bahan baku pakan ternak	4.684	0.081	3.779	0.305
- Integrasi peternakan dengan perkebunan (limbah perkebunan sebagai pakan ternak)	4.263	0.073	3.526	0.259
- Potensi hilirisasi produk peternakan	4.474	0.077	3.674	0.283
<i>Kelemahan (Weaknesses):</i>				1.660
- Produktivitas pakan rendah, harga pakan yang tinggi	4.600	0.079	3.716	0.295
- Masalah kesehatan hewan	4.653	0.080	3.779	0.303
- Pembiayaan dan keterlibatan swasta rendah	4.126	0.071	3.421	0.243
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas	4.589	0.079	3.832	0.303
- Keterbatasan modal dan akses permodalan	4.200	0.072	3.484	0.252
- Keterbatasan lahan dan infrastruktur yang kurang memadai	4.368	0.075	3.505	0.264
	58.032			3.68
	Kekuatan-Kelemahan			0.356

Tabel III-4. Faktor-faktor Eksternal dan pembobotan terkait pembangunan Peternakan di Kalimantan Timur

Faktor Eksternal	BOBOT 1-5 (DAMPAK)	BOBOT (Tingkat Dampak)	RATING 1-4 (PRIORITAS)	SKOR
<i>Peluang (Opportunities):</i>				1.867
- Peningkatan konsumsi daging dan telur	4.747	0.066	3.768	0.248
- Potensi kawasan peternakan	4.526	0.063	3.684	0.231
- Kontribusi dalam pengurangan stunting dan kemiskinan	4.263	0.059	3.579	0.211
- Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan peternak	4.632	0.064	3.758	0.241
- Pemanfaatan teknologi dan inovasi di bidang peternakan	4.568	0.063	3.726	0.236
- Kerjasama dan kemitraan dengan investor dan pemerintah	4.526	0.063	3.642	0.228
- Pengembangan pasar dan akses pasar yang lebih luas	4.589	0.064	3.716	0.236
- Hilirisasi produk peternakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing	4.579	0.063	3.705	0.235
<i>Ancaman (Threats):</i>				1.802
- Penyakit hewan menular	4.705	0.065	3.779	0.246
- Fluktuasi harga dan inflasi	4.547	0.063	3.684	0.232
- Perubahan iklim dan lingkungan	4.305	0.060	3.474	0.207
- Persaingan dan daya saing rendah	4.368	0.061	3.547	0.215
- Regulasi dan kebijakan yang belum optimal	4.368	0.061	3.642	0.220
- Keterbatasan infrastruktur jalan dan akses lokasi	4.389	0.061	3.663	0.223
- Tingginya biaya produksi	4.695	0.065	3.747	0.244
- Tergesernya lokasi peternakan oleh permukiman warga atau peruntukan lainnya	4.379	0.061	3.547	0.215
	72.189			3.67
	Peluang- Ancaman			0.064

3.3.1 Analisa strategi dengan mempertimbangkan Internal Faktor (IFE) dan Eksternal Faktor (EFE)

Penentuan strategi pada tahap awal dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, Analisis EFE (External Factor Evaluation) dan IFE (Internal Factor Evaluation) adalah alat strategis untuk menilai faktor internal dan eksternal organisasi secara kuantitatif. Hasilnya digunakan untuk menentukan posisi strategis organisasi dan memilih strategi yang sesuai (misalnya: pertumbuhan, stabilisasi, atau diversifikasi, divestasi).



Gambar III-1 Matrik IFE/EFE

a. Analisa Internal Factor Evaluation (IFE)

Menunjukkan bahwa Total Skor IFE: 3.68 (di atas rata-rata 2.5), menggambarkan kekuatan internal lebih dominan daripada kelemahan, dimana kekuatan utama dan kelemahan kritis sebagai berikut

- a. Kekuatan Utama: (1) Kinerja pelayanan yang baik (Skor 0.309), (2) Program inseminasi dan vaksinasi (Skor 0.306), (3) Potensi bahan baku pakan ternak (Skor 0.305).
- b. Kelemahan Kritis: (1) Keterbatasan SDM peternakan berkualitas (Skor 0.303). (2) Masalah Kesehatan hewan, (3) Produktivitas pakan rendah (Skor 0.295).

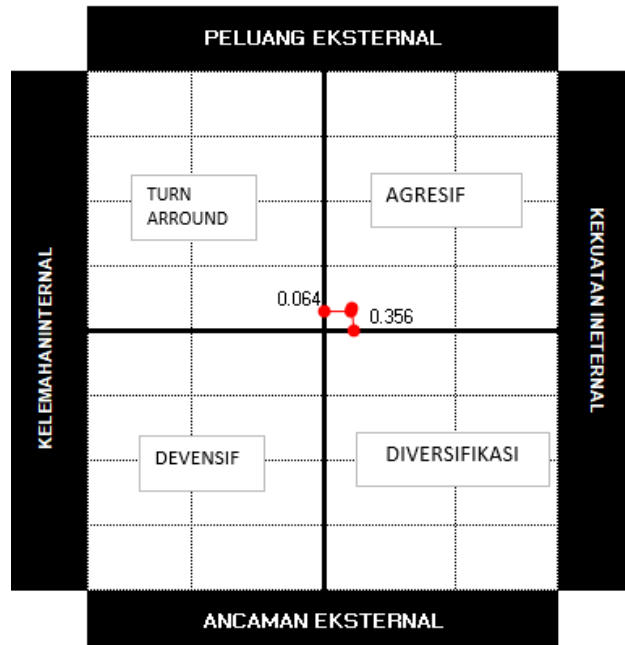
b. Analisa External Factor Evaluation (EFE)

Menunjukkan bahwa Total Skor EFE: 3.67 (di atas rata-rata 2.5), menggambarkan peluang eksternal lebih besar daripada ancaman. Dimana Peluang tertinggi dan Ancaman serius sebagai berikut:

- a. Peluang tertinggi: (1) Peningkatan konsumsi daging/telur (Skor 0.248), (2) Pemanfaatan teknologi (Skor 0.236).
- b. Ancaman Serius: (1) Penyakit hewan menular dari luar daerah (Skor 0.246), (2) Biaya produksi tinggi (Skor 0.244).

3.3.2 Analisa Strategi berdasarkan kuadran SWOT (lanjutan IFE/EFE)

Berdasarkan matriks IFE/EFE, posisi organisasi berada di Kuadran I (Pertumbuhan) dengan skor IFE 3.68 dan EFE 3.67, menunjukkan kapasitas untuk pada kuadran I dengan skor (Kekuatan-Kelemahan) sebesar +0.356 dan Skor (Peluang-Ancaman) sebesar +0.064, sehingga strategi yang di terapkan adalah **agresif memanfaatkan peluang dan kekuatan.**



Gambar III-2 Matrik Strategi SWOT

Strategi yang dapat dilakukan dinas Peternakan dan kesehatan hewan adalah sebagai berikut:

a. *Kekuatan-Peluang SO (Strengths-Opportunities) dengan strategi Akselerasi Pertumbuhan dan Ekspansi*

- Optimalisasi reproduksi ternak besar melalui Intensifikasi Kawin Alam (INKA) dan Inseminasi Buatan, Monitoring dan evaluasi produksi berbasis spasial dan IOT.
- Inovasi teknologi dalam budidaya dalam upaya peningkatan efisiensi biaya produksi
- Mendorong usaha pembibit lokal untuk peningkatan produksi bibit ternak berkualitas
- Memaksimalkan potensi ternak lokal (Aneka Ternak dan plasma nutfah)
- Insentif bagi peternak di sektor peternakan.
- Penerapan Sistem perencanaan kinerja serta Monitoring-Evaluasi yang Efektif

- Optimalisasi pengelolaan BMD dengan aplikasi digital
- Peningkatan fungsi PPID dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Pelayanan umum

b. Kekuatan-Ancaman ST (Strengths-Threats) dengan strategi Diversifikasi dan Mitigasi Risiko

- Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular (PHMS) berorientasi pada tercapainya kekebalan populasi, surveilans penyakit dengan kaidah epidemiologi dengan menggunakan teknologi
- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan (perluasan jangkauan dan responsibilitas)
- Penerapan biosecurity ketat pada sentra-sentra peternakan
- Peningkatan sistem lalu lintas hewan, dari luar daerah maupun didalam daerah
- Sistem Monitoring dan Deteksi Dini penyakit hewan yang terintegrasi
- Pengendalian populasi Hewan pembawa penyakit zoonosis di wilayah padat penduduk
- Pengendalian pemotongan sapi betina produktif
- Penataan TPH menjadi RPH skala kecil
- Mendorong regulasi dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Kesejahteraan hewan
- Sinergi antara stakeholder dalam pengembangan sektor peternakan.
- Regulasi yang mendorong Investor untuk kebijakan insentif, kemudahan mendapatkan lokasi/kawasan dengan HGU yang layak, Kemudahan dalam pelayanan investasi (perizinan dan potensi lokasi).

c. Kelemahan- Peluang WO (Weaknesses-Opportunities) dengan Stabilisasi dan Peningkatan Kapasitas

- Program pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi peternak dan tenaga teknis bersertifikat (berjenjang)
- Fasilitasi regenerasi peternak dan Mendorong minat generasi muda untuk terjun ke sektor peternakan.
- Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kelembagaan secara sistematis dan berkelanjutan

- Mendorong dan fasilitasi (inkubator bisnis) lembaga pendidikan (SMK peternakan, SPMA, dan PT Peternakan)
- Mendorong penerbitan regulasi alih fungsi lahan peternakan untuk permukiman atau kegiatan lain.
- Regulasi untuk mendorong kebijakan insentif bagi investor, kemudahan mendapatkan lokasi/kawasan dengan HGU yang layak, Kemudahan dalam pelayan investasi (perizinan dan potensi lokasi).
- Optimalisasi lahan terbatas dengan mendorong implementasi peternakan integrasi dengan perkebunan, pertanian dan kehutanan (agroforestry) maupun dengan lahan pasca tambang.
- Mendorong teralokasikanya kawasan Peternakan di Kabupaten/Kota
- Membangun jejaring pemasaran dan akses pasar lokal, regional, nasional dan ekspor (Offline dan Online)
- Mendorong promosi dan branding produk peternakan lokal melalui media digital dan pariwisata
- Mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif komoditas/produk peternakan

d. Kelemahan dan Ancaman WT (Weaknesses-Threats): Efisiensi dan Bertahan

- Optimalisasi Lahan Terbatas (2025-2027) dengan mendorong implementasi peternakan integrasi dengan perkebunan, pertanian dan kehutanan (agroforestry) maupun dengan lahan pasca tambang.
- Eksplorasi bahan baku pakan murah dan menyediakan informasi ketersediaan (supply chain)
- Pembangunan pusat pakan mandiri dengan pengolahan pakan Faslitasi Infrastruktur dan teknologi pengolahan, produksi, distribusi, penyimpanan bahan baku pakan.
- Membangun sistem penyediaan bahan baku pakan dengan sektor perkebunan, pertanian , perikanan dan perindagkop
- Mendorong Teknologi dan Inovasi pengembangan varietas sumber pakan yang tahan kondisi cuaca/iklim dan tanah di Kaltim
- Mendorong akses pembiayaan ke lembaga keuangan dan program pembiayaan yang terjangkau.
- Peningkatan keterampilan Manajemen Keuangan dan perencanaan bisnis

- Referensi harga produk komoditas peternakan oleh pemerintah,
- Pengendalian supply demand produk peternakan
- Diversifikasi produk olahan dan peningkatan mutu, keamanan dan daya saing produk peternakan.
- Mendorong sistem kemitraan, close loop dan skema off take
- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah
- Penerapan sistem pertanggungjawaban secara sistem dan terdokumentasi

Tabel III-5. Penahapan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim

STRATEGI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4	TAHAP 5	TAHAP 6
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A Kekuatan-Peluang SO (Strengths-Opportunities) dengan strategi Akselerasi Pertumbuhan dan Ekspansi	√	√	√			
B Kekuatan-Ancaman ST (Strengths-Threats) dengan strategi Diversifikasi dan Mitigasi Risiko	√	√	√	√	√	√
C Kelemahan- Peluang WO (Weaknesses-Opportunities) dengan Stabilisasi dan Peningkatan Kapasitas			√	√	√	√
D Kelemahan dan Ancaman WT (Weaknesses-Threats): Efisiensi dan Bertahan				√	√	√

3.4 Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	SWOT
Peningkatan kapasitas produksi dan produktifitas komoditas peternakan unggulan dan potensi ternak lokal	Optimalisasi reproduksi ternak besar melalui Intensifikasi Kawin Alam (INKA) dan Inseminasi Buatan, Monitoring dan evaluasi produksi berbasis spasial dan IOT.	SO
	Inovasi teknologi dalam budidaya dalam upaya peningkatan efisiensi biaya produksi	SO
	Mendorong usaha pembibit lokal untuk peningkatan produksi bibit ternak berkualitas	SO
	Memaksimalkan potensi ternak lokal (Aneka Ternak dan plasma nutfah)	SO
Peningkatan Status Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner daerah	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular (PHMS) berorientasi pada tercapainya kekebalan populasi, surveilans penyakit dengan kaidah epidemiologi dengan menggunakan teknologi	ST
	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan (perluasan jangkauan dan responsibilitas)	ST
	Penerapan biosecurity ketat pada sentra-sentra peternakan	ST
	Peningkatan sistem lalulintas hewan, dari luar daerah maupun didalam daerah	ST
	Sistem Monitoring dan Deteksi Dini penyakit hewan yang terintegrasi	ST
	Pengendalian populasi Hewan pembawa penyakit zoonosis di wilayah padat penduduk	ST
	Pengendalian pematangan sapi betina produktif	ST
	Penataan TPH menjadi RPH skala kecil	ST
	Mendorong regulasi dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Kesejahteraan hewan	ST
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan	Program pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi peternak dan tenaga teknis bersertifikat (berjenjang)	WO

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	SWOT
kelembagaan (Peternak,petugas)	Fasilitasi regenerasi peternak dan Mendorong minat generasi muda (milenial, Gen z) untuk terjun ke sektor peternakan.	WO
	Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kelembagaan secara sistematis dan berkelanjutan	WO
	Mendorong dan fasilitasi (inkubator bisnis) lembaga pendidikan (SMK peternakan, SPMA, dan PT Peternakan)	WO
Meningkatkan ketersediaan/akses bahan baku pakan murah, dan Mendorong tumbuhnya pengolahan dan produksi pakan	Eksplorasi bahan baku pakan murah dan menyediakan informasi ketersediaan (supply chain)	WT
	Pembangunan pusat pakan mandiri dengan pengolahan pakan Fasilitasi Infrastruktur dan teknologi pengolahan, produksi, distribusi, penyimpanan bahan baku pakan.	WT
	Membangun sistem penyediaan bahan baku pakan dengan sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan perindagkop	WT
	Mendorong Teknologi dan Inovasi pengembangan varietas sumber pakan yang tahan kondisi cuaca/iklim dan tanah di Kaltim	WT
Meningkatkan kemudahan dan akses pembiayaan, menciptakan lingkungan agribisnis yang kondusif	Mendorong akses pembiayaan ke lembaga keuangan dan program pembiayaan yang terjangkau.	WT
		WT
	Peningkatan keterampilan Manajemen Keuangan dan perencanaan bisnis	WT
	Referensi harga produk komoditas peternakan oleh pemerintah, Pengendalian supply demand produk peternakan	WT
Mendorong sistem budidaya ternak integrasi dan mendorong alokasi kawasan peternakan	Mendorong penerbitan regulasi alih fungsi lahan peternakan untuk permukiman atau kegiatan lain.	WO
	Regulasi untuk mendorong kebijakan insentif bagi investor, kemudahan mendapatkan lokasi/kawasan dengan HGU yang layak, Kemudahan dalam pelayan investasi (perizinan dan potensi lokasi).	WO
	Optimalisasi lahan terbatas dengan mendorong implementasi peternakan integrasi dengan perkebunan, pertanian dan kehutanan (agroforestry) maupun dengan lahan pasca tambang.	WO
	Mendorong teralokasinya kawasan Peternakan di Kabupaten/Kota	WO
Mengoptimalkan Hilirisasi dengan peningkatan Produk Peternakan berdaya saing dan peningkatan akses pasar (regional, Nasional dan ekspor)	Diversifikasi produk olahan dan peningkatan mutu, keamanan dan daya saing produk peternakan.	WT
	Membangun jejaring pemasaran dan akses pasar lokal, regional, nasional dan ekspor (Offline dan Online), Kolaborasi dengan e-commerce	WO
	Mendorong promosi dan branding produk peternakan lokal melalui media digital dan pariwisata	WO
	Mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif komoditas/produk peternakan	WO
Kolaborasi kerjasama dan kemitraan antar pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Sinergi antara stakeholder dalam pengembangan sektor peternakan.	ST
	Regulasi yang mendorong Investor untuk kebijakan insentif, kemudahan mendapatkan lokasi/kawasan dengan HGU yang layak, Kemudahan dalam pelayanan investasi (perizinan dan potensi lokasi).	ST
	Mendorong sistem kemitraan, close loop dan skema off take Insentif bagi peternak di sektor peternakan.	WT SO
Membangun Kesadaran, implementasi Akuntabilitas dan peningkatan pelayanan masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah	WT
	Penerapan Sistem perencanaan kinerja serta Monitoring-Evaluasi yang Efektif	SO
	Optimalisasi pengelolaan BMD dengan aplikasi digital	SO
	Penerapan sistem pertanggungjawaban secara sistem dan terdokumentasi	WT
	Peningkatan fungsi PPID dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Pelayanan umum	SO

Tabel III-6. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) PD

No.	Operasionalisasi NSPK (Mandat Nasional)	Arah Kebijakan RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra Peternakan dan Kesehatan Hewan 2025-2029
I.	Peningkatan Produksi dan Mutu Ternak (Implementasi UU Peternakan dan Keswan, Standar Bibit dan Pakan)	Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas peternakan unggulan dan potensi ternak lokal 2 Meningkatkan ketersediaan/akses bahan baku pakan murah, dan Mendorong tumbuhnya pengolahan dan produksi pakan 3 Mendorong sistem budidaya ternak integrasi dan mendorong alokasi kawasan peternakan
II.	Jaminan Keamanan Pangan Asal Hewan (KPHA) (Mandat Keamanan Pangan, Standar Mutu)	Meningkatkan hilirisasi produk unggulan daerah , seperti komoditas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 4 Mengoptimalkan Hilirisasi dengan peningkatan Produk Peternakan berdaya saing dan peningkatan akses pasar (regional, Nasional dan ekspor)
III.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Mandat Perlindungan Hewan dan Zoonosis)	Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 5 Peningkatan Status Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner daerah
IV.	Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peternak (Mandat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan SDM)	Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 6 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan (Peternak,petugas) 7 Meningkatkan kemudahan dan akses pembiayaan, menciptakan lingkungan agribisnis yang kondusif 8 Kolaborasi kerjasama dan kemitraan antar pemerintah, swasta, dan masyarakat.
V.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi berbasis kinerja; 2. Meningkatkan kualitas belanja dengan mengutamakan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran pembangunan daerah; 3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara; 4. Mengoptimalkan penerapan sistem merit; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis digital; 6. Meningkatkan penerapan nilai-nilai integritas dalam budaya kerja aparatur; 7. Memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal; dan 8. Mengoptimalkan tata kelola pencatatan dan pemanfaatan aset daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 9 Membangun Kesadaran, implementasi Akuntabilitas dan peningkatan pelayanan masyarakat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program disusun dalam kerangka strategis nasional dan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan nasional serta dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Program pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama 5 (lima) Tahun ke depan yang disesuaikan dengan urusan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 6 (enam) kelompok program, yaitu program yang menunjang penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan dan program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029. Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan

sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Kegiatan-kegiatan penunjang dan pembangunan peternakan pada Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
2. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
4. Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
 - Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
5. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
 - Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

6. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian
 - Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
 - Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan
7. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
 - Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis
8. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksian HPM
9. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
 - Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
 - Sub Kegiatan Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan
 - Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
 - Sub Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan

10. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
11. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
12. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
13. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
 - Sub Kegiatan Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
 - Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
14. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
15. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner

16. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Sub Kegiatan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
18. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
19. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

20. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas
21. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
22. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas
23. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainn

Tabel IV-1. Keterkaitan Permasalahan Dengan Program

Masalah Utama	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Program	
Peran Sub Sektor Peternakan dan Keswan Kurang Optimal dalam Diversifikasi Ekonomi	Produksi belum mencukupi terhadap peningkatan konsumsi pangan asal hewan/ternak	Laju produksi lokal kurang optimal memenuhi kebutuhan pangan asal ternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Munculnya penyakit hewan menular dan wabah yang mengancam produktivitas ternak dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di sektor peternakan, termasuk kurangnya tenaga ahli dan keterampilan peternak	Program Penyuluhan Pertanian	
		Tingginya harga pakan dan keterbatasan ketersediaan bahan baku pakan.	Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian	
	Rendahnya Pendapatan Usaha Peternakan untuk Menopang Kebutuhan Ekonomi Peternakan	Kesulitan peternak dalam mengakses modal dan sistem agribisnis yang tidak kondusif (pasar tidak stabil, ketergantungan terhadap pasar lokal, pergeseran minat ke frozen)	Keterbatasan lahan untuk peternakan dan infrastruktur yang kurang memadai.	Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Daya saing produk peternakan yang rendah dan kesulitan akses pasar	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian
		Kurangunya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Belum optimalnya fungsi sistem kesekretariatan	Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintahan Provinsi
	Penerapan Akuntabilitas dan Pelayanan Pemerintah Belum Dilaksanakan Secara Komprehensif			

Adapun hasil perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-2. Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah	1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sub Sektor Peternakan	1. Meningkatkan Kesejahteraan Peternak	Meningkatnya Kemanfaatan sarana terhadap kinerja teknis kegiatan agribisnis peternakan		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan (%)		
					Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP)		
					Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan (Skor)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Prioritas
				Meningkatnya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Omset Pemasaran Produk UPH (%)	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kegiatan Prioritas
			Terawasanya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	Kegiatan Pengawasan Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Sub Kegiatan Prioritas	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
			Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis di wilayah Kaltim	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner (skor)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Prioritas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase wilayah yang terkendali dari Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) (%)	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Prioritas
				Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	Sub Kegiatan Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Sub Kegiatan Prioritas
				Meningkatnya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat PraNKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Kegiatan Prioritas
				Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (Laporan)	Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Sub Kegiatan Prioritas
				Meningkatnya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Masyarakat Veteriner	Tingkat kesadaran masyarakat yang memahami kesejahteraan hewan (%)	Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Kegiatan Prioritas
				Terlaksananya pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan (Unit Usaha)	Sub Kegiatan Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Sub Kegiatan Prioritas
				Meningkatnya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan penerapan SKSR/AMPM pada sapi betina di RPH (%)	Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Kegiatan Prioritas
				Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Sub Kegiatan Prioritas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) (%)	Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Kegiatan Prioritas
				Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Sub Kegiatan Prioritas
				Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (Orang)	Sub Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Sub Kegiatan Prioritas
				Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan (Produk)	Sub Kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Sub Kegiatan Prioritas
				Meningkatnya Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat kepatuhan persyaratan teknis produk hewan (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku (%)	Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kegiatan Prioritas
				Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Sub Kegiatan Prioritas
			Meningkatnya peran aktif pelaku usaha peternakan		Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan (skor)	Program Perizinan Usaha Pertanian	
				Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akses Pembiayaan (Milyar, Rupiah)	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Persentase PKS yang sesuai Kaidah peraturan yang ada (%) Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian	
			Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Peternakan	Berkembangnya Penerapan Penyuluhan Pertanian Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian Berkembangnya Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Informasi Supply Demand Komoditas/Produk Peternak (Dokumen) Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen) Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem integrasi dengan perkebunan sawit (unit/kelompok)	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
					Persentase Peningkatan kompetensi Peternak (%)	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
				Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Kelembagaan Korporasi/Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi (%)	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
					Jumlah rencana aksi kab/kota untuk mendukung Korporasi ternak (Dokumen)	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
				Terlaksananya pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	Sub Kegiatan Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	
				Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Unit)	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
		2. Meningkatnya Produksi dan Daya Saing Dan Komoditas Peternakan					Kelembagaan Koorporasi Petani
			Meningkatnya Manfaat Sarana terhadap kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	
					Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Skor)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah Populasi Ternak/Hewan (ST)	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
					angka kelahiran (%)	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
					Persentase jumlah ternak yang ber-SKLB (%)	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
					Persentase Jumlah Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan (%)	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
			Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan		Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	
			Meningkatkan Manfaat Sarana terhadap kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Jumlah pupuk KOHE (Ton)	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi (Stek/pols)	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan olahan (Ton)	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (Laporan)	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	
			Meningkatnya Kemanfaatan sarana terhadap kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi peternakan		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi Peternakan (skor)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Prioritas
				Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Angka kelahiran sapi (%)	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan Prioritas
					Jumlah sapi bibit yang ber-SKLB (Ekor)	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan Prioritas
					Jumlah kelahiran sapi hasil IB (Ekor)	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan Prioritas
					Jumlah usaha peternak sapi, kambing dan domba (RT)	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu	Kegiatan Prioritas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan Prioritas
			Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase peredaran DOC dibawah standar (%)	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan Prioritas
					Persentase pertumbuhan closed house (%)	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan Prioritas
					Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nutfah) (RT)	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan Prioritas
					Jumlah usaha peternak unggas Non Ras (RT)	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan Prioritas
					Jumlah usaha peternak petelur (RT)	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan Prioritas
				Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi	Sub Kegiatan Prioritas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
				Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah unit/kelompok pengolahan pakan/bank pakan (unit/kelompok)	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi	Kegiatan Prioritas
					Persentase peningkatan mutu keamanan pakan (%)	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi	Kegiatan Prioritas
				Terkendalinya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (Laporan)	Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Sub Kegiatan Prioritas
				Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah identifikasi sumber bahan baku pakan lokal (Unit/Kelompok)	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi	Kegiatan Prioritas
					Luas lahan hijauan pakan ternak unggul dalam bentuk polygon (Ha)	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi	Kegiatan Prioritas
				Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar (Dokumen)	Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Sub Kegiatan Prioritas
				Meningkatnya Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Persentase obat hewan yang beredar yang memenuhi persyaratan mutu (%) Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya luas kawasan untuk peternakan		Luas Kawasan untuk peternakan (Ha)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Prioritas
				Meningkatnya Penataan Prasarana Pertanian Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah investor usaha peternakan (Unit) Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kegiatan Prioritas Sub Kegiatan Prioritas
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Sub Kegiatan Prioritas
				Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Sub Kegiatan Prioritas
			Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis di wilayah Kaltim		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH (skor)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Prioritas
				Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase wilayah yang terkendali dari PHMSZ dari daerah terdampak (%)	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Prioritas
				Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Sub Kegiatan Prioritas
				Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah yang dilakukan surveillance hewan (Kecamatan)	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Prioritas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Sub Kegiatan Prioritas
				Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha peternakan yang menerapkan Biosecurity (Kelompok)	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Prioritas
					Persentase hewan yang dilakukan pelayanan (%)	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Prioritas
				Terlayannya Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Sub Kegiatan Prioritas
				Meningkatnya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Tingkat kepatuhan persyaratan teknis KESWAN (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku (%)	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Kegiatan Prioritas
					Hewan yang terlindungi dari PHMSZ pasca lalu lintas di titik sebar (%)	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Kegiatan Prioritas
				Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM (Laporan)	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Sub Kegiatan Prioritas
				Meningkatnya Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (skor)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase keterlambatan penerbitan sertifikat hasil pengujian (%) Tingkat Kepatuhan/ketepatan waktu kalibrasi alat Lab (%) Persentase kesalahan hasil uji (%)	Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah		Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen) Nilai AKIP Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Meningkatnya Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%) Persentase dokumen perencanaan, penganggaran tepat waktu (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Monev Tepat waktu (%)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen data informasi statistik dan spasial tepat waktu (%)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi (%) Persentase ketepatan realisasi angkas per Triwulan (%)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas/Bulan)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasi BMD (%) PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi (%)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian (%)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pengelolaan kehumasan (%)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu (%)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE (%)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan (%)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Urusan Pemerintah Daerah			
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD (%)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi (%)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas/Bulan)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasi BMD (%)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi (%)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian (%)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pengelolaan kehumasan (%)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu (%)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE (%)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan (%)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Urusan Pemerintah Daerah			
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD (%)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%) Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Orang/Bulan)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasi BMD (%) Persentase Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi (%)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian (%)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pengelolaan kehumasan (%)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu (%) Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE (%)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan (%)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Urusan Pemerintah Daerah			
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD (%)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.3 Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Tabel IV-3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN															
BIDANG PERTANIAN															
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMNATAN TIMUR					83.788.529.000	63.071.379.000	63.236.924.000	65.233.597.000	64.210.797.000						
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					71.355.528.082	54.877.082.800	57.215.413.000	59.078.510.500	57.365.456.200						
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Kemanfaatan sarana terhadap kinerja teknis kegiatan agribisnis peternakan	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	87,02	90,54	293.402.156	92,35	300.000.000	94,19	350.000.000	96,08	350.000.000	98,00	400.000.000	Program Prioritas
	Meningkatnya Kemanfaatan sarana terhadap kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi peternakan	Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi peternakan	Skor	80,66	85,57	25.531.861.959	88,14	9.089.518.019	90,78	9.153.469.821	93,51	9.153.469.821	96,31	7.134.163.785	Program Prioritas
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Meningkatnya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Omset Pemasaran Produk UPH	%	1,00	5,00	293.402.156	5,00	300.000.000	5,00	350.000.000	5,00	350.000.000	5,00	400.000.000	Kegiatan Prioritas
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	4	80.249.904	4	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	Sub Kegiatan Prioritas
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	4	4	213.152.252	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Angka kelahiran sapi	%	61,00	61,50	365.282.200	62,00	452.876.090	62,00	538.213.564	62,00	539.461.272	62,00	419.289.657	Kegiatan Prioritas
		Jumlah sapi bibit yang ber-SKLB	Ekor	175,00	275,00	85.000.000	325,00	113.236.169	375,00	114.370.382	425,00	114.635.520	475,00	89.099.052	Kegiatan Prioritas
		Jumlah kelahiran sapi hasil IB	Ekor	950	1500	230.282.200	1750	300.154.331	2000	356.566.486	2250	357.393.093	2500	277.779.398	Kegiatan Prioritas
		Jumlah usaha peternak sapi, kambing dan domba	RT	3238	3398	20.730.428.543	3428	5.710.229.028	3458	5.685.202.141	3488	5.535.340.640	3518	4.271.113.862	
		Persentase peredaran DOC dibawah standar	%	2	1,80	63.613.000	1,70	25.000.000	1,60	25.000.000	1,50	25.000.000	1,40	25.000.000	Kegiatan Prioritas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Persentase pertumbuhan closed house	%	50,00	64,00	84.817.000	69,00	25.000.000	72,00	25.000.000	75,00	25.000.000	75,00	57.500.000	Kegiatan Prioritas
		Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	RT	3047	3754	106.022.000	4167	364.500.000	4624	319.000.000	5134	300.000.000	5699	300.000.000	Kegiatan Prioritas
		Jumlah usaha peternak unggas Non Ras	RT	37621	37661	106.022.000	37681	300.000.000	37701	300.000.000	37721	377.500.000	37721	150.000.000	Kegiatan Prioritas
		Jumlah usaha peternak petelur	RT	295	335	2.181.433.160	355	150.000.000	375	150.000.000	395	150.000.000	415	150.000.000	Kegiatan Prioritas
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	4	21.410.992.943	4	6.576.495.618	4	6.694.352.573	4	6.546.830.525	4	5.057.281.969	Sub Kegiatan Prioritas
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	5	2.541.907.160	5	864.500.000	5	819.000.000	5	877.500.000	5	682.500.000	Sub Kegiatan Prioritas
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah unit/kelompok pengolahan pakan/bank pakan (unit/kelompok)	Unit/Kelompok	41	95	705.848.462	125	522.746.270	155	527.982.280	185	529.206.270	215	411.319.082	Kegiatan Prioritas
		Persentase peningkatan mutu keamanan pakan	%	80,00	82,00	255.632.513	83,00	224.034.116	84,00	226.278.120	85,00	226.802.687	86,00	176.279.607	Kegiatan Prioritas
		Jumlah identifikasi sumber bahan baku pakan lokal	Unit/Kelompok	35	65	86.665.425	80	153.792.019	95	156.104.681	104	194.263.603	119	161.886.336	Kegiatan Prioritas
		Luas lahan hijauan pakan ternak unggul dalam bentuk polygon	Ha	23	100	162.497.202	200	279.300.000	300	283.500.000	400	352.800.000	500	294.000.000	Kegiatan Prioritas
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Laporan	2	2	961.480.975	2	746.780.386	2	754.260.400	2	756.008.957	2	587.598.689	Sub Kegiatan Prioritas
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Dokumen	1	2	249.162.627	2	433.092.019	2	439.604.681	2	547.063.603	2	455.886.336	Sub Kegiatan Prioritas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Meningkatnya Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase obat hewan yang beredar yang memenuhi persyaratan mutu	%	94,88	96,09	368.318.254	96,59	468.649.996	97,09	446.252.167	97,59	426.066.736	98,09	350.896.791	
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	4	4	368.318.254	4	468.649.996	4	446.252.167	4	426.066.736	4	350.896.791	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya luas kawasan untuk peternakan	Luas Kawasan untuk peternakan	Ha	300,00	500,00	2.030.051.143	600,00	2.880.000.000	700,00	2.880.000.000	800,00	2.880.000.000	900,00	1.920.000.000	Progr am Priori tas
Penataan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah investor usaha peternakan	Unit	3	5	2.030.051.143	6	2.880.000.000	7	2.880.000.000	8	2.880.000.000	10	1.920.000.000	Kegia tan Priori tas
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, kawasan, dan komoditas Pertanian	Dokumen	9	1	1.835.406.058	3	2.380.000.000	3	2.380.000.000	3	2.380.000.000	3	1.420.000.000	Sub Kegiat an Priorit as
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	0	1	74.935.210	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	Ha	10	10	119.709.875	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	Sub Kegiat an Priorit as
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis di wilayah Kaltim	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH	Skor	91,25	94,97	3.022.595.414	95,47	2.640.000.000	95,97	2.740.000.000	96,47	2.740.000.000	96,97	2.510.000.000	Progr am Priori tas
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	87,54	91,08	1.781.796.219	92,90	500.000.000	94,76	550.000.000	96,65	550.000.000	98,58	600.000.000	Progr am Priori tas
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase wilayah yang terkendali dari PHMSZ dari daerah terdampak	%	96,20	96,30	886.338.600	96,35	983.014.256	96,40	1.020.249.635	96,45	1.020.249.635	96,50	934.608.241	Kegia tan Priori tas
		Jumlah wilayah yang dilakukan surveillance hewan	Kecamatan	30	35	141.993.308	37	167.320.540	38	173.658.447	39	173.658.447	40	159.081.279	Kegia tan Priori tas
		Jumlah unit usaha peternakan yang menerapkan Biosecurity	Kelompok	250	280	264.485.584	290	97.505.205	300	101.198.584	310	101.198.584	320	92.703.813	Kegia tan Priori tas
		Persentase hewan yang dilakukan pelayanan	%	50,13	51,13	1.322.427.922	51,63	901.095.890	52,13	935.228.311	52,63	935.228.311	53,13	856.723.744	Kegia tan Priori tas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Persentase wilayah yang terkendali dari Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)	%	76,64	82,52	184.998.154	84,46	100.118.400	86,40	110.118.400	88,34	110.118.400	90,29	120.118.400	
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	12	4	886.338.600	4	983.014.256	4	1.020.249.635	4	1.020.249.635	4	934.608.241	Sub Kegiat an Priorit as
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	30	40	141.993.308	45	167.320.540	50	173.658.447	55	173.658.447	60	159.081.279	Sub Kegiat an Priorit as
Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Terlayannya Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	12	12	1.586.913.506	12	998.601.095	12	1.036.426.895	12	1.036.426.895	12	949.427.557	Sub Kegiat an Priorit as
Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	50	50	184.998.154	50	100.118.400	50	110.118.400	50	110.118.400	50	120.118.400	
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Meningkatnya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Tingkat kepatuhan persyaratan teknis KESWAN (jalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	%	40,15	54,48	101.837.500	63,47	232.488.767	73,97	241.295.160	86,17	241.295.160	98,46	221.040.457	Kegia tan Priorit as
		Hewan yang terlindungi dari PHMSZ pasca lalu lintas di titik sebar	%	98,00	98,15	305.512.500	98,70	258.575.342	98,90	268.369.863	99,10	268.369.863	99,30	245.842.466	Kegia tan Priorit as
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	Laporan	12	2	407.350.000	2	491.064.109	2	509.665.023	2	509.665.023	2	466.882.923	Sub Kegiat an Priorit as
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Meningkatnya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat PraNKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	4,33	4,74	649.999.871	5,52	75.000.000	5,85	98.500.000	6,21	98.500.000	6,62	122.000.000	Kegia tan Priorit as
		Tingkat Kesadaran Masyarakat yang memahami kesejahteraan hewan	%	20,00	50,00	94.280.203	60,00	62.907.000	62,00	69.827.000	65,00	69.827.000	70,00	76.750.000	Kegia tan Priorit as
		Persentase Peningkatan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	%	83,00	86,47	354.998.041	86,97	164.881.600	87,54	173.381.600	88,04	173.381.600	88,50	181.881.600	Kegia tan Priorit as
		Persentase peningkatan penerapan SKSR/AMPM pada sapi betina di RPH	%	21,76	26,37	479.999.769	30,77	80.000.000	35,16	80.000.000	39,56	80.000.000	43,96	80.000.000	Kegia tan Priorit as

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM/ KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	2	2	649.999.871	2	75.000.000	3	98.500.000	3	98.500.000	4	122.000.000	Sub Kegiatan Prioritas
Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pendampingan teknis kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	4	5	94.280.203	5	62.907.000	5	69.827.000	6	69.827.000	6	76.750.000	Sub Kegiatan Prioritas
Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Unit Usaha	10	2	254.999.584	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	Sub Kegiatan Prioritas
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	30	10	479.999.769	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	Sub Kegiatan Prioritas
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	400	400	74.998.577	400	58.626.200	400	63.626.200	400	63.626.200	400	68.626.200	Sub Kegiatan Prioritas
Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	Produk	1	1	24.999.880	1	26.255.400	1	29.755.400	1	29.755.400	1	33.255.400	Sub Kegiatan Prioritas
Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat kepatuhan persyaratan teknis produk hewan (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	%	58,00	80,47	17.520.181	83,36	17.093.000	86,33	18.173.000	89,77	18.173.000	93,06	19.250.000	Kegiatan Prioritas
Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	613	856	17.520.181	858	17.093.000	860	18.173.000	860	18.173.000	865	19.250.000	Sub Kegiatan Prioritas
Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya peran aktif pelaku usaha peternakan	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	83,59	86,96	249.474.106	88,70	350.000.000	90,48	400.000.000	92,28	400.000.000	94,13	700.000.000	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akses Pembiayaan	Milyar, Rupiah	61,20	63	141.185.232	64	175.000.000	65	200.000.000	66	200.000.000	67	350.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Persentase PKS yang sesuai Kaidah peraturan yang ada	%	0,30	2,90	108.288.874	2,90	175.000.000	2,90	200.000.000	2,90	200.000.000	2,90	350.000.000	
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	141.185.232	4	175.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	350.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	4	108.288.874	4	175.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	350.000.000	
Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Peternakan	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	Skor	75,83	82,02	2.530.862.100	85,30	2.880.000.000	88,71	2.880.000.000	92,26	2.880.000.000	95,95	1.920.000.000	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Berkembangnya Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Informasi Supply Demand Komoditas/Produk Peternak	Dokumen	1	14	146.575.377	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	150.000.000	
		Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem integrasi dengan perkebunan sawit	Unit/Kelompok	358	3	391.407.044	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	300.000.000	
		Persentase Peningkatan kompetensi Peternak	%	60,00	83,00		85,00		87,00		89,00		90,00		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	2	2	146.575.377	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	150.000.000	
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	17	8	391.407.044	5	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	300.000.000	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Kelembagaan Korporasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	%	0,50	1,21	1.948.786.211	1,31	1.800.000.000	1,41	1.850.000.000	1,51	1.900.000.000	1,62	1.220.000.000	
		Jumlah rencana aksi kab/kota untuk mendukung Korporasi ternak	Dokumen	1	3	44.093.468	3	380.000.000	3	330.000.000	3	280.000.000	3	250.000.000	
Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Terlaksananya pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	10	22	1.684.225.402	25	1.800.000.000	28	1.850.000.000	31	1.900.000.000	34	1.220.000.000	
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	9	3	1.992.879.679	3	380.000.000	3	330.000.000	3	280.000.000	3	250.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,65	92,57	35.385.026.593	93,03	35.923.570.681	93,50	37.932.249.379	93,96	39.778.862.179	94,43	41.817.805.015	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100,00	100,00	530.458.392	100,00	313.994.100	100,00	329.693.800	100,00	346.178.500	100,00	363.487.400	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran tepat waktu	%	90,00	100,00	258.345.553	100,00	290.000.000	100,00	321.000.000	100,00	326.468.750	100,00	344.879.688	
		Persentase Pelaporan Monev Tepat waktu	%	62,50	100,00	73.023.373	100,00	95.000.000	100,00	100.000.000	100,00	102.500.000	100,00	117.500.000	
		Persentase dokumen data informasi statistik dan spasial tepat waktu	%	22,22	88,89	582.847.741	100,00	402.500.000	100,00	405.875.000	100,00	439.250.000	100,00	449.250.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	6	233.646.865	6	265.000.000	6	285.000.000	6	286.356.250	6	302.674.063	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	14.240.182	2	12.500.000	2	18.500.000	2	20.112.500	2	20.112.500	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	10.458.506	2	12.500.000	2	17.500.000	2	20.000.000	2	22.093.125	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	9	73.023.373	9	95.000.000	9	100.000.000	9	102.500.000	9	117.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	6	582.847.741	6	402.500.000	6	405.875.000	6	439.250.000	6	449.250.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	%	5,00	3,75	31.657.513.078	3,50	31.962.989.880	3,25	33.637.889.374	3,00	35.291.533.842	2,75	37.027.860.534	
		Persentase ketepatan realisasi angka per Triwulan	%	93,00	93,50	69.985.000	93,75	90.000.000	94,00	95.250.000	94,50	100.762.500	95,00	106.550.625	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	99	222	31.194.643.999	225	31.497.989.880	227	33.072.889.374	227	34.726.533.842	228	36.462.860.534	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	447.815.112	12	450.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	4.958.667	12,00	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	2	10.095.300	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	1	12	59.976.800	12	80.000.000	12	85.250.000	12	90.762.500	12	96.550.625	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	10.008.200	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasi BMD	%	80,00	82,00	25.060.000	84,00	36.792.000	86,00	38.631.600	88,00	40.563.180	90,00	42.591.338	
		PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	%	80,00	82,00	17.400.000	84,00	18.270.000	86,00	19.183.500	88,00	20.142.675	90,00	21.149.808	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas)	Dokumen	1	1	9.830.000	1	10.332.000	1	10.848.600	1	11.391.030	1	11.960.581	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas)	Dokumen	2	2	15.230.000	2	26.460.000	2	27.783.000	2	29.172.150	2	30.630.757	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas)	Laporan	4	4	17.400.000	4	18.270.000	4	19.183.500	4	20.142.675	4	21.149.808	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	%	72,95	77,00	111.883.000	79,00	144.261.057	81,00	151.474.108	83,00	159.047.812	85,00	167.000.201	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	-	2	10.500.000	2	11.025.000	2	11.576.250	2	12.155.062	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	10.298.000	1	10.836.000	1	11.377.800	1	11.946.690	1	12.544.024	
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	4	57.185.000	4	70.425.057	4	73.946.308	4	77.643.622	4	81.525.803	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	17	6	44.400.000	25	52.500.000	30	55.125.000	35	57.881.250	40	60.775.312	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pengelolaan kehumasan	%	70,00	83,00	730.385.785	86,00	852.743.631	89,00	1.030.380.997	92,00	1.059.400.361	95,00	1.189.870.109	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	32.773.098	4	31.500.000	4	33.075.000	4	34.728.750	4	36.465.187	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	5	84.239.360	11	80.811.333	12	84.851.900	13	89.094.495	14	93.549.220	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	6	104.773.327	8	109.922.838	8	115.418.980	8	121.189.929	8	127.249.426	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	17	3	19.800.000	3	20.361.600	3	21.379.698	3	22.448.664	3	23.571.097	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	488.800.000	12	610.147.860	12	775.655.419	12	791.938.523	12	909.035.179	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	94,70	95,10	93.028.703	95,30	16.175.237	95,50	16.983.990	95,70	17.833.199	95,90	18.724.859	
		Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	95,90	96,30		96,50		96,70		96,90		97,10		
Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dinas)	Unit	78	7	93.028.703	2	16.175.237	2	16.983.990	2	17.833.199	2	18.724.859	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	80,00	85,00	1.765.554.360	86,00	2.014.838.876	88,00	2.115.580.810	90,00	2.221.359.860	91,00	2.332.427.853	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	16.680.000	4	17.501.400	4	18.376.470	4	19.295.293	4	20.260.058	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	435.011.980	12	457.023.714	12	479.874.890	12	503.868.644	12	529.062.076	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.313.862.380	12	1.540.313.762	12	1.617.329.450	12	1.698.195.923	12	1.783.105.719	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	%	95,00	96,00	530.458.392	96,00	313.994.100	96,00	329.693.800	96,00	346.178.500	96,00	363.487.400	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	18	20	279.333.800	20	134.659.880	22	146.392.869	22	158.712.523	24	151.648.124	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	168	273	128.115.342	178	100.000.000	183	100.000.000	188	100.000.000	193	120.000.000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	8	8	55.556.175	8	53.084.220	8	55.738.431	8	58.525.352	8	61.451.620	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	0	-	2	26.250.000	2	27.562.500	2	28.940.625	2	30.387.656	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	7	2	67.453.075	-	-	-	-	-	-	-	-	
UPTD PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK					9.611.988.891	5.224.422.800	2.898.144.000	2.975.551.200	3.206.828.700						
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Manfaat Sarana terhadap kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Skor	81,02	85,95	7.506.483.033	88,53	3.500.000.000	91,18	1.050.000.000	93,92	1.050.000.000	96,74	1.100.000.000	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	143,52	160,00	2.917.664.412	175,00	1.110.000.000	190,00	210.000.000	205,00	210.000.000	220,00	250.000.000	
		angka kelahiran	%	38,00	41,00	1.458.832.206	43,00	230.000.000	45,00	100.000.000	47,00	100.000.000	50,00	100.000.000	
		Persentase jumlah ternak yang ber-SKLE	%	0,00	5,50	972.554.803	6,05	160.000.000	6,66	100.000.000	7,32	100.000.000	8,05	100.000.000	
		Jumlah Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	3,50	3,10	972.554.804	3,00	200.000.000	2,90	100.000.000	2,80	100.000.000	2,70	100.000.000	
		Jumlah pupuk KOHE	Ton	13,55	25,00	169.268.115	35,00	100.000.000	40	100.000.000	45	100.000.000	50	100.000.000	
		jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	Stek/pols	125.000	155.000	169.268.115	160.000	500.000.000	165.000	100.000.000	170.000	100.000.000	175.000	100.000.000	
Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan olahan	Ton	1.501	2.300	846.340.578	2.500	1.200.000.000	2.700	340.000.000	2.800	340.000.000	3.000	350.000.000			
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12,00	12,00	6.321.606.225	12,00	1.700.000.000	12,00	510.000.000	12,00	510.000.000	12,00	550.000.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12,00	12,00	1.184.876.808	12,00	1.800.000.000	12,00	540.000.000	12,00	540.000.000	12,00	550.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,65	92,57	1.632.182.037	93,03	1.356.146.400	93,50	1.461.453.800	93,96	1.519.526.500	94,43	1.680.502.800	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100,00	100,00	473.323.821	100,00	368.276.400	100,00	386.690.200	100,00	406.024.700	100,00	426.325.900	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	%	5,00	3,75	134.762.000	3,50	130.000.000	3,25	130.000.000	3,00	130.000.000	2,75	130.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas)	Dokumen	12,00	12,00	132.720.000	12,00	127.500.000	12,00	127.500.000	12,00	127.500.000	12,00	127.500.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas)	Dokumen	12,00	12,00	2.042.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasi BMD	%	80,00	83,50	2.042.000	84,00	2.500.000	84,50	3.000.000	85,00	3.500.000	85,50	4.000.000	
		PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	%	80,00	83,50	15.378.000	84,00	24.500.000	84,50	26.000.000	85,00	27.500.000	85,50	29.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	2.042.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	2	9.316.000	2	21.000.000	2	22.000.000	2	23.000.000	2	24.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	6.062.000	4	3.500.000	4	4.000.000	4	4.500.000	4	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	%	80,00	83,50	25.800.000	84,00	60.000.000	84,50	60.000.000	85,00	60.000.000	85,50	60.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	-	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	5	25.800.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pengelolaan kehumasan	%	80,00	83,50	353.749.052	84,00	198.000.000	84,50	215.000.000	85,00	236.000.000	85,50	263.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4	5	12.425.094	7	14.000.000	8	15.000.000	10	20.000.000	12	23.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Bangunan Kantor yang Disediakan													
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	53	14	37.070.158	6	12.000.000	8	15.000.000	9	18.000.000	10	20.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	3	22.157.800	6	12.000.000	6	15.000.000	6	18.000.000	6	20.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	282.096.000	12	160.000.000	12	170.000.000	12	180.000.000	12	200.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	94,90	95,10	18.198.941	95,30	82.000.000	95,50	84.000.000	95,70	86.000.000	95,90	90.000.000	
		Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	95,90	96,30		96,50		96,70		96,90		97,10		
Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2	18.198.941	3	42.000.000	3	44.000.000	3	46.000.000	4	50.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	80,00	85,00	1.082.252.044	86,00	859.146.400	88,00	943.453.800	90,00	976.526.500	91,00	1.104.502.800	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	13.110.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	17.000.000	4	20.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	230.102.044	12	180.422.800	12	182.000.000	12	185.000.000	12	190.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	839.040.000	12	663.723.600	12	746.453.800	12	774.526.500	12	894.502.800	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	%	80,00	83,50	473.323.821	84,00	368.276.400	84,50	386.690.200	85,00	406.024.700	85,50	426.325.900	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	16	113.785.360	18	145.000.000	18	145.000.000	18	145.000.000	18	145.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	62	50	210.838.461	65	170.000.000	65	170.000.000	65	170.000.000	65	170.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1	148.700.000	1	53.276.400	1	71.690.200	1	91.024.700	1	111.325.900	
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					2.821.012.027	2.969.873.400	3.123.367.000	3.179.535.300	3.638.512.100						
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Skor	93,35	94,28	1.517.402.358	94,75	1.650.000.000	95,23	1.700.000.000	95,70	1.700.000.000	96,18	2.000.000.000	
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Meningkatnya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase keterlambatan penerbitan sertifikat hasil pengujian	%	2,00	2,00	455.220.961	1,70	495.000.000	1,40	510.000.000	1,10	510.000.000	0,80	600.000.000	
		Tingkat Kepatuhan/ketepatan waktu kalibrasi alat Lab	%	97,80	98,20	303.480.640	98,30	330.000.000	98,40	340.000.000	98,50	340.000.000	98,60	400.000.000	
		Persentase Kesalahan hasil uji	%	1,05	1,00	758.701.601	0,95	825.000.000	0,90	850.000.000	0,85	850.000.000	0,80	1.000.000.000	
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	105,00	500,00	1.517.402.358	600,00	1.650.000.000	650	1.700.000.000	700	1.700.000.000	750	2.000.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretarian (UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian	Indeks	91,65	92,57	1.118.314.159	93,03	1.082.916.700	93,50	1.174.562.500	93,96	1.218.290.600	94,43	1.364.205.200	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100,00	100,00	185.295.510	100,00	236.956.700	100,00	248.804.500	100,00	261.244.700	100,00	274.306.900	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	%	5,00	3,75	118.405.500	3,50	113.000.000	3,25	113.000.000	3,00	113.000.000	2,75	113.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	12,00	115.320.000	12,00	110.000.000	12,00	110.000.000	12,00	110.000.000	12,00	110.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	12,00	3.085.500	12,00	3.000.000	12,00	3.000.000	12,00	3.000.000	12,00	3.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasi BMD	%	82,00	83,50	7.266.177	84,00	15.000.000	84,50	15.000.000	85,00	15.000.000	85,50	15.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	%	82,00	83,50	9.802.500	84,00	11.000.000	84,50	11.000.000	85,00	11.000.000	85,50	11.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1.869.609	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	5.396.568	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	9.802.500	4	11.000.000	4	11.000.000	4	11.000.000	4	11.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	%	82,00	0,00	-	84,00	35.000.000	84,50	65.000.000	85,00	65.000.000	85,50	65.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	-	-	-	-	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	-	-	16	35.000.000	18	35.000.000	20	35.000.000	22	35.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pengelolaan kehumasan	%	70,00	83,00	156.755.129	86,00	176.000.000	89,00	200.562.500	92,00	198.122.300	95,00	196.060.100	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	3	11.476.620	2	11.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	15.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	2	22.001.750	13	20.000.000	13	28.440.200	13	27.000.000	13	27.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	3	9.348.759	8	14.000.000	8	21.122.300	8	20.122.300	8	20.060.100	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	3.960.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	109.968.000	12	127.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	94,70	95,10	170.363.453	95,30	-	95,50	-	95,70	56.168.300	95,90	215.145.100	
		Persentase pencatatan proses pengadaan barang	%	95,90	96,30		96,50		96,70		96,90		97,10		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KET ERA NGA N
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		dan jasa melalui LPSE													
Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	10	170.363.453	0	-	0	-	15	56.168.300	40	215.145.100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	82,00	85,00	655.721.400	86,00	732.916.700	88,00	770.000.000	90,00	760.000.000	91,00	749.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	15.200.000	4	14.000.000	4	15.500.000	4	15.500.000	4	15.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	192.681.400	12	221.500.000	12	234.500.000	12	224.500.000	12	213.500.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	447.840.000	12	497.416.700	12	520.000.000	12	520.000.000	12	520.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	%	95,00	96,00	185.295.510	96,00	236.956.700	96,00	248.804.500	96,00	261.244.700	96,00	274.306.900	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	14	101.331.200	8	114.956.700	9	119.000.000	9	120.440.200	9	125.440.200	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	68	69.978.598	100	63.000.000	110	66.804.500	120	69.804.500	130	72.866.700	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	1	4.440.000	2	20.000.000	2	21.000.000	2	21.000.000	2	24.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	9.545.712	1	39.000.000	1	42.000.000	1	50.000.000	1	52.000.000	

4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah melalui Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT), Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel IV-4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Kemanfaatan sarana terhadap kinerja teknis kegiatan agribisnis peternakan	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kegiatan Prioritas
			Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Sub Kegiatan Prioritas
			Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan Prioritas
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan Prioritas
			Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi	Kegiatan Prioritas
			Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Sub Kegiatan Prioritas
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya luas kawasan untuk peternakan	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Kegiatan Prioritas
			Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Sub Kegiatan Prioritas
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Sub Kegiatan Prioritas

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Sub Kegiatan Prioritas
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis di wilayah Kaltim	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Prioritas
			Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Sub Kegiatan Prioritas
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Sub Kegiatan Prioritas
			Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Sub Kegiatan Prioritas
			Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Kegiatan Prioritas
			Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Sub Kegiatan Prioritas

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU mencerminkan hasil paling strategis yang dicapai dalam jangka menengah dan digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Adapun Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel IV-5. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sub sektor peternakan	%	1,87	1,89	1,91	1,93	1,94	1,96	Indikator Positif
2	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP)	Indeks	105,18	106,23	107,3	108,37	109,45	110,55	Indikator Positif
3	Produksi Komoditas Peternakan	Ton	90.243,30	91.030,14	91.856,19	92.723,76	93.635,28	94.593,37	Indikator Positif
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,30	80,01	80,72	81,43	82,14	82,85	Indikator Positif
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	86,70	87	88,46	89,49	90,53	91,57	Indikator Positif

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) memiliki fungsi penting untuk menilai capaian kinerja urusan pemerintahan yang menjadi data dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. IKK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu “Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular” yang dilaporkan dalam satu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (atau baseline tahun awal Renstra).

Adapun Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel IV-6. Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim Tahun 2025-2030

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Produksi Komoditas Peternakan	Ton	89.493,54	90.243,30	91.030,14	91.856,19	92.723,76	93.635,28	94.593,37	Indikator Positif
Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Skor	91,25	94,47	94,97	95,47	95,97	96,47	96,97	Indikator Positif
Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	4,33	4,52	4,74	5,52	5,85	6,21	6,62	Indikator Positif
Persentase Kelembagaan Koperasi Tani (Korporasi) yang dibentuk dan Beroperasi	%	0,5	1,11	1,21	1,31	1,41	1,51	1,62	Indikator Positif
Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	370,3	-2,75	-3,64	-3,75	-3,9	-4,15	-4,5	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan yang disusun untuk jangka waktu lima tahun. Dokumen ini dirancang sebagai panduan strategis dan kebijakan umum yang akan diimplementasikan dalam mencapai tujuan pembangunan peternakan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas peternakan, pengendalian penyakit hewan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan. Dengan demikian Dokumen Renstra 2025-2029 diharapkan dapat menjadi landasan bagi terwujudnya sektor peternakan yang maju, mandiri dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses perencanaan dan penganggaran ini dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Melalui Musrenbang, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat dihimpun dan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan, termasuk sektor peternakan dan kesehatan hewan. Dengan demikian, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi terwujudnya pembangunan peternakan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana dengan baik, Kalimantan Timur dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.